



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar, salah satunya perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan daerah dan perubahan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

5
d
f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
 - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
 - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - i. BAB IX : PENUTUP.
 - (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Apabila RPJMD telah berakhir masa periode perencanaannya dan RPJMD periode yang baru belum ditetapkan, maka RPJMD ini masih tetap berlaku dan digunakan sebagai acuan/pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan perencanaan jangka menengah SKPD.

3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

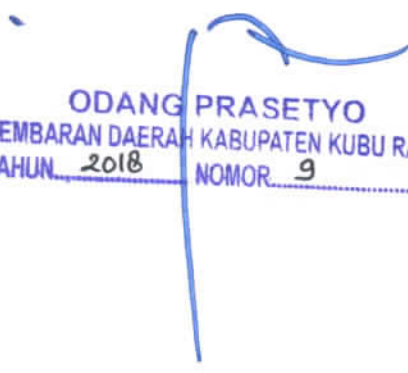
Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 1 Oktober 2018
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berkenaan dengan perubahan kewenangan daerah, nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah, target kinerja daerah serta perubahan kebijakan nasional yang mendasar lainnya, maka Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan. Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Dengan demikian RPJMD Perubahan ini merupakan penjabaran perencanaan pembangunan jangka menengah kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2014 hingga Tahun 2019. Penyusunan RPJMD Perubahan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan review dan evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah, daya saing dan pelayanan pemerintahan di semua bidang serta mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan baik dalam lingkup wilayah yang meliputi keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional maupun lingkup waktu yang menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan tahunan daerah, mengefektifkan dan fokus penanganan beberapa isu strategis daerah yang dapat dicapai dalam sisa waktu periode perencanaan lima tahunan kedua ini yang akan berakhir pada tahun 2019 berbasis holistik, integratif, tematik dan spasial.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014-2019

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019.

Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan tersusunnya Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara keseluruhan, dan akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kegiatan pembangunan secara umum.

Sungai Raya, 2018
BUPATI KUBU RAYA, 

RUSMAN ALI 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Perubahan Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	6
1.3.1. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019	7
1.3.2. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029	8
1.3.3. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018	8
1.3.4. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan Renstra SKPD ...	9
1.3.5. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RKPD	9
1.3.6. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya	11
1.4. Maksud dan Tujuan	12
1.4.1. Maksud	12
1.4.2. Tujuan	13
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	16

2.1.1.	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	16
2.1.1.1.	Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..	16
2.1.1.2.	Letak dan Kondisi Geografis	17
2.1.1.3.	Topografi	21
2.1.1.4.	Geologi	21
2.1.1.5.	Hidrologi	22
2.1.1.6.	Penggunaan Lahan	24
2.1.2.	Potensi Pengembangan Wilayah	25
2.1.3.	Wilayah Rawan Bencana	28
2.1.4.	Demografi	28
2.1.4.1.	Perkembangan Kependudukan	28
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	31
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .	31
2.2.1.1.	Pertumbuhan PDRB	31
2.2.1.2.	Laju Inflasi	35
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	37
2.2.2.1.	Pendidikan	37
2.2.2.2.	Kesehatan	38
2.2.2.3.	Kemiskinan	40
2.2.2.4.	Kepemilikan Tanah	45
2.2.2.5.	Kesempatan Kerja	45
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	45
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib Konkuren	45
2.3.1.1.	Pendidikan	45
2.3.1.2.	Kesehatan	52
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54
2.3.1.4.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	56
2.3.1.5.	Sosial	59
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Konkuren ...	60
2.3.2.1.	Tenaga Kerja	60
2.3.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62
2.3.2.3.	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ...	64
2.3.2.4.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	65

2.3.2.5.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	66
2.3.2.6.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	67
2.3.2.7.	Perhubungan	67
2.3.2.8.	Komunikasi dan Informatika	67
2.3.2.9.	Penanaman Modal	68
2.3.2.10.	Statistik	68
2.3.2.11.	Kebudayaan	69
2.3.2.12.	Perpustakaan dan Kearsipan	71
2.3.3.	Fokus Urusan Pilihan	71
2.3.3.1.	Kelautan dan Perikanan	71
2.3.3.2.	Pariwisata	72
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	72
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah	72
2.4.2.	Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur	75
2.4.2.1.	Ketersediaan Air Bersih	75
2.4.2.2.	Fasilitas Listrik	75
2.4.2.3.	Ketersediaan Penginapan	76
2.4.3.	Fokus Sumber Daya Manusia	76

BAB 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	80
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	81
3.1.1.1.	Pendapatan	81
3.1.1.2.	Belanja	83
3.1.1.3.	Pembiayaan	86
3.1.2.	Neraca Daerah	87
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2014-2016	89
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	90
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	92
3.3.	Kerangka Pendanaan	95
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	95
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	98

BAB 4. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1.	Permasalahan Pembangunan	101
4.1.1.	Identifikasi Lingkungan Internal	101

4.1.1.1.	Kekuatan Daerah	101
4.1.1.2.	Kelemahan Daerah	102
4.1.2.	Identifikasi Lingkungan Eksternal	103
4.1.2.1.	Peluang Daerah	103
4.1.2.2.	Ancaman Daerah	103
4.2.	Isu-Isu Strategis	104
4.2.1.	Isu Strategis Bidang Ekonomi	104
4.2.2.	Isu Strategis Bidang Sosial Budaya	105
4.2.3.	Isu Strategis Bidang Infrastruktur	105
BAB 5.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1.	Visi	109
5.2.	Misi	110
5.3.	Tujuan dan Sasaran	111
BAB 6.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
6.1.	Strategi	115
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan	127
6.3.	Program Pembangunan	133
BAB 7.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	134
BAB 8.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	170
BAB 9.	PENUTUP	190

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya	17
Tabel 2.2.	Nama dan Posisi Pulau Tiap Kecamatan Di Kabupaten Kubu Raya	19
Tabel 2.3.	Status Kemandirian Desa Di Kabupaten Kubu Raya 2016	21
Tabel 2.4.	Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015	25
Tabel 2.5.	Sistem Pusat-Pusat Kegiatan Di Kabupaten Kubu Raya	25
Tabel 2.6.	Tingkat Partispasi Tenaga Kerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	30
Tabel 2.7.	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	30
Tabel 2.8.	Kondisi Ketenagakerjaan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016	31
Tabel 2.9.	Distribusi PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Persen)	34
Tabel 2.10.	PDRB Per Kapita Kabupaten Kubu Raya ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2000, Tahun 2013-2016	35
Tabel 2.11.	Pertumbuhan PDRB Dan Laju Inflasi Di Kabupaten Kubu Raya	36
Tabel 2.12.	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Di Kota Pontianak Tahun 2012-2016 (Persen)	36
Tabel 2.13.	Kinerja Pendidikan	38
Tabel 2.14.	Indeks Pembangunan Manusia 2013-2016	39
Tabel 2.15.	Kinerja Kesehatan	39
Tabel 2.16.	Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator Kemiskinan	41
Tabel 2.17.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kubu Raya Dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2016	42
Tabel 2.18.	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kubu Raya Per Kecamatan Berdasarkan	

	Status Kesejahteraan	44
Tabel 2.19.	Indikator Tenaga Kerja	45
Tabel 2.20.	Data Prasarana Dikdasmen Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016/2017	48
Tabel 2.21.	Urusan Konkuren Bidang Pendidikan	48
Tabel 2.22.	Pencapaian Kinerja Pendidikan Dasar Dan Menengah Kabupaten Kubu Raya 2016/2017	50
Tabel 2.23.	Nilai Indikator Pendidikan	51
Tabel 2.24.	Urusan Konkuren Bidang Kesehatan	53
Tabel 2.25.	Panjang Jalan Menurut Kecamatan Dan Pemerintahan Yang Berwenang Mengelolanya Di Kabupaten Kubu Raya (Km) Tahun 2016	54
Tabel 2.26.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2016	55
Tabel 2.27.	Banyaknya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2016	55
Tabel 2.28.	Urusan Konkuren Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	56
Tabel 2.29.	Banyaknya Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Partai Politik Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016	57
Tabel 2.30.	Jumlah Pelanggaran Perda Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016	58
Tabel 2.31.	Banyaknya Bencana Daerah Yang Terjadi Di Kabupaten Kubu Raya Dirinci Menurut Kecamatan 2014-2017	59
Tabel 2.32.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Sosial	59
Tabel 2.33.	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2015	60
Tabel 2.34.	Jumlah PUK, AK, TPAK, PYB, PT Dan TPT Menurut Golongan Umur Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 (Orang)	61
Tabel 2.35.	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 (Orang)	62
Tabel 2.36.	Jumlah Peserta KB Baru Dan KB Aktif Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016	63

Tabel 2.37.	Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	64
Tabel 2.38.	Aspek Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya	65
Tabel 2.39.	Pelayanan Umum Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil	66
Tabel 2.40.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat	66
Tabel 2.41.	Aspek Perhubungan	67
Tabel 2.42.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Penanaman Modal	68
Tabel 2.43.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Statistik	69
Tabel 2.44.	Aspek Kebudayaan	69
Tabel 2.45.	Inventarisasi Data Kegiatan Industri Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Dan 2016	70
Tabel 2.46.	Cagar Budaya Yang Sudah Dilestarikan Di Kabupaten Kubu Raya	70
Tabel 2.47.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perpustakaan ..	71
Tabel 2.48.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan	71
Tabel 2.49.	Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pariwisata	72
Tabel 2.50.	Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	73
Tabel 2.51.	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan	73
Tabel 2.52.	Persentase Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Berdasarkan Pengeluaran Yang Dilakukan Masyarakat Tahun 2016	74
Tabel 2.53.	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Pangan Dan Non Pangan Kabupaten Kubu Raya 2013-2016	74
Tabel 2.54.	Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Air Bersih	75
Tabel 2.55.	Aspek Daya Saing Bidang Fasilitas Listrik	75
Tabel 2.56.	Aspek Daya Saing Bidang Ketersediaan Penginapan	76
Tabel 2.57.	Aspek Daya Saing Bidang Ketenagakerjaan	76
Tabel 2.58.	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2015 (Orang)	77
Tabel 2.59.	Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	

	Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2016 (Orang)	78
Tabel 2.60.	Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2016 (Orang)	79
Tabel 3.1.	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	82
Tabel 3.2.	Realisasi Belanja Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014- 2016	84
Tabel 3.3.	Perbandingan Proporsi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014- 2016	85
Tabel 3.4.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	86
Tabel 3.5.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	87
Tabel 3.6.	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	88
Tabel 3.7.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	91
Tabel 3.8.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	93
Tabel 3.9.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kubu Raya 2014-2016	94
Tabel 3.10.	Realisasi SILPA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014- 2016	95
Tabel 3.11.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2019	95
Tabel 3.12.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2019	99
Tabel 3.13.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	100
Tabel 4.1.	Analisis SWOT Kabupaten Kubu Raya	106
Tabel 5.1.	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014- 2019	113
Tabel 6.1.	Strategi Antara Kekuatan Dan Peluang	119
Tabel 6.2.	Strategi Antara Kelemahan Dan Peluang	120

17
18
19

Tabel 6.3.	Strategi Antara Kekuatan Dan Ancaman	121
Tabel 6.4.	Strategi Antara Kelemahan Dan Ancaman	122
Tabel 6.5.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kabupaten Kubu Raya	125
Tabel 6.6.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Kubu Raya	129
Tabel 6.7.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019	133
Tabel 6.8.	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	134
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019	151
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kubu Raya	152
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kubu Raya	171
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	172

172

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahap Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD 2009-2029	3
Gambar 1.2.	Hubungan Antara RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	10
Gambar 1.3.	Hubungan Antara RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Sekitar	12
Gambar 3.1.	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	83



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2016	33
Grafik 2.2.	Perbandingan BPDT TPN2K Pada 2011 Dan 2015 Desil 1 : (Rumah Tangga/Individu Dengan Kondisi Kesejahteraan Sampai Dengan 10% Terendah Di Indonesia)	43
Grafik 2.3.	Perbandingan BPDT TPN2K Pada 2011 Dan 2015 Desil 14 : (Rumah Tangga/Individu Dengan Kondisi Kesejahteraan Di Atas 30% - 40% Terendah Di Indonesia)	43

Handwritten signature or mark in blue ink.

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Perbandingan Struktur Perekonomian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2016	33
---	----

Handwritten signature or mark in blue ink.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu : (1) meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam pembangunan, serta (2) meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan upaya untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kubu Raya menjadi masyarakat yang adil dan makmur, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Dalam RPJPD tersebut ditetapkan Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 yaitu "**Kabupaten**

Kubu Raya yang Mandiri dan Sejahtera” dengan penjelasan sebagai berikut :

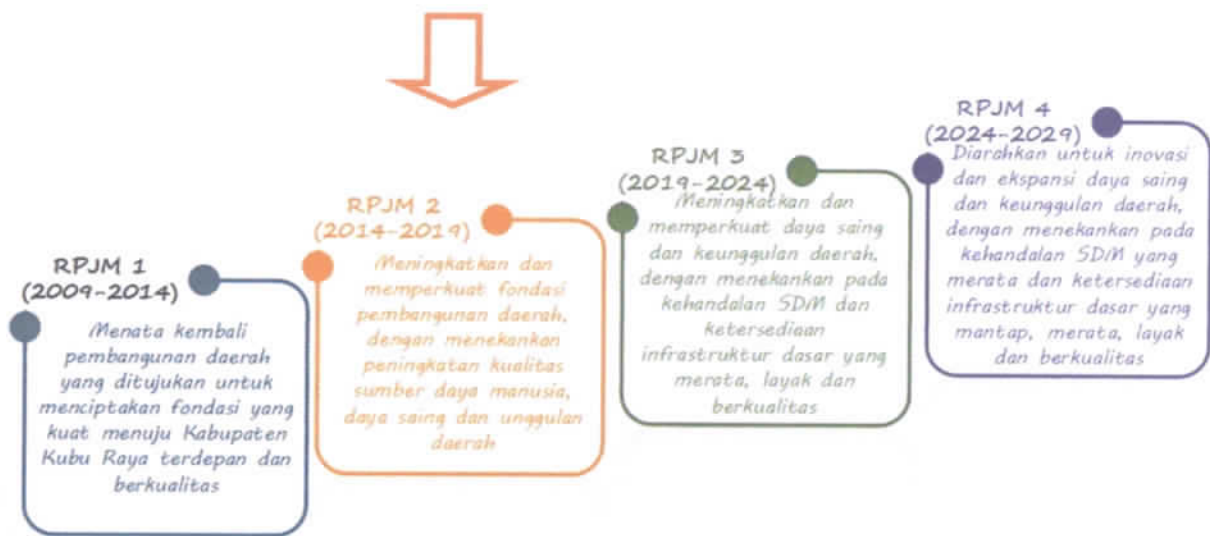
Mandiri : mengandung makna bahwa Kabupaten Kubu Raya menjadi kabupaten yang memiliki keunggulan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, maju dan terdepan di Kalimantan Barat dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera : mengandung makna bahwa telah terpenuhinya segala kebutuhan dasar, fisik, mental-spiritual, rasa aman, nyaman, tertib, cerdas, sehat dengan fungsi lingkungan hidup yang lestari dan sistem kehidupan masyarakat yang religius, toleransi, dan berbudaya yang tinggi.

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, religius, bertoleransi, berbudaya yang tinggi, mengembangkan modal sosial dan nilai kearifan lokal, serta meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan penelitian, mendorong inovasi, kreativitas dan kemandirian daerah di berbagai bidang, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja aparatur pemerintah, mengefektifkan reformasi birokrasi, menerapkan *Good Governance* dan *Clean Government*;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, agroindustri, teknologi, jasa, kemitraan, dan meningkatkan sarana, prasarana, dan infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan, maka RPJPD dijabarkan kedalam rencana pembangunan jangka menengah, dimana RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dibagi dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan prioritas arah kebijakan tiap tahapan sebagai berikut :



Gambar 1.1

Tahap Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD 2009-2029

Sesuai dengan tahapan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Kubu Raya saat ini, merupakan RPJMD fase kedua dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. RPJMD adalah penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 telah dilaksanakan dengan 5 (lima) pendekatan, sebagaimana pendekatan-pendekatan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten selama ini. Adapun kelima pendekatan tersebut adalah :

- 1) Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini,

- rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Kubu Raya, yang mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik;
- 2) Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 3) Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki (melalui Forum Konsultasi Publik, Musrenbang, dan lain-lain);
 - 4) Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian dan evaluasi yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut, melakukan evaluasi terhadap Dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 pada Tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa target capaian kinerja setelah memperhitungkan waktu yang tersisa dan kemampuan pendanaan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta perkembangan situasi dan perubahan kebijakan nasional yang mendasar. Disamping itu juga berdasarkan hasil review RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017, maka dilakukan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 264 Ayat (5) disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dilandasi dasar hukum antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Perubahan Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dinyatakan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sejalan dengan prinsip-prinsip diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah Provinsi

Kalimantan Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen terkait lainnya yang bersifat perencanaan sektoral.

1.3.1. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang adalah **“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”** yang akan menjadi sasaran dua puluh tahun sampai dengan tahun 2025. RPJPN dibagi kedalam empat tahapan RPJMN. Awalnya RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memperhatikan RPJMN tahap kedua, yaitu RPJMN Tahun 2010-2014, sedangkan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memperhatikan RPJMN tahap ketiga, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019.

Prioritas utama RPJMN Tahun 2015-2019 adalah Memantapkan Pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyelaraskan rencana pembangunan daerah RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 akan dijabarkan dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029

Penyusunan RPJMD Perubahan ini selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih periode 2014-2019, harus berpedoman juga pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan RPJMD tahap kedua

dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029. Adapun prioritas RPJMD Tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar untuk menunjang aksesibilitas dan investasi daerah;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rangka pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan daerah dan pengembangan daya saing/keunggulan daerah dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
4. Peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi di dalam RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, maka disusunlah RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, diharapkan terwujud sinergisitas antara kondisi saat ini dengan sasaran prioritas pembangunan yang ingin dicapai.

1.3.3. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan visi **“Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu :

1. Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
4. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik;
5. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar;
6. Meningkatnya Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; dan
7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya.

Penetapan prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya dalam RPJMD Perubahan ini harus memperhatikan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat dengan pertimbangan adanya persamaan kepentingan atau tujuan strategis yang harus disinergiskan, adanya persamaan permasalahan pembangunan yang

memerlukan upaya pemecahan bersama, dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan. Keterkaitan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 akan dijabarkan dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

1.3.4. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan Renstra SKPD

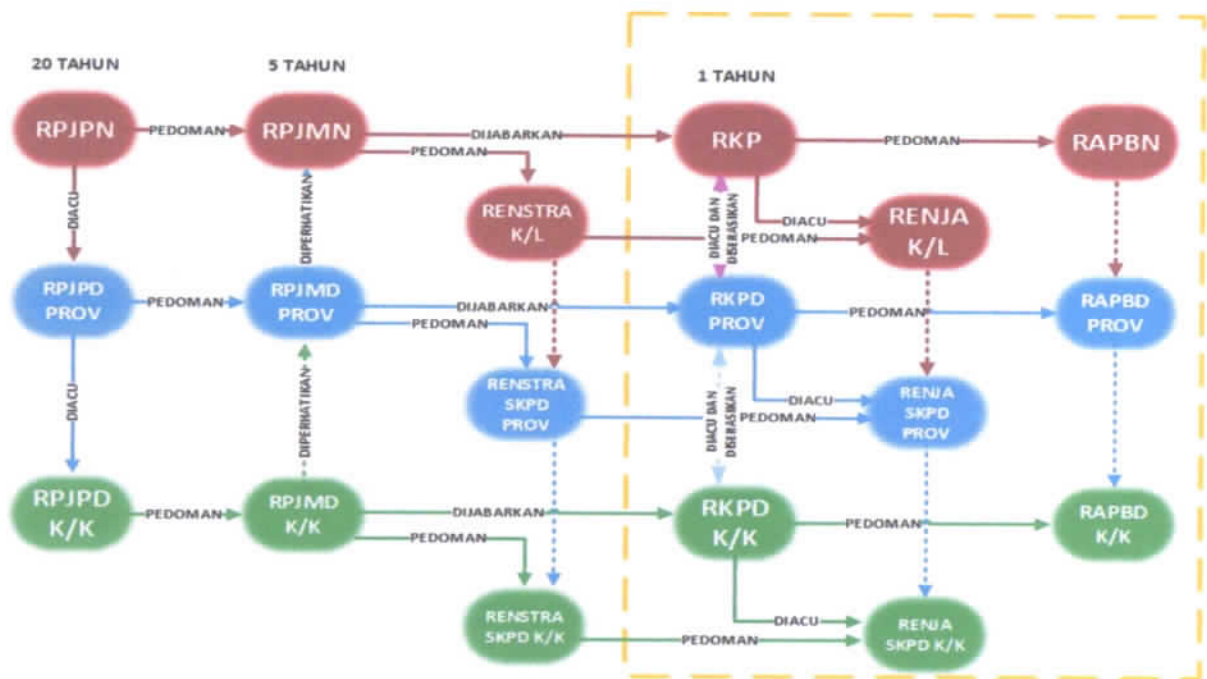
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati di bawah koordinasi dan verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menjaga kesinambungan, konsistensi perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik dan memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dijabarkan dan diakomodir dalam Renstra SKPD. Dengan ditetapkannya RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dan dengan dibentuknya SKPD baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016, maka setiap SKPD harus menyesuaikan Renstranya dengan melakukan penyusunan Renstra SKPD Perubahan Tahun 2014-2019.

1.3.5. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Perubahan Tahun 2014-2019 setiap tahun akan dijabarkan ke dalam RKPD khususnya RKPD Tahun 2018 dan 2019 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam Rangka memberikan arah dalam pentahapan pencapaian visi jangka menengah daerah akan ditentukan arah kebijakan tahunan yang akan menjadi tema RKPD sesuai dengan perodesasi tahunan dalam RPJMD Perubahan ini. Penentuan tema RKPD tahunan akan dijabarkan dalam Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut :



Gambar 1.2
Hubungan Antara RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Dengan
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.3.6. Hubungan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 mengintegrasikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pengembangannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya meliputi :

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

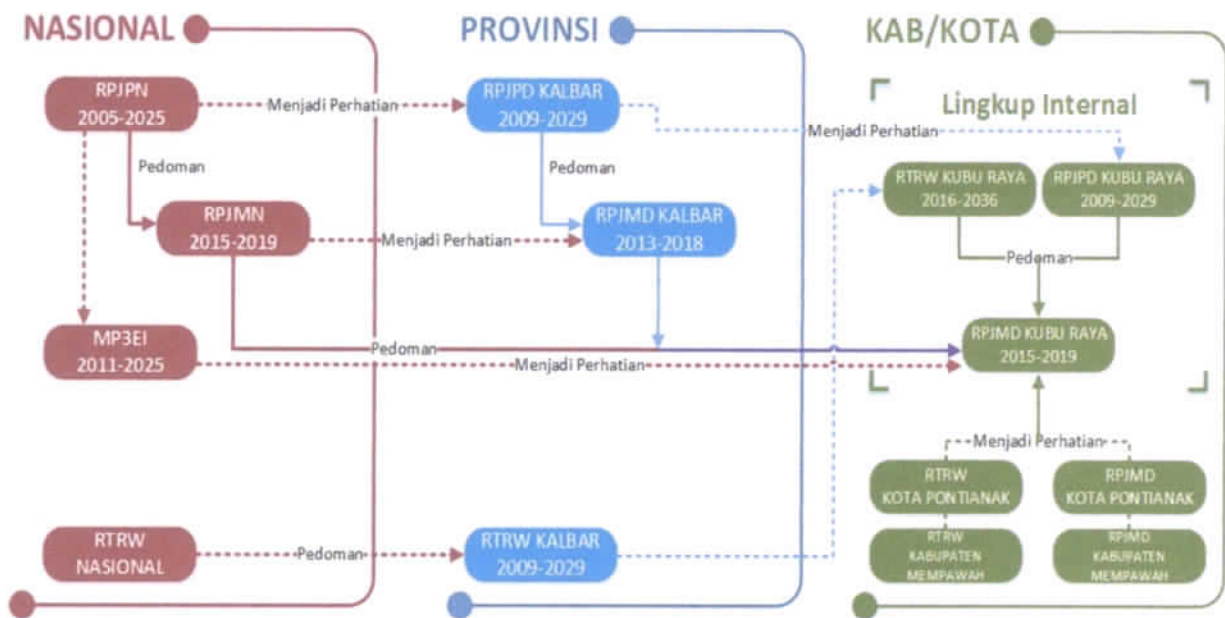
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 akan menjadi acuan penyusunan program-program prioritas dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana wilayah akan mengacu pada rencana struktur ruang yang meliputi :

1. Rencana Pusat-Pusat Kegiatan;
2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
3. Rencana Sistem Prasarana Lainnya.

Sedangkan program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan akan memperhatikan rencana pola ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Selain itu, dalam menyusun RPJMD Perubahan ini selain berpedoman pada RTRW Kabupaten Kubu Raya juga memperhatikan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota berbatasan, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Hal ini perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah serta keterpaduan struktur dan

pola ruang kabupaten/kota berbatasan, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kawasan Metropolitan Pontianak.



Gambar 1.3
Hubungan Antara RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Sekitar

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Perubahan Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan 2019 dan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 dan 2019 serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten

Kubu Raya secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga, yang pada gilirannya akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 antara lain meliputi :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan dapat disesuaikan dan dilaksanakan dalam sisa waktu menjelang akhir periode perencanaan Tahun 2014-2019;
2. Sebagai rujukan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBN, serta sumber dana lainnya, secara efektif, efisien dan fokus pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan;
3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antara Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
5. Menjamin terwujudnya konsistensi, sinergi dan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergisitas, koordinasi, sinkronisasi, dan inovasi oleh masing-masing pelaku pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha);
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional, baik melalui Pendekatan Politik,

- Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah, dan Bawah-Atas serta pendekatan secara Holistik, Integratif, Tematik, dan berbasis Spasial;
9. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
 10. Menyesuaikan dengan Perubahan dan Perbaikan Regulasi dan Aturan yang Terkait dengan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, dan Penganggaran.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Perubahan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah, yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, serta fokus pada pencapaian visi dan misi daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran hasil pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan daerah masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan, serta program pembangunan daerah disertai pagu indikatif.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demographi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kubu Raya merupakan Kabupaten yang memiliki wilayah daratan dan perairan/kepulauan yang tersebar menjadi beberapa wilayah kecamatan pesisir. Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah defenitif ± 6.985,24 km² atau 698.524 Ha yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan jumlah 120 desa.

Posisi geografis Kabupaten Kubu Raya terletak disisi Barat Daya Provinsi Kalimantan Barat atau berada pada koordinat 00 13' 27" Lintang Utara sampai dengan 10 00' 15" Lintang Selatan dan 1090 02' 47" sampai dengan 1090 58' 17" Bujur Timur. Batas-batas administratif Kabupaten Kubu Raya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Karimata

Secara administratif Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 120 desa (dua desa pemekaran lainnya sudah mendapatkan persetujuan DPRD, dan sedang menunggu Registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B dan desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap). Deskripsi mengenai wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DESA MENURUT KECAMATAN
KABUPATEN KUBU RAYA

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Batu Ampar	Padang Tikar	15	2.002,70	28,67
2	Terentang	Terentang	10	786,40	11,26
3	Kubu	Kubu	20	1.211,60	17,35
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	14	291,90	4,18
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	13	453,17	6,49
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	6	111,07	1,59
7	Sungai Raya	Arang Limbung	20	929,30	13,30
8	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	15	726,10	10,39
9	Kuala Mandor B	Kuala Mandor	5	473,00	6,77
Kabupaten Kubu Raya			120*	6.985,24	100

Sumber : Disospemdes Kubu Raya dan BPS Kubu Raya Tahun 2017

* 2 (dua) desa masih dalam proses registrasi Kemendagri (Desa Padi Jaya dan Desa Parit Keladi)

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Dari perspektif geostrategis Kabupaten Kubu Raya memiliki posisi yang sangat strategis. Dalam rencana tata ruang *Pontianak Metropolitan Area*, beberapa cluster rencana yang akan dikembangkan bersingungan secara langsung dengan wilayah administratif kecamatan yang merupakan wilayah hinterland Kota Pontianak. Rencana pengembangan Ring Road Tol Laut, serta rencana pergudangan di wilayah pesisir desa Sungai Rengas, akan menjadikan daerah-daerah tersebut menjadi daerah tujuan investasi baru. Selain itu, rencana pengembangan koridor jalan Ahmad Yani 3 yang menghubungkan wilayah Kakap-Punggur-Rasau Jaya, merupakan kawasan-kawasan yang diperkirakan akan menjadi *Central District Bussines* (CDB) baru, yang akan menjadi pemicu pengembangan wilayah bagian dalam Kecamatan Sungai Raya dan sekitarnya. Sementara itu, di wilayah Timur Kabupaten Kubu Raya, aktivitas transportasi di jalan Trans Kalimantan, secara bertahap mampu mendorong berkembangnya wilayah tersebut, sebagai salah satu pusat pemukiman dan kegiatan perdagangan serta jasa termasuk pergudangan.

Sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah daratan dan pesisir/kepulauan, aktivitas pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum masih terpusat di wilayah Kecamatan. Wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, relatif jauh dari pusat pembangunan sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan pembangunan di wilayah terluar tersebut.

Karakteristik wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

- Pantai pesisir Kabupaten Kubu Raya, di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna, meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kakap (12 Desa), Kecamatan Kubu (19 Desa), Kecamatan Teluk Pakedai (14 Desa) dan Kecamatan Batu Ampar (14 Desa) dengan panjang pantai 194 Km;
- Parairan wilayah, sampai 4 (empat) mil atau 7.408 Km dari garis surut terendah dikali dengan panjang pantai 194 Km = 1.437.152 Km² (7.408 Km × 194 Km = 1.437.152 Km²);
- Perairan Selat dalam wilayah Kabupaten (Selat Padang Tikar, sebagian Selat Maya dan Perairan sekitar Tanjung Bunga) dengan kondisi perairan Estaurina, (pertemuan air asin dari Laut Natuna dengan air Tawar dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak) dengan luas perairan Estaurina tersebut = 42.260 Ha.
- Hutan Mangrove yang berada di sepanjang selat dan pesisir terdiri dari luas hutan mangrove pada kawasan hutan = 143.460 Ha, dan luas mangrove di luar Kawasan Hutan = 328.905 Ha.
- Luas Hutan Lindung Bakau (HLB) di wilayah Kabupaten Kubu Raya seluas 63.362,20 Ha tersebar di 4 (empat) kecamatan.
- Pesisir, berlokasi di sebelah Utara Kecamatan Batu Ampar, sebelah utara sampai barat Kecamatan Kubu dan pada pantai Barat Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap.

Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 28 Juni 2008 oleh Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri RI, berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah Pulau-pulau Kecil.

Tabel 2.2.
NAMA DAN POSISI PULAU TIAP KECAMATAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Kecamatan, Nama Pulau	Koordinat	
		Lintang	Bujur
A	KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG		
1	Hanyut	00.01.24	109.24.21
B	KECAMATAN BATU AMPAR		
2	Gelanggan	00.44.45	109.33.36
3	Padang Tikar	00.48.37	109.20.35
4	Selatseh	00.53.42	109.21.43
5	Tenggara Mandi	00.53.08	109.24.25
6	Perling	00.39.04	109.27.41
7	Teluk Air I	00.43.47	109.33.51
8	Teluk Air II	00.45.32	109.36.06
9	Teluk Air III	00.43.39	109.35.19
10	Sejenuh Air Tawar	00.41.34	109.36.48
11	Pulau Buntung	00.41.04	109.37.59
12	Munggu' Linang	00.44.03	109.39.02
C	KECAMATAN SUNGAI KAKAP		
13	Kurnia	00.11.12	109.07.04
14	Nyamok	00.05.37	109.10.23
15	Keladi	00.11.18	109.06.27
16	Sepok Laut	00.13.37	09.07.22
17	Sepok Perupuk	00.08.22	109.06.31
18	Tanjung Saleh	00.07.10	109.09.21
19	Tempurung	00.06.39	109.07.20
20	Taiminyak	00.05.37	109.10.23
21	Beting Tengah	00.11.35	109.04.11
D	KECAMATAN KUBU		
22	Burung Besar	00.36.45	109.18.33
23	Burung Kecil	00.36.37	109.18.42
24	Dabong	00.35.57	109.16.06
25	Tiga	00.36.34	109.17.39
26	Muara Kubu	00.34.36	109.19.46
27	Bidara	00.36.37	109.22.58
28	Pakawal	00.40.02	109.30.21
29	Berembang	00.41.25	109.29.27

r
d
k

No	Kecamatan, Nama Pulau	Koordinat	
		Lintang	Bujur
E	KECAMATAN TELUK PAKEDAI		
30	Pelombak	00.21.23	109.11.30
F	KECAMATAN SUNGAI RAYA		
31	Tanjung Sapi	00.22.08	109.37.05
32	Limbung	00.13.52	109.48.58
33	Buntut Limbung	00.16.06	109.45.59
34	Keranji	00.12.35	109.47.42
35	Teluk Bayur	00.15.05	109..54.46
36	Jambu	00..13.57	109.56.49
37	Separoh	00. 11.23	109.55.23
38	Benuang	00.12.34	109.53.35
39	Sekancil	00.09.33	109.54.19

Sumber : Berita Acara Verifikasi Penamaan Pulau di Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jendra Pemerintahan Umum DEPDAGRI RI Tahun 2008

Pada tahun 2016, Kementerian Desa dan Transmigrasi merilis perkembangan Indek Desa Membangun seluruh Indonesia melalui surat Nomor 30 tahun 2016. Berdasarkan data IDM tersebut, dari 116 desa yang di nilai, sebagian besar desa (72 %) di Kabupaten Kubu Raya masuk dalam katagori sangat tertinggal dan tertinggal. Kendatipun terdapat metode perhitungan penilaian kemandirian desa berdasarkan versi Bappenas, kondisi IDM menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk melakukan penguatan pemerintahan di desa, sehingga dapat memenuhi dan memperbaiki standar pelayanan publik di desa menuju desa berkembang – desa mandiri.

Handwritten blue mark resembling a stylized 'r' or 'd' with a vertical line extending downwards.

Tabel 2.3
STATUS KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN KUBU RAYA 2016

Kecamatan	Status				Jumlah
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	
Batu Ampar	2	11	2	0	15
Terentang	1	7	1	0	9
Kubu	7	11	2	0	20
Telok Pakedai	3	9	2	0	14
Sungai Kakap	0	6	5	2	13
Rasau Jaya	1	3	0	2	6
Sungai Raya	3	8	7	2	20
Sungai Ambawang	3	9	2	0	14
Kuala Mandor-B	2	3	0	0	5
Jumlah*	22	67	21	6	116

Sumber : Status Kemandirian Desa, Surat Keenterian Desa dan Transmigrasi Republik Indoneisa, No.30/2016. * = jumlah yang dinilai sementara 116 desa

2.1.1.3. Topografi

Topografi Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dataran rendah, sebagian besar datar, bergelombang dan sebagian kecil berbukit/bergunung dengan kemiringan 0% - > 60%. Rata-rata bentang alam Kabupaten Kubu Raya berelief datar dan rawa-rawa dengan ketinggian < 10 m dan kemiringan < 2%. Pada beberapa wilayah, masih dapat dijumpai daerah dengan relief >10 m dan dengan kemiringan berkisar antara 2 - > 60.

2.1.1.4. Geologi

Peta geologis, Kabupaten Kubu Raya sebagian besar terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak dengan formasi aluvium dan endapan rawa (Qa) yang merupakan formasi paling muda. Formasi ini terdiri dari kerikil, pasir, lanau, lumpur dan gambut. Endapan ini menutupi dataran aluvial dan pasang surut di bagian barat, lembah sungai kapuas dan lembah-lembah sungai besar lainnya yang mengalir ke terain perbukitan yang terpotong-potong dan kedalam dataran aluvial.

Bagian barat dan selatan terdiri dari endapan-endapan laut dan sungai baru berumur paling muda dan menempati seluruh zona pertanian bagian barat Kabupaten Kubu Raya. Zona pantai terdiri dari cekungan liat yang tertutup oleh rawa-rawa gambut dan dilintasi danau-danau dangkal dan rawa yang terkena banjir secara periodik yang berada diantara teras-teras tertutup gambut.

Jenis tanah yang ditemui di wilayah Kabupaten Kubu Raya yaitu jenis tanah aluvial, gleisol, organosol dan regosol.

1. *Aluvial*, jenis tanah Aluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, berumur masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai (hasil dari lumpur yang mengendap), dataran aluvial pantai, dan daerah cekungan (depresi).
2. *Gleisol*, tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.
3. *Organosol Gley Humus* atau *Tanah Gambut* atau *Tanah Organik*, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rerumput rawa, dengan ciri dan sifat: ketebalan lebih dari 0.5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga agak lekat, kandungan organik lebih dari 30% untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4.0), kandungan unsur hara rendah.
4. *Regosol*, tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Kubu Raya terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional karena melintasi beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi. Adapun sungai di Kabupaten Kubu Raya, meliputi :

1. Sungai besar terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Punggur Besar, dan Sungai Landak; dan
2. Sungai kecil terdapat di Sungai Ambawang, Sungai Mandor, Sungai Sepatah, Sungai Jeruju Besar, Sungai Punggur Kecil, Sungai Rasau, Sungai Bulan, Sungai Sepauk Laut, Sungai Seruat, Sungai Terentang, Sungai Kelabau, Sungai Keluang, Sungai Mendawak, Sungai Kubu, Sungai Radak, Sungai Bara Besar, Sungai Bengkalan, Sungai Sepada, Sungai Sopar, Sungai Krawang, Sungai Durian Sebatang, Sungai Besar, Sungai Mesjid, Sungai Sekapau, Sungai Sekh, Sungai Baharu, Sungai Raja Setelu, Sungai Bumbun, Sungai Ayam, Sungai Padu Empat dan Sungai Nibung.

Sedangkan Daerah rawa terdiri dari :

1. Daerah Rawa (DR) Nasional, terdiri atas 27 DR, yaitu; DR. Kapuas Kecil I, DR. Kapuas Kecil II, DR. Kapuas Kecil III, DR. Jawi - Kalimas - Betutu, DR. Punggur- Selat Kering, DR. Rasau Jaya I, II, III ,IV (Bintang Mas), DR. Sungai Bulan, DR. Sungai Asam - Bengkarek, DR.Tebang Kacang, DR. Pinang Komplek, DR. Jangkang I + II, DR. Air Putih, DR. Kubu Komplek (Kelang, Tl.Nangka, Sungai Terus), DR. Sungai Terus, DR. Olak Olak Kubu, DR. Dabung - Dabung SP II, DR. Sungai Selamat - Seruat, DR. Kerawang Komplek, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Mendawak Linda, DR. Sungai Nipah, DR. Teluk Pakedai, DR. Radak I + II, DR. Terentang, DR. Terentang Hulu;
2. Daerah Rawa Provinsi, terdiri atas 3 DR, yaitu: DR Ambangah, DR. Kuala Karang, dan DR Sungai Selamat;
3. Daerah Rawa Kabupaten, terdiri dari 68 DR, yaitu; DR. Sepuk Keladi, DR. Sepuk Perupok, DR. Sepuk Laut, DR. Tanjung Saleh, DR. Pulau Nyamuk, DR. Tanjung Wangi, DR. Pematang Tujuh, DR. Sangkar Dunia, DR. Teluk Bakung, DR. Kuala Dua, DR. Kapur, DR. Mekar Baru, DR. Dusun Obyek Sungai Durian, DR. Teluk Kapuas, DR. Pulau Limbung, DR. Gunung Tamang, DR. Pelita Jaya, DR. Bemban, DR. Ambawang, DR. Kampung Baru, DR. Mengkalang, DR. Teluk Nibung, DR. Nipah Panjang, DR. Suka Maju, DR. Padang Tikar I, DR. Padang Tikar II, DR. Padang Tikar, DR. Sungai Jawi, DR. Ambarawa, DR. Tasik Malaya, DR. Tanjung Harapan, DR. Sungai Deras, DR. Arus Deras, DR. Selat Remis, DR. Teluk Gelam, DR. Tanjung Bunga, DR. Sungai Nibung, DR. Karya Jaya, DR. Betuah, DR. Teluk Empening, DR. Teluk Bayur, DR. Permata, DR. Terentang Hilir, DR. Sungai Ambawang Kuala, DR. Durian, DR. Jawa Tengah, DR. Simpang Kanan, DR. Puguk, DR. Pasak Piang, DR. Pasak, DR. Loncek, DR. Tamang, DR. Korek, DR. Lingga, DR. Pancaroba Sungai, DR. Pancaroba, DR. Lais, DR. Tapah, DR. Teluk Lerang, DR. Biong, DR. Lintang Batang, DR. Jalo, DR. Benuah, DR. Kuala Mandor A, DR. Kuala Mandor B, DR. Sungai Enau, DR. Kubu Padi, DR. Retok;
4. Daerah Irigasi Kabupaten, meliputi Daerah Irigasi Baharu Ambawang, Daerah Irigasi Bemban Timur, Daerah Irigasi Bemban Barat, Daerah Irigasi Ence Manan, Daerah Irigasi Nuri, Daerah Irigasi Padu Ampat dan Daerah Irigasi Samak di wilayah Kecamatan Kubu dengan keseluruhan seluas 944 Ha dan setelah perubahan menjadi 3.360 Ha.

Sebagai daerah tropis yang dilalui garis khatulistiwa, Kabupaten Kubu Raya memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi sehingga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 rata-rata curah hujan di Kabupaten Kubu Raya adalah 408,9 mm. Curah hujan terendah berdasarkan catatan BMG Supadio, tercatat pada bulan Agustus yaitu 40,1 mm dan tertinggi tercatat pada bulan Mei yaitu sebesar 705,0 mm. Sedangkan rata-rata banyak hari hujan pada tahun 2016 adalah 21 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan Mei yaitu 27 hari, sedangkan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 7 hari. Temperatur udara rata-rata di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016, yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Supadio adalah 27,2°C. Suhu terendah tercatat pada bulan Desember yang tercatat sebesar 26,6°C sedangkan temperatur udara tertinggi tercatat pada bulan April yaitu sebesar 27,8°C.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Perubahan terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya, relatif cukup besar. Analisa terhadap Peta RBI dengan menggunakan Citra Satelit, terdapat spot-spot baru yang diduga sebagai bentuk aktivitas permukaan lahan. Sebagian besar perubahan penggunaan lahan/alih fungsi lahan didorong oleh aktivitas pembangunan permukiman dan sebagai akibat kegiatan pertanian/perkebunan skala besar. Secara umum, penggunaan lahan di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 masih didominasi oleh kawasan hutan (hutan negara dan hutan rakyat), sebesar 59,02% dari luas wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang tersebar di semua kecamatan, kemudian diikuti dengan sawah (meliputi sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut) sebesar 9,88%, dan perkebunan sebesar 9,68%.

Tabel 2.4
PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015

NO	Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tegalan/ Ladang	31.651,75	4,53
2	Semak	42.308,06	6,06
3	Perkebunan Rakyat	55.278,85	7,91
4	Perkebunan Besar	175.496,83	25,12
5	Kebun Campuran	9.955,67	1,43
6	Hutan Sejenis	53.737,70	7,69
7	Hutan Lebat	150.508,14	21,55
8	Hutan Belukar	173.993,00	24,91
9	Sawah	5.594,00	0,80
Jumlah		698.524,00	100,00

Sumber : BPS, Kubu Raya, 2016

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam RTRW Nasional, Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional untuk mendukung pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Kota Pontianak dan daerah hinterland Mempawah-Singkawang-Sambas serta koridor daerah pedalam Sanggau-Kapuas Hulu.

Tabel 2.5
SISTEM PUSAT-PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	PKN	No	PKL	No	PPK	No	PPL
1.	Kawasan Metropolitan Pontianak (I/C/1)	1.	Sungai Kakap (I-III/B/D/2)	1.	Padang Tikar Dua (Kec. Batu Ampar)	1.	Sungai Kerawang (Kec. Batu Ampar)
		2.	Rasau Jaya (I-III/B/D/2)	2.	Terentang Hilir (Kec. Terentang)	2.	Sungai Asam (Kec. Sungai Raya)
		3.	Kubu (I-III/B/D/2)	3.	Selat Remis (Kec. Teluk Pakedai)	3.	Sungai Rengas (Kec. Sungai Kakap)
		4.	Batu Ampar (I-III/B/D/2)	4.	Kuala Mandor B (Kec. Kuala Mandor B)	4.	Korek (Kec. Sungai Ambawang).

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kubu Raya, Nomor 7 Tahun 2016

Keterangan :

I – IV : Tahapan pengembangan

A : Percepatan pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan

A/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

- A/2 Pengembangan baru
- A/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- B : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis Otonomi Daerah
- C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
 - C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - C/2 Pengembangan baru
 - C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
 - D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam
 - D/2 Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis mitigasi bencana
- E : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
 - E/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - E/2 Pengembangan baru
 - E/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

Ditingkat lokal, kewilayahan Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dengan fungsi utama mencakup :

- a. PKN (Pusat Kegiatan Nasional), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi, yaitu kawasan metropolitan Pontianak yang mencakup bagian wilayah Kabupaten Kubu Raya (Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Sungai kakap);
- b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi unuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar;
- c. PPK (Pusat Kegiatan Kawasan), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi Desa Padang Tikar Dua (Kecamatan Batu Ampar), Desa Terentang Hilir (Kecamatan Terentang), Desa Selat Remis (Kecamatan Teluk Pakedai) dan Desa Kuala Mandor B (Kecamatan Kuala Mandor B); dan
- d. PPL (Pusat Kegiatan Lingkungan), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa, yang meliputi Desa

~
a
k

Sungai Kerawang (Kecamatan Batu Ampar), Desa Sungai Asam (Kecamatan Sungai Raya), Desa Sungai Rengas (Kecamatan Sungai Kakap) dan Desa Korek (Kecamatan Sungai Ambawang).

Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kawasan strategis Kabupaten Kubu Raya mencakup kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis wilayah kabupaten Kubu Raya dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :

- a. Kawasan pusat perdagangan dan jasa terpadu (*Central Business District, CBD*) di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang;
- b. Kawasan pengembangan pelabuhan terdapat di Kecamatan Batu Ampar dan Sungai Kakap;
- c. KTM Rasau Jaya meliputi Kecamatan Rasau Jaya, Kubu, Sungai Raya dan Teluk Pakedai;
- d. Kawasan wisata strategis di Kecamatan Sungai Kakap;
- e. Kawasan minapolitan dengan sektor unggulan perikanan, terdiri dari :
 - 1) Minapolitan Batu Ampar meliputi Desa Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, Nipah Panjang, Batu Ampar, dan Sungai Jawi;
 - 2) Minapolitan Kubu meliputi Desa Air Putih, Kubu dan Dabong;
 - 3) Minapolitan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Sungai Kakap, Sungai Kupah, Tanjung Saleh dan Sepok Laut; dan
 - 4) Minapolitan Teluk Pakedai meliputi Desa Sungai Nibung, Teluk Gelam, Kuala Karang, dan Tanjung Bunga.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan perlindungan bakau (*mangrove*) di Kecamatan Batu Ampar, Kubu dan Teluk Pakedai.

Selain kawasan strategis dari sudut kepentingan Penataan Ruang, Kabupaten Kubu Raya memiliki kawasan Perdesaan yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi komoditi yang diunggulkan. Kawasan perdesaan berfungsi mendukung percepatan pembangunan desa dan saat ini Kabupaten Kubu Raya memiliki 9 Kawasan Perdesaan dengan luas 231.428,39 Ha berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2017. Kawasan Perdesaan yang sudah masuk dalam Prioritas Pembangunan

Nasional (KPPN) adalah Kawasan Perdesaan Rasau Raya. Sedangkan kawasan perdesaan lainnya masih dalam tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana lainnya. Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, mencakup :

a. Kawasan rawan abrasi

- 1) Kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu, Batu Ampar dan Sungai Kakap; dan
- 2) Kawasan rawan abrasi tebing sungai terdapat di Kecamatan Kubu, Sungai Kakap, Sungai Raya dan Rasau Jaya.

b. Kawasan rawan gelombang pasang

Kawasan rawan gelombang pasang, terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di wilayah kabupaten.

c. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Kakap, Sungai Raya, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang.

d. Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang

Kawasan rawan angin puting beliung atau angin kencang terdapat di Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, Sungai Raya, Rasau Jaya, Teluk Pakedai dan Terentang

e. Kawasan rawan kebakaran

Kawasan rawan kebakaran, terdiri atas :

- 1) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terdapat di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang; dan
- 2) Kawasan rawan kebakaran perumahan dan permukiman terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Rasau Jaya, Sungai Kakap dan Sungai Ambawang.

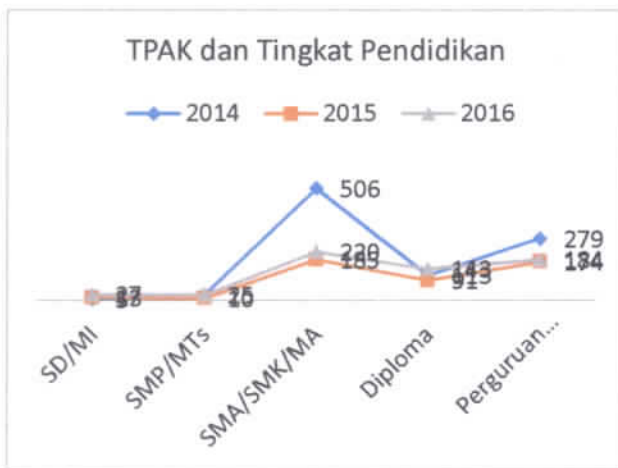
2.1.4. Demografi

2.1.4.1. Perkembangan Kependudukan

Kabupaten Kubu Raya memiliki distribusi penduduk yang terpencar-pencar. Jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sesuai data

BPS 2016 (proyeksi penduduk) tercatat sebanyak 554.811 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 281.175 jiwa dan 273.636 jiwa penduduk perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan (rasio jenis kelamin) sebesar 103, sedangkan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 79 jiwa/kilometer persegi dengan laju pertumbuhan sebesar 1,7%.

Penduduk Usia Kerja (PUK) Kabupaten Kubu Raya sebagian besar merupakan penduduk usia produktif. Jumlah PUK Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 (angka proyeksi) sebanyak 389.735 jiwa meningkat sebanyak 15.405 jiwa dibandingkan tahun 2015 yang sebanyak 374.330 jiwa. Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), perkembangan TPAK Kabupaten Kubu Raya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, terus mengalami peningkatan.



Prosentase TPAK tahun 2013 sebesar 63,97% dan berturut-turut tahun 2014 dan tahun 2015 masing-masing 65,01% dan 67,67%. Peningkatan TPAK berarti semakin banyak penduduk di Kabupaten Kubu Raya yang terlibat dalam kegiatan usia produktif. Sementara prosentase angka pengangguran

terbuka di Kabupaten Kubu Raya kendatipun cenderung menurun akan tetapi cukup mengkhawatirkan. Prosentase pengangguran terbuka tahun 2015 relatif lebih baik dibandingkan dengan prosentase angka pengangguran terbuka di tahun 2014 dan tahun 2016. Prosentase angka pengangguran terbuka di tahun 2014 sebesar 6,08%, dan kembali turun di tahun 2015 (angka proyeksi) dengan prosentase angka pengangguran terbuka sebesar 6,11%.

Handwritten blue mark resembling a stylized 'r' or 't'.

Tabel 2.8
KONDISI KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016

No.	Komponen	Jumlah	%
1	Penduduk Seluruh	554.811	100%
2	Angkatan Kerja (15 Tahun ke atas)		
	a. Bekerja	228.528	
	b. Mencari Kerja	Lihat dari K.Kuning	
	c. Mempersiapkan Usaha		
	d. Tidak mungkin mendapatkan pekerjaan		
	e. Belum mulai bekerja	14.599	
	f. Bersekolah	41.513	
	g. Mengurus rumah tangga	69.288	
	h. Lainnya	20.401	
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja		
	a. Bekerja \geq 60 jam	27.272	12,21%
	b. Bekerja <35 jam >	154.923	63,65%
	c. Bekerja < 15 jam >	51.781	21,28%
	d. Pengangguran terbuka	15.848	

Sumber: Sakernas Kubu Raya, 2016,

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2005-2009 diuraikan sebagai berikut :

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kubu Raya pada 2016 ditunjukkan oleh peningkatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar



harga konstan 2010, yang mengalami kenaikan dari 6,37% di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,36%. Walaupun secara nominal, PDRB ADH konstan tahun 2016 meningkat sebesar 38,11 juta per kapita per tahun akan tetapi laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2016 mengalami perlambatan sebesar 4,57% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya sedikit melambat selama 3 (tiga) tahun terakhir, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.

Kategori industri pengolahan secara total tumbuh sebesar 5,12% pada tahun 2016. Kondisi ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,76% pada tahun 2015. Kondisi ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,76% pada tahun 2015. Setelah kategori industri pengolahan, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi terbesar kedua terhadap seluruh total perekonomian. Secara umum kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 3,69% pada tahun 2016. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 1,59% di tahun 2015.

Mereview komponen pembentuk laju pertumbuhan Kabupaten Kubu Raya selama 6 (enam) tahun terakhir, sebagai besar komponen pembentuk laju pertumbuhan merupakan sektor yang tidak terkait langsung dengan aktivitas yang memberikan multi player effect terhadap kegiatan ekonomi ikutannya. Kendatipun dari sisi pertumbuhan kategori *non-tradable* menunjukkan kinerja yang tinggi, akan tetapi hal tersebut justru berdampak tidak baik terhadap neraca pembayaran (surplus-defisit) sebagai akibat penurunan secara relatif terhadap kondisi riil perekonomian Kabupaten ini. Secara umum kondisi dimana katagori *non-tradable* cenderung lebih tinggi dibandingkan katagori *tradable*, hal tersebut dalam jangka panjang akan menyebabkan turunnya lapangan kerja serta tingginya angka pengangguran.

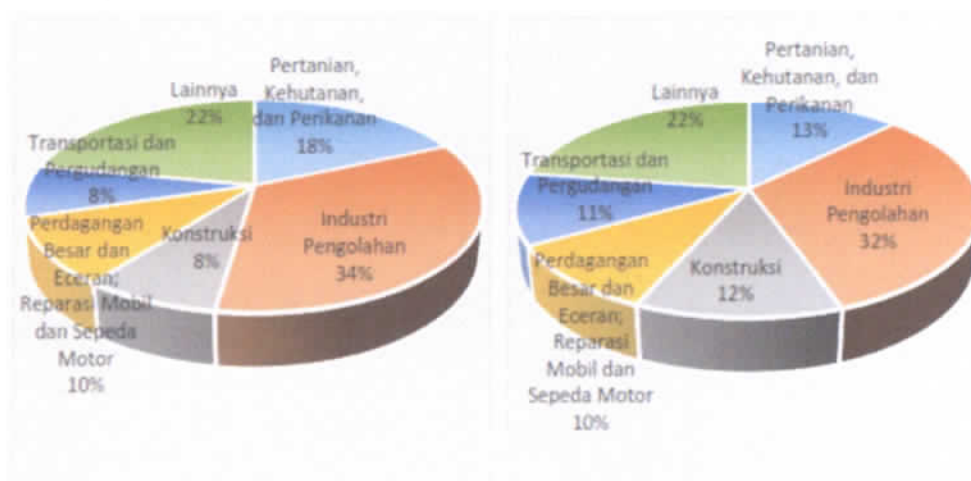
Grafik 2.1.
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011-2016



Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan, peranan sektor industri pengolahan masih menjadi sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2016 kategori ini tercatat menyumbang sebesar 31,82% bagi PDRB Kabupaten Kubu Raya, sedikit menurun dibandingkan tahun 2012 yang menyumbang sebesar 32,89%. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya peranan subkategori industri kayu dan sejenisnya serta penurunan subkategori industri karet. Stabilitas sektor ini sebagai sektor tumpuan di tunjang oleh masih eksisnya sub kategori industri makanan dan minuman serta industri pengolahan kelapa sawit.

Diagram 2.1
PERBANDINGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2010 - 2016



Sementara kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2016, kategori ini menyumbang sebesar 12,72% terhadap total PDRB. Namun kontribusi kategori ini perlahan terus menurun. Diduga penurunan sektor ini disebabkan menurunnya peranan seluruh subkategori pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kategori berikutnya yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Kubu Raya adalah kategori konstruksi. Pembangunan infrastruktur selama lima tahun terakhir mampu meningkatkan peranan kategori ini terhadap total perekonomian. Pada tahun 2016, kategori konstruksi mampu menyumbang sebesar 12,06% terhadap PDRB Kabupaten Kubu Raya. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang memberikan sumbangan sebesar 9,29%.

Tabel 2.9.
DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN KUBU RAYA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2012-2016 (PERSEN)

No	Kategori	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,01	16,34	14,66	13,30	12,72
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,18	3,07	2,96	3,28	3,27
3.	Industri Pengolahan	32,89	32,02	32,32	32,11	31,82
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,18	0,22	0,29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
6.	Konstruksi	9,29	10,32	11,19	11,92	12,06
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,58	10,36	10,44	10,16	10,12
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,64	9,21	9,69	10,24	10,75
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,76	1,73	1,71	1,71	1,66
10.	Informasi dan Komunikasi	3,31	3,10	3,06	3,19	3,20
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,47	1,52	1,44	1,41	1,41
12.	Real Estate	2,99	3,10	3,03	2,99	3,02
13.	Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,44	0,45	0,43
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,84	3,07	3,13	3,29	3,53
15.	Jasa Pendidikan	3,61	3,79	4,02	4,04	4,11
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,79	0,77	0,77	0,71
17.	Jasa Lainnya	1,00	0,95	0,94	0,90	0,87
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya masuk dalam konteks diversifikasi Arthur Lewis (teori migrasi) yang membagi perekonomian atas perekonomian perdesaan dan perkotaan. Dikotomi dalam prespektif perekonomian, transformasi ideal sektor perekonomian ditunjukkan dengan perubahan sektor pertanian ke industri sebagai mesin penggerak ekonomi suatu daerah (*pattern of develomment, hollis chenery*). Terkait dengan hal tersebut, pergerakan struktur ekonomi Kabupaten Kubu Raya, ditunjang dengan tingginya peran sektor industri yang didukung dengan sektor pertanian dan jasa penunjang lainnya. Namun demikian, secara perlahan terjadi kondisi lompatan, dimana sektor jasa (tersier) mengambil alih peran sektor sekunder, sebagai penunjang sektor pertanian (primer). Dari sisi ini, pergeseran terhadap sektor basis tersebut, diikuti dengan sektor lainnya yang selama ini merupakan sektor dimana cukup besar dalam menyerap tenaga kerja penduduk lokal.

Tabel 2.10
PDRB PER KAPITA KABUPATEN KUBU RAYA ADH BERLAKU DAN ADH KONSTAN TAHUN 2000 TAHUN 2013-2016

URAIAN		2013	2014	2015	2016
A	ADH BERLAKU				
	PDRB (Triliun)	14,70	16,66	18,90	21,14
	PDRB Per Kapita (Juta)	27,763	30,929	34,653	38,110
B	ADH KONSTAN 2000				
	PDRB (Triliun)	12,82	13,63	14,49	15,42

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2016

2.2.1.2. Laju Inflasi

Tingginya pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada melonjaknya tingkat inflasi di Kabupaten Kubu Raya. Perhitungan angka inflasi lebih *reliable* dilakukan dengan pendekatan PDRB atas dasar harga berlaku karena lebih menggambarkan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Kubu Raya rata-rata masih di bawah 1 (satu) digit. Hal itu berarti gejolak perubahan perekonomian global yang sempat mendera perekonomian ditataran Nasional tidak terlalu berpengaruh terhadap indeks kesejahteraan masyarakat secara umum.

Di tingkat produsen, rata-rata angka inflasi tahunan Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 tercatat sebesar 5,17% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 6,63%. Hal yang perlu diwaspadai terkait

dengan perkembangan inflasi di Kabupaten Kubu Raya adalah inflasi yang dihitung atas dasar Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi IHK, dihitung dengan mencermati pergerakan 7 harga barang terutama pada komponen makanan, terhadap kota terpilih yang dianggap sebagai supplier berbagai kebutuhan barang pokok di masyarakat (survey IHK dilakukan di Kota Pontianak dan Kota Singkawang).

Tabel 2.11.
PERTUMBUHAN PDRB DAN LAJU INFLASI DI KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertumbuhan PDRB	6,61%	6,49%	6,28%	6,36%	6,37%
2.	Laju Inflasi	3,61%	5,30%	6,70%	6,63%	5,17%

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2016

Pehitungan inflasi dengan metode IHK di tahun 2016 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Rata-rata tahunan angka inflasi IHK tahun 2015 tercatat sebesar 6,17% lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 9,38%. Di tahun 2016 angka inflasi IHK turun secara drastis ke angka 3,88%. Pada 7 kelompok bahan yang diamati, kelompok bahan kelompok makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau merupakan angka yang tertinggi inflasi IHK nya.

Tabel 2.12.
**INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA PONTIANAK
TAHUN 2012-2016 (PERSEN)**

No	Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bahan Makanan	10,03	5,96	8,34	9,98	5,31
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,61	7,11	10,87	8,42	6,12
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	6,86	12,64	9,08	8,35	3,37
4.	Sandang	4,39	1,89	5,6	3,75	4,95
5.	Kesehatan	8,16	10,23	9,39	8,09	3,24
6.	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	0,82	8,8	3,4	3,15	4,98
7.	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	8,31	16,96	12,92	-1,62	-0,18
8.	Umum	0,47	8,18	9,38	6,17	3,88

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2017

Dampak riil pergerakan inflasi yang dihitung berdasarkan IHK akan terasa memberikan dampak secara riil terhadap terhadap daya beli masyarakat Kabupaten Kubu Raya. Dengan kondisi geografis yang terpisahkan oleh wilayah perairan, tekanan perubahan IHK terhadap biaya distribusi ke wilayah-wilayah pedalaman, akan dibebankan kepada konsumen, sehingga *purchasing power* menjadi rendah.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator utama pendidikan mencakup angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, dan indikator utama kesehatan mencakup angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

2.2.2.1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan. APK SMP dan SMA mulai tahun 2008-2010 sudah di atas 100%.

Tabel 2.13.
KINERJA PENDIDIKAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Angka Melek Huruf (%)	97,30	97,68	97,74	97,75
2.	Rata Lama sekolah (Thn)	6,16	6,41	6,56	6,57
3.	Angka Harapan Sekolah	12,14	12,34	12,55	12,84
4.	Angka Partisipasi Kasar				
	- SD/MI/Paket A	115,71	112,94	113,82	113,83
	- SMP/MTs/Paket B	89,04	90,89	92,27	95,64
	- SMA/SMK/MA/Paket C	72,31	72,45	72,67	72,70
5.	Angka Partisipasi Murni				
	- SD/MI/Paket A	97,12	98,45	98,74	99,72
	- SMP/MTs/Paket B	73	75,71	81,37	89,08
	- SMA/SMK/MA/Paket C	53,96	65,54	65,94	66,27
6.	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) (%)				
	- SD/MI/Paket A	100	100	100	100
	- SMP/MTs/Paket B	98.67	99.14	99.77	99.97
	- SMA/SMK/MA/Paket C	99.63	99.74	99.78	99.98

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kubu Raya Tahun 2017

Permasalahan utama kinerja di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (release IMP, BPS, 2015) di Kabupaten Kubu Raya yang hanya sampai tamatan SD. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap angka kelulusan sekolah di Kabupaten Kubu Raya menempati posisi ke 12 terendah dari 14 Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Perkembangan APK di tingkat SD, walaupun rata-rata tinggi, akan tetapi terdapat kemungkinan peserta didik dengan usia yang belum layak untuk memasuki dunia pendidikan di tingkatan SD, serta adanya perpindahan SD dari daerah lain yang mendongkrak kinerja APK Kabupaten Kubu Raya. Demikian pula halnya dengan perkembangan APM jenjang pendidikan di jenjang SMU, masih belum dianggap memuaskan. Dengan rata-rata 60,18 maka masih ada penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan ini yang putus sekolah dan memilih untuk bekerja membantu ekonomi keluarga. Sedangkan angka melek huruf, dengan prosentase rata-rata mencapai 85% - 88%, sudah dianggap relatif cukup baik. Sisa penduduk yang tidak bisa baca-tulis, diperkirakan merupakan penduduk usia tua.

2.2.2.2. Kesehatan

Indeks kemakmuran selain dilihat dari aspek ekonomi juga dapat tergambarkan melalui Indek Pembangunan manusia (Human Development Indeks). Di Kabupaten Kubu Raya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2015) Kabupaten Kubu Raya yang mengalami peningkatan sebagai

dampak dari metode perhitungan baru yang digunakan oleh BPS. Di tahun 2014-2015 ranking IPM Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke-3 (tiga) dari 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kendatipun secara relatif terjadi perbaikan terhadap peringkat IPM, akan tetapi pemerintah daerah masih perlu membenahi beberapa komponen pembentuk IPM, terutama yang terkait dengan indikator di bidang pendidikan. Untuk rata-rata lama hidup, komponen IPM ini mencapai 69,74 tahun lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2013 dengan usia harapan hidup masing-masing sebesar 69,64 tahun dan 66,83 tahun. Peningkatan terhadap usia harapan hidup ditunjang dengan semakin membaiknya pelayanan kuratif dan terutama preventif yang diberikan SKPD Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 2.14.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013 - 2016

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016*
1.	Angka IPM	63,94	64,51	65,02	65,54
2.	Peringkat	4	3	3	3

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2015, * Angka Proyeksi

Tabel 2.15.
KINERJA KESEHATAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Angka Kematian Bayi per/1000 kelahiran Hidup (kasus)	35	48	25	49
2.	Umur Harapan Hidup	66,83	69,64	69,74	*
3.	Prevelensi Gizi Buruk	18	24	30	29
4.	Prosentase Stunting	-	21,2%	19,1%	24,6%**

Sumber : *Profile Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, 2016* , * Angka BPS untuk 2016 belum diterbitkan, ** Angka berdasarkan Riset Kesehatan daerah, Provinsi Kalimantan Barat

Penanganan kasus-kasus kematian bayi, gizi buruk termasuk stunting, pada dasarnya bersifat multisektor yang memerlukan intervensi dari SKPD lain. Angka kasus kematian Bayi di Kabupaten Kubu Raya terus menunjukkan trend yang meningkat, kendatipun masih di bawah rata-rata

angka nasional. Banyak penyebab terjadinya kasus kematian bayi. Faktor yang dianggap dominan adalah akibat perilaku kurangnya kesadaran ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan rutin (K1-K4) di unit-unit kesehatan yang disediakan, sehingga terlambat terdeteksi secara dini resiko pra dan pasca persalinan. Beberapa data yang dirujuk terkait dengan partisipasi aktif ibu hamil memeriksakan kandungannya (K4) ke unit layanan kesehatan Puskesmas, tidak ada yang mencapai 100%, bahkan ada yang hanya mencapai 58,10% (Puskesmas Rasau Jaya).

Dari 49 kasus kematian bayi yang terdeteksi di tahun 2016, faktor penyebab kematian disebabkan oleh Asfiksia 18 bayi (36,73%), Berat Bayi Lahir Rendah/BBLR sebanyak 10 kasus (20,41%), Tetanus Neonatorum sebanyak 7 kasus (14,29%) dan penyebab lainnya (icterus sepsis) sebanyak 14 kasus kematian (28,57%). Sementara itu, beberapa kasus disebabkan oleh penanganan persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga medik terlatih. Kondisi gizi buruk serta angka stunting memiliki keterkaitan dengan kemiskinan serta aspek lingkungan seperti sanitasi maupun kebiasaan hidup sehat. Tindakan promotif seperti “gerakan masyarakat” sangat relevan dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka gizi buruk dan stunting yang cenderung meningkat setiap tahun.

2.2.2.3. Kemiskinan

Dalam hal penanganan kemiskinan Kabupaten Kubu Raya berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut setiap tahun. Perhitungan penduduk miskin absolut yang dilakukan oleh BPS, dihitung atas dasar kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan pokok dasar (basic need) dengan pendekatan teori Maslow dan Sayogyo (menghitung kemiskinan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum bahan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari). Kebutuhan pokok dasar tersebut dikonversi dalam bentuk rupiah yang digunakan untuk memetakan garis kemiskinan absolut dan pada beberapa pihak digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Upah Minimum Regional (UMR).

Di tingkat Kalimantan Barat angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya terendah ke 2 (dua) setelah Kabupaten Sanggau, dengan jumlah penduduk miskin absolut tahun 2016 tercatat sebanyak 27.830 orang. Mencermati pergerakan jumlah penduduk miskin absolut maupun prosentase kemiskinan, terlihat bahwa terjadi trend penurunan terhadap

populasi penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2016, prosentase penduduk miskin Kabupaten Kubu Raya sebesar 5,04% yang merupakan prosentase terendah dibandingkan dengan tahun 2013 sampai tahun 2015.

Tabel 2.16.
KINERJA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
INDIKATOR KEMISKINAN

No.	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	32.100	29.470	28.380	27.830
2.	Prosentse Kemiskinan (%)	6,04	5,45	5,22	5,04

Sumber : BPS, Kubu raya Dalam Angka, 2016

Terkait dengan kemiskinan, walupun secara absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kubu Raya dapat ditekan, akan tetapi analisa kemiskinan yang utama adalah dengan membandingkan indeks kemiskina yang meliputi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya, terus membaik setiap tahun. Dalam rentang enam tahun (2012), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berhasil mengurangi kesenjangan penduduk miskin walupun masih di bawah kemampuan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.

Di tahun 2016 indeks P1 (kedalaman kemiskinan) Kabupaten Kubu Raya mencapai 0,75 dan indeks P2 (keparahan kemiskinan) mencapai 0,17. Sementara di rata-rata Provinsi indeks P1 sebesar 1,19 dan P2 sebesar 0,27. Dengan asumsi semakin tinggi nilai indeks, maka semakin berdampak baik kepada upaya mengurangi derajat kesejahteraan diantara penduduk miskin, maka dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya, tidak berkolerasi positif dengan mengecilnya disparitas penduduk.

Tabel 2.17.
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN
KEMISKINAN (P2) KABUPATEN KUBU RAYA DAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012-2016

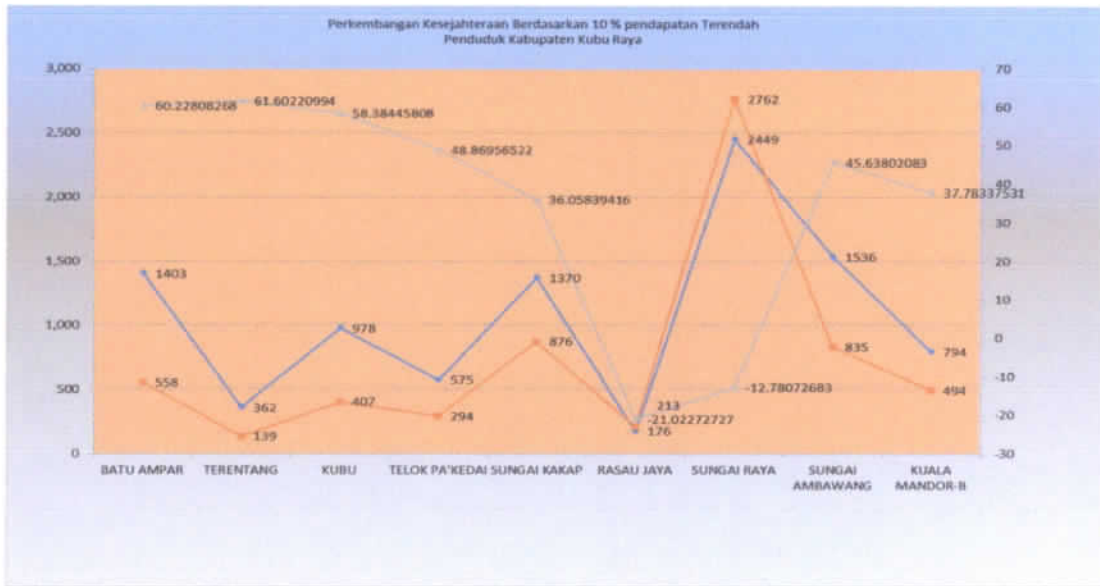
Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	
	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kalimantan Barat
2011	0,55	1,47	0,08	0,39
2012	0,58	1,24	0,12	0,33
2013	0,45	1,30	0,06	0,32
2014	0,52	1,26	0,10	0,35
2015	0,77	1,29	0,16	0,32
2016	0,75	1,19	0,17	0,27

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2017

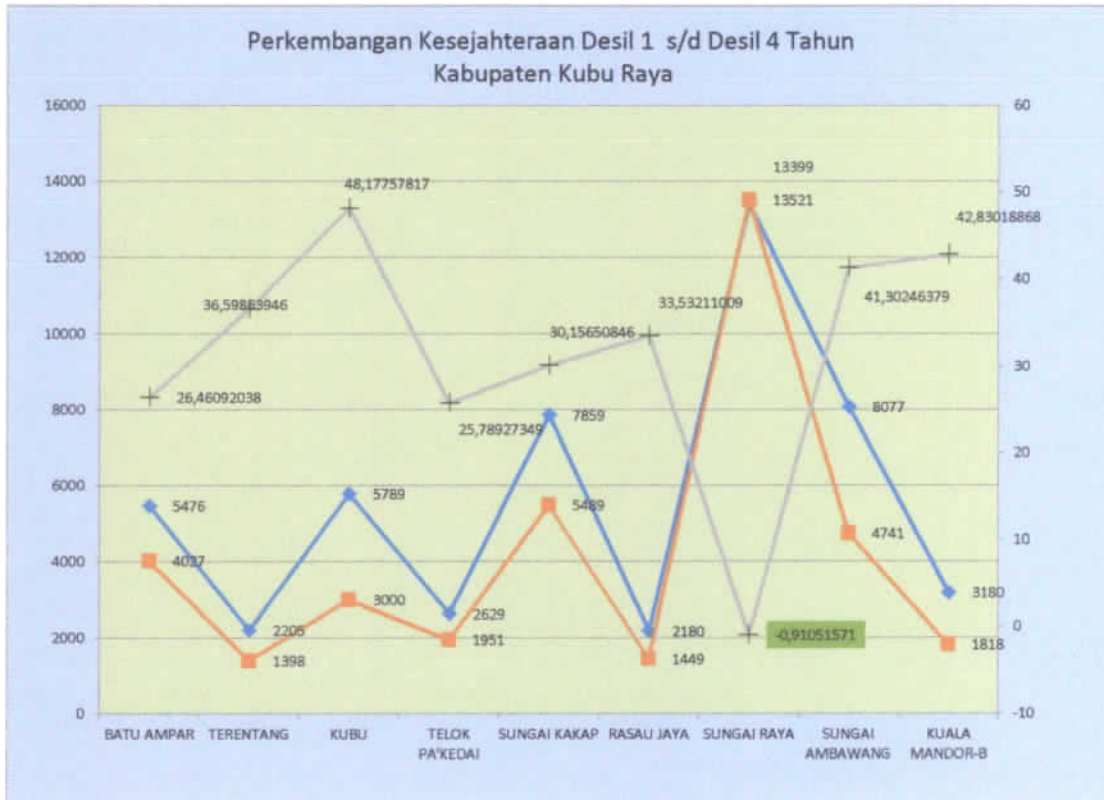
Sementara itu, membandingkan data TPN2K terhadap indikator kesejahteraan diantara penduduk miskin (basis perbandingan BPDT 2011 vs BPDT 2015), terlihat bahwa terjadi kondisi dimana indeks kesejahteraan penduduk miskin, semakin membesar. Pada kondisi Desil 1 BPDT 2011 dari 117.510 jumlah rumah tangga yang didata, terdata sebanyak 6.865 rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2015, pada hasil yang sama, dari 132.769 jumlah rumah tangga yang didata, terdata 9.643 rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia. Kondisi perubahan terhadap kluster-kluster yang terkelompok dalam desil 2, desil 3 dan desil 4, menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sama.

r
A

Grafik 2.2.
PERBANDINGAN BPDT TPN2K PADA 2011 DAN 2015
DESIL 1 : (RUMAH TANGGA/INDIVIDU DENGAN KONDISI
KESEJAHTERAAN SAMPAI DENGAN 10% TERENDAH DI INDONESIA)



Grafik 2.3.
PERBANDINGAN BPDT TPN2K PADA 2011 DAN 2015
DESIL 14 : RUMAH TANGGA/INDIVIDU DENGAN KONDISI
KESEJAHTERAAN DIATAS 30% - 40% TERENDAH DI INDONESIA)



Handwritten signature or initials in blue ink.

Tabel 2.18.

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KUBU RAYA PER KECAMATAN BERDASARKAN STATUS KESEJAHTERAAN

KECAMATAN	Jumlah Rumah tangga Base KDA 2011	Jumlah Rumah Tangga								TOTAL	%
		Desil 1	%	Desil 2	%	Desil 3	%	Desil 4	%		
BATU AMPAR	7,976	558	7.00%	1,454	18.23%	1,587	19.90%	4,346	54.49%	4,027	50.49%
TERENTANG	2,74	139	5.07%	518	18.91%	492	17.96%	249	9.09%	1,398	51.02%
KUBU	8,615	407	4.72%	916	10.63%	1,091	12.66%	586	6.80%	3	34.82%
TELOK PAKEDAI	4,278	294	6.87%	649	15.17%	679	15.87%	329	7.69%	1,951	45.61%
SUNGAI KAKAP	23,677	876	3.70%	1,73	7.31%	1,86	7.86%	1,023	4.32%	5,489	23.18%
RASAU JAYA	5,884	213	3.62%	435	7.39%	534	9.08%	267	4.54%	1,449	24.63%
SUNGAI RAYA	44,001	2,762	6.28%	4,6	10.45%	4,28	9.73%	1,879	4.27%	13,521	30.73%
SUNGAI AMBawang	14,839	835	5.63%	1,535	10.34%	1,588	10.70%	783	5.28%	4,741	31.95%
KUALA MANDOR B	5,5	494	8.98%	582	10.58%	503	9.15%	239	4.35%	1,818	33.05%
	117,51	6,578		12,419		12,614		9,701		37,394	

KECAMATAN	Jumlah Rumah tangga Base KDA 2015	Jumlah Rumah Tangga								TOTAL	%
		Desil 1	%	Desil 2	%	Desil 3	%	Desil 4	%		
BATU AMPAR	8,901	1,403	15.76%	1,689	18.98%	1,436	16.13%	948	10.65%	5,476	61.52%
TERENTANG	2,761	362	13.11%	592	21.44%	702	25.43%	549	19.88%	2,205	79.86%
KUBU	9,643	978	10.14%	1,417	14.69%	1,738	18.02%	1,656	17.17%	5,789	60.03%
TELOK PAKEDAI	5,036	575	11.42%	709	14.08%	735	14.59%	610	12.11%	2,629	52.20%
SUNGAI KAKAP	28,063	1,37	4.88%	1,981	7.06%	2,327	8.29%	2,181	7.77%	7,859	28.00%
RASAU JAYA	6,472	176	2.72%	422	6.52%	720	11.12%	862	13.32%	2,18	33.68%
SUNGAI RAYA	51,232	2,449	4.78%	3,46	6.75%	3,925	7.66%	3,565	6.96%	13,399	26.15%
SUNGAI AMBawang	14,331	1,536	10.72%	2,11	14.72%	2,351	16.40%	2,08	14.51%	8,077	56.36%
KUALA MANDOR B	6,33	794	12.54%	895	14.14%	790	12.48%	701	11.07%	3,18	50.24%
	132,769	9,643		13,275		14,724		13,152		50,794	

Sumber : TNP2K Tahun 2015

2.2.2.4. Kepemilikan Tanah

Sampai tahun 2009, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya telah menerbitkan 3.304 sertifikat hak atas tanah, sebanyak 2.995 sertifikat berupa hak milik atau sekitar 88% dari keseluruhan sertifikat yang diterbitkan. Sementara sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan sebanyak 304 sertifikat dan 5 sertifikat hak pakai.

2.2.2.5. Kesempatan Kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk usia kerja (PUK). Rasio penduduk bekerja di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 sebesar 90,74%, menjadi 93,82% di tahun 2014. Sementara di tahun 2015 jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 258.528 orang dan meningkat di tahun 2016 sebanyak 259.830 orang. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2016 menurun dari 67,67% tahun 2015 menjadi 64,49% di tahun 2016. Hal tersebut berarti dari 100 penduduk orang angkatan kerja terdapat sekitar 40 orang yang berstatus sebagai pengangguran.

Tabel 2.19.
INDIKATOR TENAGA KERJA

No.	Angkatan Kerja	Tahun			
		2013	2014	2015	2016*
1.	Penduduk Usia Kerja (orang)	368.937	376.592	383.096	390.039
2.	Penduduk Bekerja	202.320	229.686	228.528	237.586
3.	Penduduk Menganggur	20.656	15.132	14.599	13.945
4.	Angkatan Kerja	222.976	244.818	243.127	251.531
	TPAK	63,97	65,01	67,67	64,49
	Rasio Penduduk Bekerja	90,74	93,82	94,00	94,46

Sumber : Sakernas, 2015, * angka proyeksi, diolah untuk kepentingan analisa

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Konkuren

2.3.1.1. Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang

merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan di masyarakat. Peningkatan layanan Pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh.

Upaya perluasan akses pendidikan dimulai dari jenjang terendah pendidikan (TK/PAUD). Pada tahun 2012 jumlah TK/PAUD di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 45 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.122 siswa. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan bagi anak usia 0 – 6 tahun atau pendidikan anak-anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat) maupun jalur pendidikan nonformal (kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat), dan/atau jalur pendidikan informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Prosentase siswa baru TK/PAUD idealnya mencapai 100%. Namun di tahun 2016, prosentase PAUD hanya sebesar 62,87% dari kondisi seharusnya sebesar 80%.

Angka Putus Sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kubu Raya cenderung tinggi. Angka Putus Sekolah idealnya adalah 0%. Pada tahun 2016, prosentase Angka Putus Sekolah SD sebesar 0,83% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,57%. Angka Putus Sekolah SD relatif paling rendah diantara jenjang pendidikan SMP dan SMA. Tingginya Angka Putus Sekolah SMP dan SMU, berkorelasi Angka Partisipasi Sekolah. Pada indikator ini, Angka Partisipasi Sekolah jenjang SMU cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Faktor ekonomi untuk membantu orang tua di sektor ekonomi, sering kali menjadi penyebab siswa meninggalkan dunia pendidikan memasuki dunia kerja.

Pekembangan jumlah peserta didik di Kabupaten Kubu Raya terus mengalami peningkatan. Kondisi yang sama juga ditunjukkan dengan ketersediaan guru mengajar. Rasio siswa terhadap guru untuk jenjang SD di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 sebesar 17,51%, SMP sebesar 13,90% dan SMU sebesar 17,69%. Rata-rata rasio siswa terhadap guru di

Kabupaten Kubu Raya sebesar 16,44%. Secara umum rasio siswa terhadap guru di Kabupaten Kubu Raya belum ideal. Idealnya guru di jenjang SMU harusnya lebih banyak daripada guru SMP karena bidang studi di SMU lebih banyak daripada jenjang SMP, sedangkan guru jenjang SD adalah guru kelas sehingga seharusnya paling sedikit. Bila digunakan standar SD sebesar 16%, SMP sebesar 15%, dan SMU sebesar 12%, maka untuk jenjang SD sebesar 18 atau 112,5% belum mencapai standar atau kelebihan guru, jenjang SMP sebesar 14 atau 93,33% belum mencapai standar atau kekurangan guru, dan jenjang SMU sebesar 18 atau 150% belum mencapai standar atau kelebihan guru.

Dari aspek kualitas tenaga pengajar mempengaruhi kualitas dan kuantitas siswa. Prosentase Guru Layak (S-1/DIV) tertinggi terdapat di jenjang SMU sebesar 90,72% dan yang terkecil pada jenjang SD sebesar 74,93%. Guru yang belum layak mengajar harus disetarakan. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru dilakukan dengan mendorong guru agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kelayakan mengajar guru akan meningkat. Secara umum prosentase guru layak di Kabupaten Kubu Raya GL hanya tercapai 78,56%, sehingga masih diperlukan penyetaraan sebesar 21,44 persenguru dikdasmen yang layak untuk mengajar. Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas guru, dilakukan sertifikasi guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Prosentase guru yang sudah bersertifikasi terdapat di jenjang SD sebesar 42,75% dan terkecil terdapat pada jenjang SMU sebesar 23,11%. Di tingkat SD masih terdapat 57,25% guru yang perlu disertifikasi. Sementara untuk SMP terdapat 73,16% guru yang perlu sertifikasi dan SMU sebesar 76,89%.

Di Kabupaten Kubu Raya jumlah sekolah, rombongan belajar dan ruang kelas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah SMU sebanyak 112 sekolah, SMP 226 sekolah dan SD 534 sekolah. Sementara jumlah rombongan belajar SD sebanyak 4.598 rombongan belajar, SMP 1.332 rombongan belajar dan SMU sebanyak 739 rombongan belajar. Ketersediaan ruang kelas, di tahun yang sama jenjang SD sebanyak 3.240 lokal, SMU 1.330 lokal dan jenjang SMU 656 ruang kelas.

Tabel 2.20.
DATA PRASARANA DIKDASMEN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016/2017

No.	Variabel	SD	SMP	SMU
1	Baik	684	403	318
2	Rusak Ringan	1,615	735	247
3	Rusak Sedang	354	73	53
4	Rusak Berat	329	75	27
5	Rusak Total	258	44	11
	Jumlah	3,240	1,330	656
1	% Baik	21.11	30.30	48.48
2	% Rusak Ringan	49.85	55.26	37.65
3	% Rusak Sedang	10.93	5.49	8.08
3	% Rusak Berat	10.15	5.64	4.12
5	% Rusak Total	7.96	3.31	1.68

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kubu Raya, 2016

Tabel 2.21.
URUSAN KONKUREN BIDANG PENDIDIKAN

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
1	Angka Melek Huruf (AMH)**	85.02	85.32	85.24	88.32
2	IPM	63.94	64.52	65.02	65,54
	- Angka Harapan Hidup (AHH)	69.64	69.64	69.74	69,77
	- Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	12.14	12.34	12.55	12,84
	- Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	6.16	6.41	6.56	6,57
	- Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	7,935	7,973	7,994	9.145
3	PAUD				
4	Angka Putus Sekolah (APS)				
	- APS SD/MI	0.41	0.42	0.57	0,83
	- APS SMP/MTs	0.51	0.59	0.67	1,69
	- APS SMA/MA/SMK	0.12	0.18	0.24	1,03
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
	- APS SD/MI	88.89	88.81	89.59	99.00
	- APS SMP/MTs	68.15	68.06	67.96	81.86
	- APS SMA/MA/SMK	49.64	54.52	53.11	62.84
6	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	- APM SD/MI	88.81	89.59	78.26	98.83
	- APM SMP/MTs	68	67.99	53.91	81.44
	- APM SMA/MA/SMK	46.73	37.55	47.33	60.18
7	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	- APK SD/MI	88.89	88.81	89.6	83.91
	- APK SMP/MTs	68.15	66.32	67.99	78.25
	- APK SMA/MA/SMK	43.24	46.73	37.55	47.89

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
8	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)				
	- APT SD/MI	100	100	100	100
	- APT SMP/MTs	98.67	99.14	99.77	99.97
	- APT SMA/MA/SMK	99.63	99.74	99.78	99.98
9	Jumlah Sekolah dan Ruang/ Lokal Belajar (Negeri/Swasta)				
	- Jumlah Sekolah SD/MI	353	358	367	534
	- Jumlah Sekolah SMP/MTs	112	118	131	226
	- Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA	84	93	101	112
10	Jumlah Murid (Negeri/Swasta)				
	- Jumlah Murid SD/MI	68,282	68,284	70,081	76,765
	- Jumlah Murid SMP/MTs	22,956	25,568	28,283	31,272
	- Jumlah Murid SMA/SMK/MA	15,275	17,116	17,006	16,795
11	Jumlah Tenaga Pendidik (Negeri/Swasta)				
	- Jumlah Guru SD/MI	3,835	3,813	3,869	4,390
	- Jumlah Guru SMP/MTs	1,017	1,034	1,048	2,455
	- Jumlah Guru SMA/SMK/MA	457	496	505	1,289
12	Rasio Murid Terhadap Guru				
	- Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI	56.16	55.84	55.21	57.19
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMP/MTs	44.30	40.44	37.05	78.50
	- Rasio Murid Terhadap Guru SMA/SMK/MA	27.30	29.62	31.54	40.13
13	Angka Melanjutkan (AM)				
	- AM SMP	100,08	101,12	101,25	102,58
	- AM SMA	67,96	68,15	68,24	68,26
14	Fasilitas Pendidikan				
	- Sekolah SD dalam kondisi baik			680	684
	- Sekolah SMP dalam kondisi baik			427	403
	- Sekolah SMA/SMK dalam kondisi baik			305	318
15	Rasio Ketersediaan Sekolah				
	- Rasio ketersediaan SD		508	534	533
	- Rasio Ketersediaan SMP		194	226	227
	- Rasio Ketersediaan SMA		70	87	87
16	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	66,37	66,52	66,73	68,24
17	Persentase Guru SD yang bersertifikasi	28,36	30,28	32,44	33,49
18	Sertifikasi Sekolah SD				
	Sekolah SD Bersertifikasi A	-	-	-	8
	Sekolah SD bersertifikasi B	-	-	-	41
	Sekolah SD bersertifikasi C	-	-	-	36

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kubu Raya, 2016

Mengurai permasalahan dunia pendidikan di Kabupaten Kubu Raya bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Dari perhitungan IPM, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kubu Raya masih belum menunjukkan kinerja yang baik, dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di tahun 2016 hanya sebesar 6,57 tahun. Artinya peluang peserta didik tingkat dasar untuk menyelesaikan pendidikan 9 tahun cenderung rendah atau hanya sempat mengenyam pelajaran di SMP semester pertama.

Kinerja bidang pendidikan berdasarkan Rencana Strategi (renstra) Kemendikbud terdiri dari lima misi pendidikan dan kebudayaan. Misi Pendidikan terdiri atas M1 adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu, M4 adalah mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, dan M5 adalah mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Terkait dengan Misi 2; mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan Misi 3; mewujudkan pembelajaran yang bermutu, secara umum kinerja dunia pendidikan Kabupaten Kubu Raya untuk Misi 2 menunjukkan kinerja Pratama (80,00-84,99) dan Misi 3 menunjukkan kinerja yang kurang (kurang dari 80,00).

Tabel 2.22.
PENCAPAIAN KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN KUBU RAYA 2016/2017

Misi	SD	SMP	SM	Dikdasmen	Jenis
AKSES PENDIDIKAN	82.80	86.91	78.30	82.67	PRATAMA
a. Merata	64.26	80.97	68.85	71.36	KURANG
b. Meluas	86.51	84.98	66.30	79.26	KURANG
c. Berkeadilan	97.64	94.77	99.75	97.39	PARIPURNA
MUTU PENDIDIKAN	69.02	70.96	70.91	68.96	KURANG
a. Siswa	92.80	98.75	99.31	92.94	UTAMA
b. Guru	69.68	66.09	60.55	65.44	KURANG
c. Prasarana	44.58	48.04	52.86	48.49	KURANG
Kinerja	75.91	78.93	74.60	75.81	KURANG

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kubu Raya, 2016

Kinerja Misi 2 dengan nilai rata-rata 82,67% termasuk kategori pratama, dirinci atas indikator meluas sebesar 79,26% termasuk kategori kurang, indikator merata sebesar 71,36% termasuk kategori kurang dan indikator berkeadilan sebesar 97,39% termasuk kategori paripurna.

Sedangkan kinerja Misi 3 dengan rata-rata nilai 68,96% termasuk kategori kurang, yang dirinci menjadi indikator mutu siswa sebesar 92,94% termasuk kategori utama, indikator mutu guru sebesar 65,44% termasuk kategori kurang dan indikator mutu prasarana sebesar 48,49% termasuk kategori kurang. Selanjutnya, bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka jenjang SD dengan nilai 75,91% termasuk kategori kurang, jenjang SMP dengan nilai 78,93% termasuk kategori kurang, dan jenjang SMA dengan nilai 74,60% termasuk kategori kurang, dengan rata-rata angka dikdasmen sebesar 75,81% juga termasuk kategori kurang. Secara umum kinerja Kabupaten Kubu Raya sebesar 75,81% dan termasuk kategori kurang.

Tabel 2.23.
NILAI INDIKATOR PENDIDIKAN

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
Akses yang Meluas					
1	Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)	70.47	99.85	88.77	86.36
3	Persentase Perpustakaan (%Perpus)	72.81	62.13	50.40	61.78
4	Persentase Ruang UKS (%RUKS)	27.37	64.68	65.60	52.55
5	Persentase Tempat Olahraga (%TOR)	99.81	96.17	89.60	95.19
6	Persentase Laboratorium (%Lab)	15.08	62.98	18.72	32.26
Akses yang Merata					
7	Angka Partisipasi Murni (APM)	99.73	89.09	66.29	85.04
8	Angka Partisipasi Kasar (APK)	100.00	95.65	72.71	89.45
9	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)	100.00	100.00	88.23	96.08
10	Angka Masukan Murni (AMM SD)/Angka Melanjutkan (AM SMP dan SM)	97.02	100.00	74.67	90.56
11	Satuan Biaya (SB)	35.83	40.15	29.60	35.19
Akses yang Berkeadilan					
12	Perbedaan Gender APK (PG APK)	96.25	92.17	99.69	96.04
13	Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)	96.67	92.14	99.57	96.13
14	% Siswa Swasta (% S-Swt)	100.00	100.00	100.00	100.00

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Dikdasmen
Mutu dari segi Siswa					
1	Persentase Siswa Baru TK (%SB TK)	62.87	-	-	62.87
2	Angka Mengulang (AU)	97.57	99.14	99.30	98.67
3	Angka Bertahan Tk 5 (AB5 SD)/Angka Bertahan (AB SMP dan SM)	100.00	98.37	98.93	99.10
4	Angka Lulusan (AL)	100.00	98.43	99.81	99.41
5	Angka Putus Sekolah (APS)	99.17	98.31	98.97	98.82
6	Rata2 Lama Belajar (RLB)	97.17	99.51	99.55	98.74
Mutu dari segi Guru					
7	Persentase Guru Layak (% GL)	74.93	78.77	90.72	81.47
8	Persentase Guru Sertifikasi (%GS)	42.75	26.84	23.11	30.90
9	Rasio Siswa per Guru (R-S/G)	91.37	92.65	67.83	83.95
Mutu dari segi Prasarana					
10	Persentase Sekolah Akreditasi A & B (%SA-AB)	14.34	5.96	19.20	13.17
11	Persentase Ruang Kelas baik (%RKb)	21.11	30.30	48.48	33.30
12	Persentase Perpustakaan baik (%Perpusb)	41.69	52.74	61.90	52.11
13	Persentase Ruang UKS baik (%RUKSb)	74.15	80.26	73.17	75.86
14	Persentase Laboratorium baik (%Labbb)	71.60	70.95	61.54	68.03

Sumber: Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kubu Raya, 2016

2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang (UU). Sehingga, dapat dikatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat (1) dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Arah peningkatan terkait dengan pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial terhadap penduduk rentan. Terkait dengan hal tersebut, perkembangan capaian pembangunan bidang kesehatan Dalam mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada

tahun 2018 adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan kualitas gizi yang relevan dengan ibu dan anak, terlihat bahwa prosentase kasus kematian ibu serta prevelensi kematian bayi dan balita masih relatif tinggi dan masih perlu penanganan dan kerja keras untuk menemukannya.

Tabel 2.24.
URUSAN KONKUREN BIDANG KESEHATAN

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016
DERAJAT KESEHATAN						
1.	Angka Usia Harapan Hidup	Kasus	95.46	95.46	95.46	95.46
2.	Angka Kematian Balita	Kasus	35	48	25	60
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	39	52	31	7
4.	Angka Kematian Bayi	Tahun	5	12	12	15
5.	Jumlah Penderita Gizi Buruk	Kasus	18	24	30	29
6.	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	66.83	69.64	69.74	96,77
PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA						
1.	Pelayanan BUMIL KI	%	95.50	97,20	96,00	96,10
2.	Pelayanan BUMIK K4	%	90,07	86,67	92,11	91,98
3.	Pemeriksaan BUMIL	%	83,12	78,85	85,66	90,02
4.	Imunisasi (UCI)	%	37,07	62,93	66,95	61,02
5.	Persalinan Nakes	%	41.59	50	66.95	61.02
6.	Rasio pelayanan Komplikasi Kebidanan	%	66,79	57,91	47,19	39,70
7.	Pelayanan Kontrasepsi	%	49,71	38,04	48,92	59,08
KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN						
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan / Medis	orang	377	386	421	429
2.	Jumlah Sarana Kesehatan	unit	377	386	421	429
2.	Jamkesda	Jiwa	37.500	37.500	4.152	4.865
3.	Rasio Posyandu per satuan balita	%	37,500	37,500	4,152	4,865

Sumber: BPS KDA 2016, Proile Kesehatan Kesehatan Kab.Kubu Raya, 2016

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aksesibilitas pelayanan infrastruktur masih merupakan masalah utama di Kabupaten Kubu Raya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang direncanakan dengan pendekatan konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang menjadi prioritas karena langsung berpengaruh terhadap percepatan dan kesinambungan pembangunan. Di bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kubu Raya ditujukan pada upaya peningkatan interkoneksi antar wilayah pembangunan melalui peningkatan kualitas sarana transportasi. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya, pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan utilitas publik perkotaan dan perdesaan serta penanganan kawasan kumuh termasuk pada upaya meningkatkan keterjangkauan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni.

Panjang jalan terbangun di Kabupaten Kubu Raya mencapai 646.559 Km. Dari panjang ruas jalan tersebut, prosentase jalan dalam kondisi sudah diaspal sepanjang 34,02% dan sepanjang 65,98% dari panjang jalan terbangun yang belum dilakukan pengaspalan.

Tabel 2.25.
PANJANG JALAN MENURUT KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN YANG BERWENANG MENGELOLANYA DI KABUPATEN KUBU RAYA (KM) TAHUN 2016

No.	District	Negara State	Kabupaten Province	Kecamatan District	Jumlah Total
1	Batu Ampar	-	-	60 131	60 131
2	Terentang	-	-	23 773	23 773
3	Kubu	-	-	83 718	83 718
4	Teluk Pakedai	-	-	22 098	22 098
5	Sungai Kakap	-	13 193	70 373	83 566
6	Rasau Jaya	-	6 933	46 270	53 203
7	Sungai Raya	14 297	20 960	150 704	185 961
8	Sungai Ambawang	61 819	-	47 353	109 172
9	Kuala Mandor B	-	-	24 937	24 937
	Jumlah/ Total	76 116	41 086	529 357	646 559

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

Tabel 2.26.
PANJANG JALAN KABUPATEN MENURUT JENIS PERMUKAAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013 – 2016

No.	Jenis Permukaan	2013	2014	2015	2016
1.	Aspal / <i>Asphalted</i>	181 249	178 087	221 271	180 108
2.	Kerikil / <i>Gravel</i>	7 400	4 107	2 107	2 945
3.	Tanah / <i>Soil</i>	162 665	158 032	87 925	154 324
4.	Lainnya / <i>Others</i>	178 289	189 131	218 053	191 980
	Jumlah / Totals	529 603	529 537	529 357	529 357

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

Pembangunan jalan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi dilingkungan perumahan. Perkembangan pembangunan jalan lingkungan sebagai berikut :

Tabel 2.27.
BANYAKNYA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2011 – 2016

NO	Year	Panjang Jalan	Number of Location	
		Distance of Street	Desa Village	Kecamatan District
1	2016	58,18	53	9
2	2015	115,73	92	9
3	2014	209,31	118	9
4	2013	153,71	105	9
5	2012	126,37	95	9
6	2011	141,5	80	9

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

Terkait dengan penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW). Sedangkan rencana detail terkait pengaturan ruang dan zonasi (RDTR) saat ini masih dalam tahapan penyusunan oleh SKPD Dinas PUPR. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pencapaian kinerja mengacu pada indikator kunci dalam RPJMD sampai tahun 2016, sebagian besar sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa indikator yang perlu ditingkatkan pencapaiannya adalah pada aspek pemenuhan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan listrik, langkah kebijakan yang diambil oleh Kabupaten adalah melalui energi alternatif (PLTS).

Capaian indikator urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut :

Tabel 2.28.
URUSAN KONKUREN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator Kinerja	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD	
	Tahun Ke ...		Tahun Ke..		Tahun Ke*	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Persentase kondisi jalan dalam keadaan baik/mantap :						
a. Jalan Kabupaten (%)	44.00	52.00	57.00	84.00	129.55	161.54
b. Jalan Lingkungan (%)	32.00	34.00	11.03	53.63	34.47	157.74
Panjang jalan terbangun :						
a. Jalan Kabupaten 12 Koridor dalam RTRW Kabupaten Kubu Raya (Km)	306.11	351.77	330.91	416.11	108.10	118.29
b. Jalan Lingkungan (Km)	390	460	115.73	925.12	29.67	201.11
Panjang jembatan terbangun/Meter (pada jalan kabupaten :	612	702	612.40	646.90	100.07	92.15
Cakupan pelayanan Listrik (%)	93.88	95.39	35	55.15	37.28	57.82

Sumber : Bahan Evaluasi RPJMD, diolah

2.3.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan aspek Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dengan fokus penegakan ketertiban dan pengawalan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan pembinaan Partai politik serta organisasi kemasyarakatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pelaksanaan penugasan tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan kordinasi dengan unsur vertikal (Polri, TNI, unsur angkatan lainnya) termasuk kelembagaan di masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat).

7
d
r

Tabel 2.29.
BANYAKNYA ORGANISASI MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PARTAI POLITIK DIRINCI MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

No.	Kecamatan	Organisasi Masyarakat	Lembaga Swadaya Masyarakat	Partai Politik
1	Batu Ampar	7	2	-
2	Terentang	4	1	-
3	Kubu	18	2	-
4	Teluk Pakedai	5	3	-
5	Sungai Kakap	17	16	2
6	Rasau Jaya	11	4	2
7	Sungai Raya	78	43	37
8	Sungai Ambawang	27	15	1
9	Kuala Mandor B	9	1	-
	2 0 1 6	176	87	42
	2 0 1 5	179	89	42
	2 0 1 4	179	89	42
	2 0 1 3	179	89	42

Sumber : Bahan Evaluasi RPJMD, diolah

Perkembangan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya cukup besar. Jumlah Organisasi yang bergerak langsung di masyarakat tahun 2016 terdata sebanyak 176 Lembaga Swadaya masyarakat (LSM/CSO) dan 87 LSM/CSO. Sedangkan jumlah partai politik sebanyak 42 Partai Politik. Organisasi masyarakat maupun LSM tersebar di seluruh kecamatan, dengan aktivitas sebagai penggiat di sektor pembangunan ekonomi, rehabilitasi sumber daya alam, penguatan kapasitas ibu dan anak serta lainnya.

Terkait dengan aspek ketertiban umum, potensi konflik sosial di Kabupaten Kubu Raya, sebagian besar cenderung bermotif pada akses terhadap sumber daya ekonomi. Perkembangan perkebunan skala besar membawa resiko terjadinya penguasaan lahan, sehingga sering kali menjadi sumber pemicu konflik. Berbagai mediasi dengan melibatkan pihak terkait, sejauh ini cukup efektif meredam konflik lahan yang terjadi maupun konflik lainnya terkait dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal penanganan ketertiban umum dan penegakan Perda, peran SATPOL PP, sebagai garda Kabupaten cukup efektif melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, baik dalam hal penertiban keramaian umum (pasar dan sejenisnya), maupun dalam hal lain seperti penertiban spanduk, perizinan dan lain sebagainya.

Tabel 2.30.
JUMLAH PELANGGARAN PERDA DI KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Lokasi Pelanggaran
1.	Bangunan Liar	100	Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang
2.	Pedagang Kaki Lima	42	Kecamatan Sungai Raya
3.	Gelandangan dan Pengemis	7	Kecamatan Sungai Raya
4.	Reklame / Spanduk / Baliho / Pamphlet Liar	60	Kecamatan Sungai Raya
5.	Kost / Hotel / Penginapan / Losmen	48	Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya dan
6.	Layang-layang	80	Kecamatan Sungai Kakap
7.	Anak Sekolah	20	Kecamatan Sungai Raya
8.	Jumlah Kunjungan Anak Sekolah di Warnet	47	Kecamatan Sungai Raya
9.	Unjuk Rasa	4	Kecamatan Sungai Raya
2 0 1 6		408	Kabupaten Kubu Raya

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

Aspek kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang masih menjadi kendala adalah bencana kabut asap dan kebakaran lahan. Saat ini Penanganan kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan secara terkoordinasi dengan SAR serta pelibatan Linmas serta aparat pemerintah lainnya.

~
gk

Tabel 2.31.
BANYAKNYA BENCANA DAERAH YANG TERJADI DI KABUPATEN KUBU RAYA DIRINCI MENURUT KECAMATAN 2014-2017

No.	Kecamatan District	2014	2015	2016	2017
1.	Batu Ampar	2	...	-	-
2	Terentang	1	...	-	-
3	Kubu	-	...	-	1
4	Teluk Pakedai	-	...	-	-
5	Sungai Kakap	3	...	2	1
6	Rasau Jaya	2	...	-	1
7	Sungai Raya	5	...	6	8
8	Sungai Ambawang	3	...	3	3
9	Kuala Mandor B	3	...	3	-
JUMLAH		19	...	14	14

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

2.3.1.5. Sosial

Pembangunan pada pelayanan sosial di Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari permasalahan kesejahteraan sosial yang terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten. Namun demikian, hasilnya belum mampu menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya adalah jumlah penduduk miskin cenderung meningkat antara lain gelandangan, pengemis, anak jalanan dan anak terlantar. Indikator jaminan perlindungan sosial untuk jumlah penderita cacat masih belum mencapai target, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan SDM dalam memfasilitasi dan mengurus penderita cacat, sehingga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum mampu untuk menambah jumlah penderita cacat untuk direhab.

Tabel 2.32.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG SOSIAL

Indikator Kinerja	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD	
	Tahun Ke ...		Tahun Ke..	
	2015	2016	2015	2016
Jaminan perlindungan sosial :				
a. Penderita Cacat (Orang)	1,000	1,100	790	818
b. Lansia (Orang)	2,100	2,150	2,203	2,215
c. Anak Terlantar (Orang)	350	450	5,170	1,538

Sumber : Bahan Evaluasi RPJMD, diolah

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Konkuren

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kubu Raya diproyeksikan di tahun 2016 sebesar 67,67%. Hal tersebut berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat sekitar 40 orang yang tidak terlibat secara aktif dalam Angkatan Kerja (menunggu pekerjaan). Sementara tingkat pengangguran di tahun 2016 diperkirakan sebesar 6,11%.

Tabel 2.33.
TINGKAT PARTISIPASI TENAGA KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013-2015

Indikator Ketenagakerjaan	2014	2015	2016*
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,01	67,60	67,67
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,08	6,18	6,11

Sumber : BPS, *Sakernas Agustus Tahun 2013-2015*, *proyeksi diolah untuk kebutuhan analisa

Berdasarkan proyeksi ketenagakerjaan yang dilakukan di tahun 2016, PUK Kabupaten Kubu Raya diperkirakan mengalami penambahan dari sebanyak 387.096 orang di tahun 2015 menjadi 390.039 orang di tahun 2016. Perkiraan penambahan PUK di tahun 2016, berdasarkan hasil proyeksi disokong dari kemungkinan bertambahnya PUK semua kelompok usia, terkecuali di kelompok usia 25-29 tahun. Peningkatan penduduk usia kerja di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil proyeksi diikuti dengan peningkatan penduduk yang bekerja. Sedangkan proyeksi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran berdasarkan hasil proyeksi akan mengalami kecenderungan yang menurun. Secara umum angka proyeksi terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Kubu Raya di tahun 2016, menunjukkan perkiraan yang menggembirakan.

Tabel 2.34.
JUMLAH PUK, AK, TPAK, PYB, PT DAN TPT MENURUT GOLONGAN
UMUR KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016
(ORANG)

Golongan Umur	PUK	AK	TPAK	PYB	PT	TPT
15-19	54.354	6.977	12,84	3.561	3.416	48,97
20-24	50.310	33.182	65,96	27.402	5.780	17,42
25-29	44.624	38.685	81,04	36.498	2.187	5,65
30-34	42.256	36.144	81,00	34.919	1.224	3,39
35-39	42.256	32.119	76,01	31.557	562	1,75
40-44	37.606	29.467	78,36	29.277	189	0,64
45-49	31.558	25.400	80,49	25.214	187	0,73
50-54	24.700	20.711	83,85	20.557	154	0,74
55-59	19.792	14.151	71,50	14.027	124	0,87
60+	37.101	14.695	39,61	14.573	122	0,83
Jumlah	390.039	251.531	64,49	237.586	13.945	5,54

Sumber : Angka proyeksi, data diolah

Dari sisi kualitas tenaga kerja, hasil proyeksi tahun 2016 menunjukkan kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Kubu Raya PUK Kabupaten Kubu Raya diperkirakan akan dibanjiri oleh PUK dengan jenjang pendidikan SMTA Kejuruan, Diploma dan S-1. PUK yang paling besar di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil proyeksi akan berada pada PUK dengan pendidikan Universitas dengan perkiraan perubahan sebesar 6,86% dari perkiraan jumlah PUK sebanyak 390.039. Masih berdasarkan hasil proyeksi ketenagakerjaan tahun 2016, perkiraan penambahan angkatan kerja terbesar akan didominasi AK dengan jenjang pendidikan Diploma dan Universitas. Dari data hasil proyeksi tahun 2016, daya serap sektor basis Kabupaten Kubu Raya terhadap penduduk yang bekerja, diperkirakan akan mengalami pengurangan daya serap tenaga kerja. Berkurangnya penduduk bekerja di Kabupaten Kubu Raya, diperkirakan akan berada di sektor angkutan, listrik, gas dan air, bangunan dan pertambangan. Sedangkan sektor basis yang menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerjadi Kabupaten Kubu Raya, pada tahun 2016 diperkirakan hanya akan mengalami penyusutan rata-rata 1% - 2% penduduk bekerja.

Tabel. 2.35.
JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016
(ORANG)

Lapangan Usana	PYB
1. Pertanian	111.660
2. Pertambangan	1.566
3. Industri Pengolahan	17.094
4. Listrik, Gas dan Air	492
5. Bangunan	16.250
6. Perdagangan	46.128
7. Angkutan	7.142
8.. Keuangan	2.725
9. Jasa Kemasyarakatan	34.528
Jumlah	237.586

Sumber : Sakerna, Angka proyeksi, data diolah

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kubu Raya, adalah aspek penanganan Keluarga Berencana. Penanganan KB memiliki korelasi dengan SKPD Kesehatan. Permasalahan utama dalam upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Kubu Raya, adalah terbatasnya alat kontrasepsi yang selama ini masih mengandalkan dropping dari Pemerintah Provinsi. Sehingga pencapaian target terhadap peserta KB baru menjadi relatif terkendala.

~
df

Tabel. 2.36.
JUMLAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT KECAMATAN
DAN PUSKESMAS KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah PUS	Peserta KB Baru		Peserta KB Aktif	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Batu Ampar	Batu Ampar	2.433	144	5,90	2.915	82,00
		Padang Tikar	2.659	1.608	60,47	2.081	78,26
		Sungai Kerawang	758	24	3,17	549	72,43
2	Terentang	Terentang	637	37	5,81	481	75,51
		Radak	1.155	85	7,36	1.129	97,75
3	Kubu	Kubu	3.198	590	18,45	2.070	64,73
		Air Putih	3.306	147	4,45	5.688	172,05
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	3.435	170	4,95	1.150	33,48
5	Sungai Kakap	Sei Kakap	10.494	1.003	9,56	7.343	69,97
		Punggur	3.552	667	18,78	1.150	42,37
		Sungai Rengas	4.909	1.528	31,13	2.516	51,25
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	4.116	456	11,08	3.192	77,55
7	Sungai Raya	Sungai Raya Dalam	9.258	1.413	15,26	3.876	41,87
		Sungai Durian	25.986	2.043	10,06	20.312	78,17
		Sungai Asam	3.190	1.108	34,73	1.122	35,17
		Korpri	4.317	2.867	66,41	3.192	73,94
8	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang	4.971	789	15,87	3.076	61,88
		Parit Timur	3.492	355	10,17	2.484	71,13
		Lingga	3.406	495	14,53	2.271	66,68
9	Kuala Mandor B	Kuala mandor B	4.227	632	14,95	1.396	33,03
Jumlah (KAB/KOTA)			99.499	16.161	16,24	68.348	68,69

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kubu Raya, dilakukan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, sebagai upaya advokasi secara langsung terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

Tabel 2.37.
ASPEK PELAYANAN UMUM
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	532	545	548	674
2.	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. Partisipasi Angkatan Kerja)	63,97	65,01	67,67	64,49
3.	Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	37.259	37.259	37.553	37.553

Sumber : BPPKB Kabupaten Kubu Raya, 2016

2.3.2.3. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Penanganan sampah di Kabupaten Kubu Raya, masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Keterbatasan permasalahan penanganan sampah diakibatkan tidak sebandingnya volume sampah dengan sumber daya penanganan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya, menempatkan TPS pada titik-titik strategis serta melakukan pengaturan terhadap waktu pembuangan sampah di masyarakat, untuk menghindari penumpukan sampah dan kesesuaian dengan jadual pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Sampai saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki TPA yang representatif.

Selain upaya penanganan langsung, upaya preventif pengurangan sampah yang dilakukan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan masih sebatas sosialisasi 3R (*Re-Use, Re-Duse* dan *Re-Cycle*) ke masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi 3-R terpusat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Rasau Jaya. Secara umum capaian kinerja terhadap penduduk yang terlayani dalam pengurangan sampah baru mencapai 18,1%.

Selain persampahan dan kebersihan, cakupan tupoksi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, juga menyangkut aspek pengendalian lingkungan Hidup. Upaya pengendalian lingkungan hidup terhadap dampak pencemaran limbah, dilakukan dengan melakukan pengambilan sampel pada titik tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Selain itu, kebijakan penerapan AMDAL dan ANDAL juga dilakukan

terhadap aktivitas perusahaan besar, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap perubahan lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sudah memiliki KOMISI AMDAL.

Kinerja pembangunan pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38
ASPEK PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUBU RAYA

Indikator Kinerja	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD	
	Tahun Ke ...		Tahun Ke		Tahun Ke	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Cakupan pelayanan persampahan (%)	22	29	13.94	18.10	63.36	62.41
Rasio RTH (%)	6	7	7.1	7.45	118.33	106.43
Pembangunan rumah layak huni (Unit)	15,000	19,000	13,989	17,009	93.26	89.52

Sumber : Evaluasi Bappeda, 2017, diolah.

2.3.2.4. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan bidang kependudukan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan terkait dengan peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta pengembangan informasi dan administrasi kependudukan; dan terlaksananya kebijakan kependudukan yang serasi antara kebijakan kependudukan nasional dengan kebijakan kependudukan Kabupaten Kubu Raya.

Sebagai bentuk partisipasi mensukseskan program Nasional E-KTP, sudah dilakukan perekaman data kependudukan di kecamatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Capaian kinerja terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut.

Tabel 2.39.
PELAYANAN UMUM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	61,47	35,17	42,50	53,08
2.	Pasangan berakte nikah	743	977	1.454	2.010
3.	Kepemilikan KTP	363.404	209.831	253.920	318.257
4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	227.332	241.824	258.077	273.399
5.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	-	-	ada	ada
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	-	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kubu Raya, 2016

2.3.2.5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.40.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Posyandu aktif	376	406	413	388

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2016

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata jumlah kelompok binaan yang ada mengalami peningkatan. Kelompok binaan di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari dua jenis, menyangkut bidang ekonomi yang diutamakan untuk pedagang bakulan dan bidang teknologi tepat guna yang difokuskan untuk peningkatan keterampilan masyarakat. Selain itu organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bergerak secara aktif di setiap kelurahan yang ada. Demikian pula dengan keberadaan Posyandu sebagai sarana peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, yang pada tahun 2016 mencapai jumlah 388 unit.

2.3.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan penduduk di Kabupaten Kubu Raya (data BPS) pada tahun 2013 tercatat sebesar 591.1657 jiwa dan tahun 2017 diperkirakan jumlah penduduk Kubu Raya akan mencapai 601.356 jiwa. Pengendalian kependudukan, memiliki keterkaitan dengan ketersediaan alat kontrasepsi serta terutama upaya advokasi petugas KB. Berbagai upaya terobosan seperti Kamp[ung KB, GENRE, maupun konseling di kalangan remaja untuk menunda usia perkawinan terus dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga penggiat Keluarga Berencana.

2.3.2.7. Perhubungan

Sektor perhubungan memegang peran sentral dalam menciptakan nilai tambah melalui penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perkembangan antar wilayah. Kebijakan di bidang perhubungan Kabupaten Kubu Raya, selain dimaksudkan untuk mendukung pergerakan penduduk dan angkutan barang terutama untuk wilayah pedalaman.

Indikator utama bidang perhubungan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya ditujukan pada upaya pertambahan panjang jembatan terbangun dan penambahan steigher sebagai sarana utama penghubung interkoneksi antar wilayah. Tingkat capaian kinerja bidang perhubungan di Kabupaten Kubu Raya untuk pertambahan jembatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
ASPEK PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun Ke ...		Capaian Target RPJMD Tahun Ke..	
	2015	2016	2015	2016
Panjang jembatan terbangun/Meter (pada jalan kabupaten :	612	702	612.40	646.90
Jumlah dermaga/steigher yang terbangun (Buah)	199	239	173.00	200.00

Sumber : Evaluasi Bappeda, 2017, diolah.

2.3.2.8. Komunikasi dan Informatika

Aktivitas komunikasi dan informatika di Kabupaten Kubu Raya berkembang relatif cukup pesat sebagai dampak dari berkembangnya teknologi komunikasi dan IT, serta ketersediaan bangunan BTS sebagai

penunjang arus komunikasi antar penduduk. Selain itu, berkembangnya media komunikasi juga ditunjukkan dengan beragam menu informasi yang dipilih dari media baca serta media lainnya. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran secara khusus di bidang komunikasi dan informatika baik swasta maupun negeri, cukup diminati mengingat memiliki prospek perkembangan yang semakin besar di masa mendatang.

2.3.2.9. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal di selama periode 2013-2016 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.42.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Investasi PMA (Juta)	1.304.245,51	1.542.505,92	-	1.595.7999,11
2.	Jumlah Investasi PMDN (Juta)	3.053.817,67	8.441.122,70	-	7.743.131,14

Sumber : Kubu Raya Dalam Angka – BPS 2017

2.3.2.10. Statistik

Ketersediaan data statistik akan membantu dalam proses penyusunan rencana pembangunan maupun untuk kepentingan lainnya. Di Kabupaten Kubu Raya penyediaan data statistik bersumber dari BPS. Selain data statistik, data lainnya yang dihasilkan oleh SKPD teknis dalam bentuk data pokok, profile juga digunakan sebagai bagian yang perumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik di selama periode 2013-2016 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.43.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG STATISTIK

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada
3	Buku Kecamatan Dalam Angka	ada	ada	ada	Ada
4.	Indikator Makro pembangunan KKR	-	-	-	ada
5.	Perekonomian Daerah	-	-	-	ada

Sumber : Bappeda Kubu Raya, 2016

2.3.2.11. Kebudayaan

Pelestarian Kebudayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilakukan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event budaya dan event adat istiadat yang menjadi khasanah kekayaan budaya daerah. Sarana kreatif di bidang kebudayaan serta pembinaan pembudaya di Kabupaten Kubu Raya baru mencapai 50% dari target tahun 2019, sedangkan pembinaan industri kretaif baru mencapai 64,71%. Sebagian besar industri kreatif yang dibina adalah dalam bentuk industri pengolahan makanan.

Capaian kinerja Kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

Tabel 2.44.
ASPEK KEBUDAYAAN

Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun Ke ...		Capaian Target RPJMD Tahun Ke..		Rasio Capaian
	2015	2016	2015	2016	
Jumlah pelestarian cagar budaya (Unit)	2	4	10	10.00	100
Jumlah sarana dan industri kreatif :					
a. Sarana Kreatif	2	4	3	2.00	50
b. Industri Kreatif (Kegiatan)	9	11	6	11	64.71
Pelestarian budaya tradisional dan kearifan lokal (Event)	4	4	1	2.00	50

Sumber : Dinas Parakrafpora Bappeda Kubu Raya, 2016

Jumlah event budaya dan cagar budaya di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

Tabel 2.45.
INVETARISASI DATA KEGIATAN INDUSTRI KREATIF BERBASIS SENI
DAN BUDAYA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015 DAN 2016

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
1.	Event kreatif tingkat provinsi kalbar	Alun-alun Kapuas Kota Pontianak	Pagelaran qasidah dan hadrah
		Kota Singkawang	Festival seni budaya melayu
2.	Festival Hadrah	Kec. Sungai Raya	Masih perlu ditingkatkan
3.	Festival Qasidah	Kec. Sungai Raya	Masih perlu ditingkatkan
4.	Festival Musik Kreatif Pelajar	Kec. Sungai Raya	Perlu di kembangkan
5.	Festival Tundang	Kec. Sungai Raya	Perlu di kembangkan
6.	Festival Lagu Daerah	Kec. Sungai Raya	Perlu di kembangkan
7.	Festival Qasidah	Kec. Sungai Ambawang	Masih perlu ditingkatkan
8.	Festival Hadrah	Kec. Sungai Ambawang	Masih perlu ditingkatkan
9.	Rema Muda	Kec. Sungai Ambawang	Ajang Pelestarian Seni
10.	Haul	Kec. Sungai Raya	Ajang Pelestarian Budaya
11.	Tolak Bala'	Kec. Sungai Raya	Ajang Pelestarian Budaya

Sumber : Dinas Parakrafpora Bappeda Kubu Raya, 2016

Tabel 2.46.
CAGAR BUDAYA YANG SUDAH DILESTARIKAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Nama Cagar Budaya	Lokasi
1.	Makam Ismail Mundu	Kamp. Selat Remis, Kec. Teluk Pakedai
2.	Makam Panglima Raja Kubu	Desa Padang Tikar, Kec. Batu Ampar
3.	Keraton Kubu	Desa Kubu, Kec. Kubu
4.	Hien Bu Cheng Hua (Pekong Tengah Laut)	Sui Kakap, Kec.Sui Kakap
5.	Padogi	Sui Samak, Kec. Sui Ambawang
6.	Rumah Panjang (Betang)	Kamp. Lingga, Kec. Sui Ambawang
7.	Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya	Sui Raya, Kec. Sui Raya
8.	Makam Sultan Manggis	Suka Lanting, Kec. Sui Raya
9.	Guci	Desa Karik, Kec. Sui Ambawang
10.	Masjid Nasrullah	Teluk Pakedai, Kec.Teluk Pakedai

Sumber : Dinas Parakrafpora Bappeda Kubu Raya, 2016

2.3.2.12. Perpustakaan dan Kerasipan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan meskipun jumlah buku yang dipinjam mengalami penurunan. Hal ini bisa menjadi indikasi akan kurangnya minat baca masyarakat. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan di selama periode 2013-2016 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.47.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	957	1.023	554	2.446
2.	Jumlah Buku yang dipinjam (eks.)	10.799	10.799	11.909	4.609

Sumber : BPS Kubu Raya Tahun 2014-2017

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.48.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
1.	Produksi perikanan laut (ton)	18.162,6	19.852,20	46.872,25	23.506,90
2.	Produksi perikanan darat (ton)	274,30	290,50	294,02	355,30
3.	Kontribusi sektor pertanian (perikanan & kelautan) terhadap PDRB	16,34	14,66	13,30	12,72

Sumber : BPS Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2017

2.3.3.2. Pariwisata

Tabel 2.49.
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PARIWISATA

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
1.	Kunjungan wisatawan	57.855	59.908	60.647	426.137

Sumber : BPS Kubu Raya 2017

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Angka konsumsi rumah tangga per kapita dapat dianalogikan sebagai suatu Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita. Konsumsi per kapita merefleksikan kemampuan daya beli penduduk karena besaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk, akan dipengaruhi perkembangan harga atas inflasi. Sesuai hukum Maslow (*basic needs*), masyarakat akan terlebih dahulu mengutamakan kebutuhan akan pangan, diikuti kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan, kesehatan, serta penunjang lainnya.

Dengan angka kondisi ekonomi makro yang dibayangi dengan inflasi sebesar 5,17% akibat kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Kubu Raya cenderung meningkat, dibandingkan dengan tahun 2015 dimana dengan inflasi sebesar 6,63% pengeluaran masyarakat hanya sebesar 9.890,21. Pada tahun 2015 dengan rasio pengeluaran Rumah Tangga sebesar 116,21%, yang berarti kenaikan TDL, kendatipun berdampak pada daya beli akan tetapi relatif tidak terlalu mengganggu pengeluaran penduduk. Dengan membandingkan rata-rata pengeluaran terhadap inflasi, terlihat bahwa angka inflasi berpengaruh besar terhadap tingkat pengeluaran penduduk.

Tabel 2.50.
ANGKA KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Total Pengeluaran RT	8.029,73	8.804,92	9.890,21	11.052,21
2.	Jumlah RT	-	-	-	128.435
3.	Rasio	-	-	-	116,21

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

Sementara itu, rasio pengeluaran untuk keperluan non rumah tangga berfluktuatif dan rata-rata pengeluaran non makanan selama tahun 2013-2016 rasionya sebesar 46.98%. Pengeluaran konsumsi non makanan terbesar pada komponen perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya yaitu sebesar 7,90% dan transportasi/angkutan sebesar 7.58%. Komponen perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya serta transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat.

Tabel 2.51.
PERSENTASE KONSUMSI RUMAH TANGGA NON PANGAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	8.029,73	8.804,92	9.890,21	11.052,21
2.	Total Pengeluaran	3.642.286	4.153.281	4.714.663	5.275.220
3.	Rasio	45.36	47.17	47.67	47.73

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

Tabel 2.52.
PERSENTASE ANGKA KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA
BERDASARKAN PENGELUARAN YANG DILAKUKAN MASTARAKAT
TAHUN 2016

NO	Uraian	%
1.	Makanan dan Minuman Non Beralkohol	54.44
2.	Minuman Beralkohol dan Rokok	4.82
3.	Pakaian	4.97
4.	Perumahan,Air,Listrik,Gas dan Bahan Bakar Lainnya	7.90
5.	Perabotan,Peralatan rumah tangga dan pemeliharaan rutin rumah	2.94
6.	Kesehatan	2.82
7.	Transportasi/Angkutan	7.58
8.	Komunikasi	2.25
9.	Rekreasi dan Budaya	1.81
10.	Pendidikan	3.13
11.	Restoran dan Hotel	5.10
JUMLAH		100

Sumber : BPS Kubu Raya, Indikator Makro Pembangunan Ekonomi , 2016

Di sisi lain besarnya angka konsumsi berarti kemampuan investasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya menjadi relatif kecil, karena sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari prespektif ekonomi pembangunan (P Todaro), besarnya angka konsumsi justru kontra produktif dengan kemajuan daerah. Prosentase pengeluaran pangan di Kabupaten Kubu Raya cenderung menurun sementara pengeluaran non pangan cenderung meningkat. Dengan melihat perbandingan pengeluaran, secara umum dapat disimpulkan bahwa indeks kesejahteraan penduduk Kabupaten Kubu Raya secara bertahap sudah relatif semakin membaik.

Tabel 2.53.
PERSENTASE KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA PANGAN DAN
NON PANGAN KABUPATEN KUBU RAYA 2013-2016

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Prosentase Pengeluaran Pangan	54.64	52.83	52.33	52.27
2.	Prosentase Pengeluaran Non Pangan	45.36	47.17	47.67	47.73

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator seperti : penataan wilayah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, ketersediaan restoran, ketersediaan penginapan.

2.4.2.1. Ketersediaan Air Bersih

Secara umum, persentase rumah tangga yang sudah terinstalasi melalui jaringan PDAM mengalami peningkatan dari 2005-2016. Permasalahan utama PDAM selain dari aspek finansial, adalah upaya meningkatkan distribusi air secara merata kepada masyarakat.

Tabel 2.54.
ASPEK DAYA SAING BIDANG KETERSEDIAAN AIR BERSIH

No.	Prosentase menggunakan Air Bersih	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	RT berlangganan PDAM	11.405	13.065	13.877	14.871

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

2.4.2.2. Fasilitas Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada 2013-2016 terus meningkat. Pasokan daya listrik dari PLN melalui Jaringan Tegangan Rendah, di Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya dapat menjangkau wilayah-wilayah pedalaman. Pemenuhan rasio elektrifikasi khusus di wilayah pedalaman dilakukan melalui penyediaan PLTS serta dengan menggunakan genset secara mandiri oleh masyarakat.

Tabel 2.55.
ASPEK DAYA SAING BIDANG FASILITAS LISTRIK

No.	Prosentase menggunakan Listrik	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	RT menggunakan Listrik	31.679	33.932	36.069	38.222

Sumber : BPS Kubu Raya,2016

2.4.2.3. Ketersediaan Penginapan

Tabel 2.56.
ASPEK DAYA SAING BIDANG KETERSEDIAAN PENGINAPAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Hotel Berbintang	1	2	2	3
2.	Hotel Non Berbintang	1	1	1	1

Sumber : BPS Kubu Raya, 2016

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia, salah satunya dilakukan dengan melihat rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (di bawah usia 15 tahun dan di atas 64 tahun) dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Penduduk Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 berjumlah 554.881 jiwa, dengan tingkat ketergantungan sebesar 54%, berarti setengah penduduk Kabupaten Kubu Raya (usia 15-64 tahun) menanggung setengah lainnya (usia > 15 tahun dan > 64 tahun). Pada tahun 2016, *dependency ratio* penduduk Kabupaten Kubu Raya sedikit menurun sebesar 51,51%.

Tabel 2.57.
ASPEK DAYA SAING BIDANG KETENAGAKERJAAN

No.	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 thn	166.034	169.011	171.075	165.076
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 thn	19.778	20.131	20.376	23.538
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif	185.812	189.142	191.451	188.614
4.	Jumlah penduduk usia 15 thn - 64 thn	368.937	376.592	383.096	390.039
5.	Rasio Ketergantungan Penduduk	50	50	50	48,36

Sumber : BPS, KKR, 2016, PUK 2016* angka Proyeksi

Perkembangan angkatan kerja penduduk Kabupaten Kubu Raya

masih didominasi oleh angkatan kerja maksimum tamatan SD, SMP dan SMU. Kendatipun demikian terjadi pergeseran terhadap komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan, dimana proporsi angkatan kerja di tingkat pendidikan Diploma dan universitas, perkembangannya selama tahun 2014-2015, mengalami perkembangan yang besar dibandingkan dengan angkatan kerja di bawahnya. Rata-rata pertumbuhan angkatan kerja dengan pendidikan maksimum SD yang hanya sebesar 1,01%, merupakan indikasi positif karena pada tingkatan tersebut seharusnya harus didorong untuk melanjutkan pendidikannya. Ini juga merupakan indikasi, bahwa program wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Kubu Raya, berhasil dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.58.
ANGKATAN KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013-2015
(ORANG)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016*
Maksimum SD	128.450	131.818	118.019	106.491
SMTA	35.380	38.150	47.076	47.983
SMTA Umum	40.627	41.214	44.105	44.707
SMTA Kejuruan	17.109	18.994	23.534	24.146
Diploma	5.040	3.151	7.186	7.547
Universitas	9.408	11.491	19.314	20.656
Jumlah	236.014	244.818	259.234	251.531

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2016, 2016 merupakan angka proyeksi

Struktur ketenagakerjaan didominasi di sektor pertanian. Pada tahun 2015, persentase penduduk laki-laki berusia 15 tahun yang bekerja menurut lapangan usaha mencapai 446,61%. Penduduk yang bekerja selama tahun 2013-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 214.388 orang dan di tahun 2014 kembali meningkat sebanyak 229.686 orang. Persentase peningkatan penduduk yang bekerja dari tahun 2013-2014 di Kabupaten Kubu Raya sebesar 7,14%. Di tahun 2015 persentase peningkatan penduduk yang bekerja di Kabupaten Kubu Raya sebesar 5,96% atau menjadi sebanyak 243.386 orang. Secara umum dari tahun 2013-2015, jumlah pertambahan penduduk yang bekerja di

Kabupaten ini sebanyak 28.998 orang.

Walaupun daya serap tenaga kerja di 5 sektor tersebut di Kabupaten Kubu Raya cukup besar, akan tetapi dilihat dari tingkat skill yang dikuasai, proporsi daya serap tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu hanya berkisar 4-6%, dan selebihnya berspesifikasi umum dan tidak terampil. Dominasi proporsi daya serap tenaga kerja dengan tidak memerlukan tingkat keahlian tertentu terbesar pada kegiatan usaha pertanian, jasa penjualan dan pekerja kasar lainnya. Rata-rata tenaga kerja yang dipekerjakan di dua spesifikasi tersebut tahun 2016 masing-masing sekitar 14 %, 46% dan 20%.

Tabel 2.59.
PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013-2016
(ORANG)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Pertanian	84.554	111.984	113.444	111.660
Pertambangan	306	-	1.646	1.566
Industri	14.519	16.048	17.520	17.094
Listrik, Gas & Air	288	920	527	492
Bangunan	22.846	23.552	17.355	16.250
Perdagangan	49.332	45.898	47.026	46.128
Angkutan	9.843	3.722	7.805	7.142
Keuangan	2.684	2.059	2.750	2.725
Jasa	30.016	25.503	35.313	34.528
Jumlah	214.388	229.686	243.386	237.586

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2016, 2016 merupakan angka proyeksi

Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan serta kedudukan dalam struktur ketenagakerjaan. Pendidikan secara umum diperoleh tidak saja diperoleh di sektor formal akan tetapi melalui sektor informal (kursus, diklat, dan sebagainya). Tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan tertentu, memiliki keterkaitan dengan kecepatan dalam penguasaan keterampilan maupun keahlian yang akan menunjang pekerjaannya.

Penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kubu Raya, sebagian besar merupakan pekerja dengan

tamatan SD. Persentase pekerja dengan pendidikan maksimum SD proporsinya 50% dari jumlah tenaga kerja yang bekerja. Sementara itu, ditingkat pekerja dengan pendidikan menengah kejuruan, walupun terjadi peningkatan daya serap tenaga kerja di bursa kerja atau pasar kerja, akan tetapi peningkatannya masih relatif kecil, dibandingkan dengan penduduk bekerja dengan tamatan SD,SMP dan SMU umum.

Tabel 2.60.
PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013-2016
(ORANG)

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016
Maksimum SD	122.924	126.742	115.919	104.743
SMTp	30.689	35.494	43.818	45.167
SMTA Umum	31.464	38.105	37.815	39.071
SMTA Kejuruan	15.453	17.252	21.525	22.483
Diploma	4.712	3.151	7.186	7.272
Universitas	9.146	8.942	17.123	18.850
Jumlah	214.388	229.686	243.386	237.586

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2015

78

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat mendorong dan menstimulasi perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangan-perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermafaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya khususnya Tahun 2014-2016, dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya periode Tahun 2014-2016 berdasarkan data kinerja keuangan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 diperoleh dari Laporan Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut :

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada sub pembahasan ini dijabarkan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.1.1.1. Pendapatan

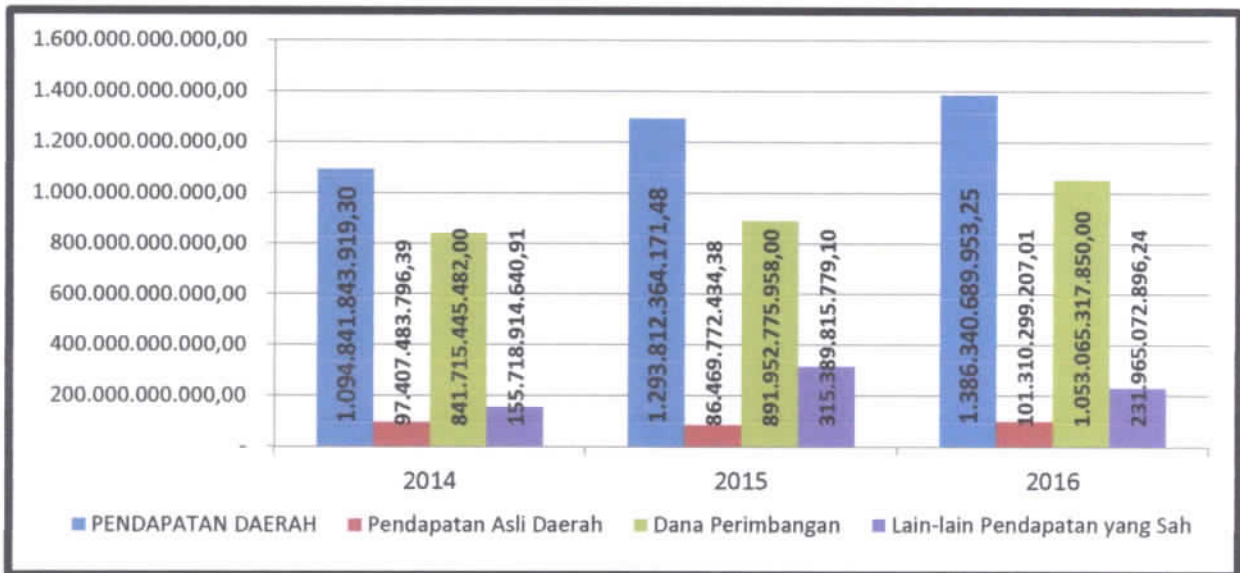
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Realisasi pendapatan Kabupaten Kubu Raya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertum- buhan (%)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.094.841.843.919,30	1.293.812.364.171,48	1.386.340.689.953,25	8,19
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	97.407.483.796,39	86.469.772.434,38	101.310.299.207,01	1,32
1.1.1	Pajak Daerah	64.729.599.444,05	54.285.086.430,52	67.629.094.584,60	1,47
1.1.2	Retribusi Daerah	25.180.126.655,62	6.003.747.900,46	6.645.572.802,78	-35,86
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	563.736.663,41	1.724.724.757,82	2.117.382.258,00	55,44
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	6.934.021.033,31	24.456.213.345,58	24.918.249.561,63	53,17
1.2.	Dana Perimbangan	841.715.445.482,00	891.952.775.958,00	1.053.065.317.850,00	7,75
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	59.938.735.482,00	38.796.383.958,00	26.471.101.564,00	-23,85
1.2.2	Dana Alokasi Umum	699.700.430.000,00	732.770.242.000,00	787.062.196.000,00	3,99
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	82.076.280.000,00	120.386.150.000,00	239.532.020.286,00	42,91
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	155.718.914.640,91	315.389.815.779,10	231.965.072.896,24	14,21
1.3.1	Hibah	2.962.933.000,00	67.074.250.000,00	98.590.639.189,24	221,64
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah Lain-nya	27.118.612.640,91	68.862.470.779,10	38.684.149.707,00	12,57
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	170.479.095.000,00	77.211.484.000,00	-32,70
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	8.974.000.000,00	12.478.800.000,00	17,92
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	125.637.369.000,00	-	5.000.000.000,00	-80,05

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu Tahun 2014-2016 mengalami kenaikan dari Rp. **1.094.841.843.919,30** Tahun 2014 menjadi Rp. **1.386.340.689.953,25** Tahun 2016 atau meningkat rata-rata pertumbuhan mencapai **8,19%**, dengan proporsi peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **1,32%**, Dana Perimbangan sebesar **7,75%**, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **14,21%** yang memberikan kontribusi terbesar rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun, apabila dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan bahwa sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari Dana Perimbangan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki peringkat ketiga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya masih tergantung pada pusat melalui Dana Perimbangan.

3.1.1.2. Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung:

- 1) Belanja Pegawai.
- 2) Belanja Bunga.
- 3) Belanja Subsidi.
- 4) Belanja Hibah.
- 5) Belanja Bantuan Sosial.
- 6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa.

- 7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan.
 - 8) Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung:
- 1) Belanja Pegawai.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa.
 - 3) Belanja Modal.

Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan Anggaran Kinerja (*Performance Budget*), yaitu Belanja Daerah berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.
REALISASI BELANJA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertum- buan (%)
1.	Belanja Daerah	1.034.435.209.629,33	1.308.457.979.940,00	1.312.796.446.926,06	8,27
1.1.	Belanja Tidak Langsung	492.507.388.266,33	602.949.645.810,00	701.293.442.050,00	12,50
1.1.1.	Belanja Pegawai	459.863.440.395,00	528.724.696.223,00	538.676.298.768,00	5,41
1.1.2.	Belanja Hibah	4.766.077.440,00	4.688.000.000,00	8.919.439.025,00	23,23
1.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	2.961.527.608,33	1.271.525.585,00	825.199.000,00	-34,68
1.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	24.688.805.000,00	68.265.424.002,00	145.328.885.200,00	80,56
1.1.6.	Belanja Tidak terduga	227.537.823,00	-	7.543.620.057,00	475,79
1.2.	Belanja Langsung	541.927.821.363,00	705.508.334.130,00	611.503.004.876,06	4,11
1.2.1.	Belanja Pegawai	48.813.960.114,00	44.464.306.041,00	46.120.205.650,00	-1,87
1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.298.581.264,00	294.845.345.559,00	264.535.097.640,06	13,63
1.2.3.	Belanja Modal	312.815.279.985,00	366.198.682.530,00	300.847.701.586,00	-1,29

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.2. tersebut di atas diketahui bahwa selama periode Tahun 2014-2016, rata-rata realisasi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar **8,27%**, dengan proporsi Belanja Tidak Langsung rata-rata pertumbuhannya meningkat sebesar **12,50%**, sedangkan proporsi Belanja Langsung rata-rata pertumbuhannya meningkat sebesar **4,11%**. Disamping itu juga terdapat komponen rincian Belanja Daerah, terutama Belanja Bantuan Sosial turun rata-rata mencapai **-34,68%**, Belanja Pegawai dalam komponen Belanja Langsung turun rata-rata sebesar **-1,87%**, dan Belanja Modal turun rata-rata sebesar **-1,29%**. Rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi dari komponen Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Bantuan

Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang mencapai **80,56%**. Terjadinya peningkatan alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah yang dipungut dikembalikan ke Pemerintah Desa minimal 10% secara bertahap sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Untuk komponen Realisasi Belanja Langsung yang mengalami kenaikan cukup besar rata-rata pertumbuhannya adalah komponen Belanja Barang dan Jasa sebesar **13,63%**, serta Belanja Modal rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar **-1,29%**. Berdasarkan data Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 tersebut di atas, diketahui bahwa laju rata-rata pertumbuhan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diketahui bahwa Laju rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah dalam kurun waktu Tahun 2014-2016 mencapai **8,27%** lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah hanya sebesar **8,19%**.

Adapun proporsi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3.
PERBANDINGAN PROPORSI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

Uraian	Tahun 2014 (%)	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)
Belanja Tidak Langsung	45,68%	48,77%	57,63%
Belanja Langsung	54,32%	51,23%	42,37%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.3. tersebut diketahui bahwa proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung kecenderungannya meningkat dibandingkan dengan Belanja Langsung dari Tahun 2014 mencapai **45,68%** menjadi **57,63%** Tahun 2016 atau rata-rata meningkat sebesar **8,05%**, sedangkan proporsi Belanja Langsung kecenderungannya menurun dari **54,32%** Tahun 2014 menjadi **42,37%** Tahun 2016, yang rata-rata penurunannya mencapai **-7,95%**.

3.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkan kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.	Pembiayaan Daerah	1.210.627.130,32	58.206.161.419,39	6.937.467.020,87	78,95
3.1.	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	43.560.545.650,87	74,41
3.1.1.	Penggunaan Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	8.210.627.130,32	61.617.261.419,39	43.560.545.650,87	74,41
3.2.	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	3.411.100.000,00	36.623.078.630,00	73,60
3.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	2.500.000.000,00	36.623.078.630,00	73,60
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang		911.100.000,00		0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.4. tersebut di atas dapat diketahui realisasi penerimaan pembiayaan daerah dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2014 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 8.210.627.130,32, naik pada Tahun 2015 menjadi Rp. 61.617.261.419,39 serta Tahun 2016 menjadi Rp. 43.560.545.650,87, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai **74,41 %**, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2014 pengeluaran sebesar Rp. 7.000.000.000,00, turun menjadi Rp. 3.411.100.000,00 pada Tahun

2015, dan naik kembali menjadi Rp. 36.623.078.630,00 pada Tahun 2016, dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai **73,60%**. Secara umum Pembiayaan Daerah meningkat rata-rata pertumbuhannya mencapai **78,95%**.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan Neraca Daerah menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur (pemberi pinjaman) kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau asset daerah dan kewajiban serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari Neraca Daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan rata-rata pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5.
RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

Nomor	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Neraca Daerah				
1.	Aset	1.927.576.942.888,64	1.856.551.691.794,80	2.112.568.599.035,70	3,10
1.1.	Aset Lancar	127.932.874.300,19	86.151.424.095,08	125.531.866.493,75	-0,63
	1. Kas dan Setara	61.617.261.419,39	43.562.487.842,87	80.520.135.381,06	
	2. Investasi Jangka Pendek		-	-	
	3. Piutang Pendapatan	41.498.285.752,65	50.050.936.528,72	53.822.391.776,45	
	4. Piutang Lainnya	17.439.152.505,00	8.817.501.213,20	12.021.756.173,20	
	5. Penyisihan Piutang	-	(25.120.741.735,78)	(29.208.399.424,33)	
	6. Beban Dibayar Dimuka	-	896.867.373,72	988.429.809,72	
	7. Persediaan	7.378.174.623,15	7.944.372.872,35	7.387.552.777,65	
	8. Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	
1.2.	Investasi Jangka Panjang	9.500.000.000,00	12.000.000.000,00	48.623.078.630,00	72,33
	1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	
	2. Investasi Jangka Panjang Permanen	9.500.000.000,00	12.000.000.000,00	48.623.078.630,00	
1.3.	Aset Tetap	1.782.740.813.533,47	1.750.214.221.060,73	1.837.853.469.624,45	1,02
	1. Tanah	99.680.110.328,33	104.868.520.603,33	110.202.161.373,33	
	2. Peralatan dan Mesin	134.698.648.789,04	186.901.918.240,03	196.937.364.107,02	
	3. Gedung dan Bangunan	512.606.101.215,92	613.102.100.792,23	599.970.218.863,86	
	4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	983.350.620.132,32	1.204.411.971.508,66	1.416.793.229.880,66	
	5. Aset Tetap Lainnya	35.190.450.694,99	45.039.184.863,99	45.341.640.502,99	

Nomor	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	17.214.882.372,87	19.025.298.650,00	10.924.866.650,00	
	7. Akumulasi Penyusutan	-	(423.134.773.597,51)	(542.316.011.753,41)	
1.4.	Dana Cadangan				0
	1. Dana Cadangan	-	-	-	
1.5.	Aset Lainnya	7.403.255.054,98	8.186.046.638,99	100.560.184.287,50	138,60
	1. Tagihan Jangka Panjang	-	220.165.300,00	-	
	2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	
	3. Aset Tidak Berwujud	5.800.234.439,25	6.539.762.715,25	1.502.681.309,38	
	4. Aset Lain-lain	1.603.020.615,73	1.426.118.623,74	99.057.502.978,12	
2.	Kewajiban	14.322.194.998,00	23.449.021.064,85	14.386.344.901,21	0,15
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	14.322.194.998,00	23.449.021.064,85	14.386.344.901,21	0,15
	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Plk)	434.651.370,00	1.942.192,00	38.425.333,00	
	2. Utang Bunga	-	-	-	
	3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	
	4. Pendapatan Diterima Dimuka	-	381.381.525,85	349.430.729,21	
	5. Utang Beban/ Utang Belanja	-	3.158.894.953,00	1.889.441.038,00	
	6. Utang Jangka Pendek Lainnya	13.887.543.628,00	19.906.802.394,00	12.109.047.801,00	
2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	
	1. Utang Dalam Negeri	-	-	-	
	2. Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	
3.	Ekuitas	1.580.837.428.937,35	1.833.102.670.729,95	2.098.182.254.134,49	9,90

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 tersebut di atas, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan aset daerah dari Tahun 2014-2016 mencapai **3,10%**, sedangkan kewajiban daerah rata-rata pertumbuhannya mencapai **0,15%**, dan ekuitas rata-rata pertumbuhannya mencapai **9,90%**.

Adapun analisis rasio keuangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6.
ANALISIS RASIO KEUANGAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Rasio Lancar	893,25%	367,40%	872,58%
2	Rasio Quick	893,25%	367,40%	872,58%
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,74%	1,26%	0,68%
4	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,91%	1,28%	0,69%
5	Rata-rata Umur Piutang	-	-	-
6	Rata-rata Umur Persediaan	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2014-2016

Pendapatan Daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah, harus mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam mengali penerimaan daerah dan struktur ekonomi masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis, yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi, akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah, terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan eksistensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke tiga;
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan Dana Daerah;
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sebagaimana amanat dari wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan aktiitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi, bantuan pusat, belanja bantuan hibah, maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan. Sedangkan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, yang dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian daerah kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga). Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu, sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, bahwa Anggaran Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian;

5. Fungsi distribusi, artinya anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, artinya anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Namun, dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2014-2016 adalah data yang telah diaudit oleh BPK RI, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD.

Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Kubu Raya terhitung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun APBD Kabupaten Kubu Raya masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik, karena keterbatasan anggaran dan peningkatan proporsi belanja tidak langsung.

Berkaitan dengan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.7. sebagai berikut :

Tabel 3.7.
ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	T.A	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp).	Prosentase
1	2014	508.677.400.509,00	1.116.513.591.138,56	45,56
2	2015	573.189.002.264,00	1.340.741.707.810,00	42,75
3	2016	584.796.504.418,00	1.424.174.304.024,13	41,06

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Total Belanja untuk pemenuhan belanja aparatur Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 meningkat. Total Pengeluaran yaitu Belanja Daerah ditambah Pembiayaan Pengeluaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 meningkat progresif. Berdasarkan prosentase proporsi kebutuhan aparatur pada Tabel 3.7 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tahun 2014 Belanja Daerah yang digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur sebesar **45,56%**. Tahun 2015 menjadi **42,75%**, turun sebesar **2,81%**, dan pada Tahun 2016 turun menjadi **41,06%** atau sebesar **1,69%** dari Tahun 2015. Jadi kecenderungan proporsi Belanja Aparatur menurun dalam kurun waktu 2014-2016 rata-rata sebesar **2,25%**, namun dari aspek jumlah anggaran belanja aparatur semakin meningkat setiap tahunnya.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit pada penganggaran dikenal adanya Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, maupun pada Tahun Anggaran-Tahun Anggaran berikutnya. Adapun Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Berkaitan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8.
DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun (Rp)		
		2014	2015	2016
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.094.841.843.919,30	1.293.812.364.171,48	1.386.340.689.953,25
Dikurangi:				
2	Belanja Daerah	1.034.435.209.629,33	1.308.457.979.940,00	1.312.796.446.926,06
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	3.411.100.000,00	36.623.078.630,00
A	Surplus Riil	53.406.634.289,97	-18.056.715.768,52	36.921.164.397,19
Realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
1	SiLPA T.A. Sebelumnya	8.210.627.130,32	61.617.261.420,29	43.560.545.650,87
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	8.210.627.130,32	61.617.261.420,29	43.560.545.650,87
A+B	SiLPA Tahun Berkenaan	61.617.261.420,29	43.560.545.650,87	80.481.710.048,06

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.8 tersebut di atas diketahui bahwa pada Tahun 2014-2016, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki **SiLPA** yang cukup sebagai akumulasi dari **surplus riil** dengan **total realisasi pembiayaan daerah**, yang menunjukkan fluktuasi, yaitu Rp. 61.617.261.420,29 pada Tahun 2014, menjadi Rp. 43.560.545.650,87 pada Tahun 2015, dan menjadi Rp. 80.481.710.048,06. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya cukup kuat untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.9 :

Tabel 3.9.
KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN
KABUPATEN KUBU RAYA 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (%)	Tahun 2015 (%)	Tahun 2016 (%)
1.	SiLPA T.A. Sebelumnya	0,08	4,76	3,14
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.9 tersebut di atas, diketahui bahwa komponen untuk menutup defisit anggaran Tahun 2014-2016 hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya yang prosentase kontribusi menutupi defisit anggaran berfluktuasi. Pada Tahun 2014 sebesar **0,08%** meningkat pada Tahun 2015 sebesar **4,76%**, dan Tahun 2016 kontribusinya turun menjadi **3,14%**. Jadi rata-rata kontribusi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dalam menutupi defisit anggaran sebesar **2,66%**.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggara (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran. SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Kubu Raya sebagian besar berasal dari tertundanya Belanja Langsung program dan kegiatan. Hasil evaluasi dari SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana ke depan agar Kabupaten Kubu Raya dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan, sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Kubu Raya dapat diperkecil.

Adapun realisasi SiLPA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10
REALISASI SiLPA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2016

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1.	Jumlah SiLPA T.A. sebelumnya	8.210.627.130,32	61.617.261.420,29	43.560.545.650,87

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016

Berdasarkan Tabel 3.10 tersebut di atas, Tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi SiLPA. Terhitung SiLPA Tahun 2014 berjumlah Rp. 8.210.627.130,32, pada Tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 61.617.261.419,39, dan Tahun 2016 menurun menjadi Rp. 43.560.545.650,87.

3.3. Kerangka Pendanaan

Gambaran kerangka pendanaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2019 dalam RPJMD Perubahan ini menggunakan analisis tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Tahun 2014-2016 sebagai dasar estimasi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017-2019.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.11. sebagai berikut :

Tabel 3.11.
PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016-2019

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	PENDAPATAN	2,94%	1.386.340.689.953,25	1.404.722.053.434,43	1.469.088.373.506,31	1.512.296.327.275,49
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	16,07%	101.310.299.207,01	208.749.826.028,43	136.495.293.720,31	158.434.485.229,26
1.1.1.	Pajak daerah	18,80%	67.629.094.584,60	113.686.725.465,28	95.450.000.000,00	113.395.837.401,01
1.1.2.	Retribusi daerah	7,69%	6.645.572.802,78	10.900.974.165,00	7.706.961.285,31	8.299.626.640,29
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	46,57%	2.117.382.258,00	3.341.143.372,00	4.548.578.290,00	6.666.745.499,40
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7,49%	24.918.249.561,63	80.820.983.026,15	28.789.754.145,00	30.945.547.351,44
1.2.	Dana Perimbangan	4,22%	1.053.065.317.850,00	1.043.885.758.961,00	1.143.923.842.000,00	1.192.251.871.430,11

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	3,74%	26.471.101.564,00	20.135.986.681,00	28.486.594.000,00	29.551.176.900,77
1.2.2.	Dana alokasi umum	-0,28%	787.062.196.000,00	779.055.508.000,00	782.647.725.000,00	780.449.783.147,48
1.2.3.	Dana alokasi khusus	17,87%	239.532.020.286,00	244.694.264.280,00	332.789.523.000,00	392.258.785.264,91
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-9,81%	231.965.072.896,24	152.086.468.445,00	188.669.237.786,00	170.153.287.115,70
1.3.1	Hibah	-100,00%	98.590.639.189,24	1.710.402.750,00		-
1.3.2	Dana darurat					-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	16,67%	38.684.149.707,00	44.545.676.695,00	52.652.392.786,00	61.427.188.890,15
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	-100,00%	77.211.484.000,00	-		-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-100,00%	12.478.800.000,00	-		-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	129,13%	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	26.250.000.000,00	60.146.305.996,30
1.3.7	Dana Desa	49,42%	-	98.330.389.000,00	109.766.845.000,00	164.012.856.150,21
2	BELANJA	6,51%	1.312.796.446.926,06	1.402.898.121.931,88	1.489.163.569.226,31	1.639.904.991.516,83
2.1	Belanja Tidak Langsung	8,20%	701.293.442.050,00	716.000.978.363,00	821.018.601.809,31	888.340.795.304,56
2.1.1	Belanja Pegawai	1,49%	538.676.298.768,00	507.401.696.500,00	554.815.751.959,31	563.065.917.822,40
2.1.2	Belanja Bunga	41,42%			1.110.000.000,00	1.569.777.054,23
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00%				-
2.1.4	Belanja Hibah	162,91%	8.919.439.025,00	13.441.420.000,00	61.653.208.550,00	162.093.184.329,83
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	55,29%	825.199.000,00	1.295.000.000,00	1.990.000.000,00	3.090.297.340,29
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	116,10%		8.184.404.600,00	19.110.696.200,00	41.298.684.236,01
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	11,86%	145.328.885.200,00	180.323.787.100,00	181.838.945.100,00	203.401.608.880,17
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-74,25%	7.543.620.057,00	5.354.670.163,00	500.000.000,00	128.725.652,89
2.2	Belanja Langsung	4,53%	611.503.004.876,06	686.897.143.568,88	668.144.967.417,00	752.266.229.760,41
2.2.1	Belanja Pegawai	13,42%	46.120.205.650,00	57.085.914.400,00	59.329.998.000,00	67.292.379.109,31
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,48%	264.535.097.640,06	373.637.834.631,88	299.923.520.590,00	319.355.306.932,98
2.2.3	Belanja Modal	1,33%	300.847.701.586,00	256.173.394.537,00	308.891.448.827,00	366.855.787.012,91
3	PEMBIAYAAN	70,11%	6.937.467.020,87	84.176.409.348,01	20.075.195.720,00	34.149.882.700,56
3.1	Penerimaan Pembiayaan	9,34%	43.560.545.650,87	89.686.579.348,01	52.075.195.720,00	56.937.672.584,91
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-6,52%	36.623.078.630,00	5.510.170.000,00	32.000.000.000,00	29.912.143.992,27

Berdasarkan Tabel 3.11. tersebut di atas, diketahui bahwa secara umum proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2019 kecenderungan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,94%.

Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 mengacu pada APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 1.386.340.689.953,25, sebagai *base-line* data

untuk menyusun proyeksi 3 tahun ke depan, maka angka proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp. 1.404.722.053.434,43, dan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.469.088.373.506,31 serta Tahun 2019 sebesar Rp. 1.512.296.327.275,49.

Proyeksi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017-2019 dengan pertimbangan bahwa pada Tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dan Kabupaten Kubu Raya termasuk pertumbuhan ekonomi yang cukup berada di atas Provinsi dan Nasional, serta kebijakan Pemerintah Pusat yang mendorong pembangunan dimulai dari daerah pinggiran, daerah perbatasan, terdepan, terluar dan daerah terpencil, dan disamping itu juga untuk Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kubu Raya difokuskan pembangunan konektivitas wilayah, ketahanan pangan dan energi, serta pemukiman dan perumahan sehingga alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat meningkat yang berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017-2019.

Untuk proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat rata-rata sebesar 16,07% sehingga proyeksi untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 208.749.826.028,43. Tahun 2018 sebesar Rp. 136.495.293.720,31 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 158.434.485.229,26.

Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diproyeksi meningkat relatif kecil rata-rata sebesar 4,22%, sehingga pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 1.043.885.758.961,00. Tahun 2018 menjadi Rp. 1.143.923.842.000,00 dan Tahun 2019 diproyeksi peningkatannya sebesar Rp. 1.192.251.871.430,11. Dana perimbangan ini sebagian besar digunakan untuk Belanja Pegawai.

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperkirakan terjadi fluktuasi dan diproyeksikan mengalami penurunan yang cukup signifikan, rata-rata sebesar -9,81%. Pada Tahun 2016 sebesar Rp. 231.965.072.896,24 menurun pada Tahun 2017 sebesar Rp. 152.086.468.445,00. Tahun 2018 sebesar Rp. 188.669.237.786,00 dan pada Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 170.153.287.115,70.

Adapun Belanja Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,51%, maka diproyeksikan Tahun 2017 sebesar Rp. 1.402.898.121.931,88 Tahun 2018 sebesar

Rp. 1.489.163.569.226,31 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 1.639.904.991.516,83. Apabila dibandingkan pendapatan daerah dengan belanja daerah, terjadi ketidakseimbangan, disatu sisi trend pendapatan daerah diproyeksikan rata-rata meningkat hanya 2,94%, sedangkan proyeksi belanja kecenderungan trendnya naik mencapai 6,51% dengan perbandingan mencapai 2,94 : 6,51 atau dengan kata lain laju kebutuhan anggaran belanja daerah meningkat mencapai hampir 2,2 kali lipat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan anggarannya (pendapatan daerah).

Untuk belanja tidak langsung diproyeksikan Tahun 2017 sebesar Rp. 716.000.978.363,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 821.018.601.809,31 serta Tahun 2019 sebesar Rp. 888.340.795.304,56 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 8,20%, sedangkan proyeksi Belanja Pegawai dalam komponen Belanja Tidak Langsung diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 1,49%. Pada Tahun 2016 dialokasi sebesar Rp. 538.676.298.768,00, maka pada Tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 507.401.696.500,00, dan Tahun 2018 sebesar Rp. 554.815.751.959,31 serta Tahun 2019 sebesar Rp. 563.065.917.822,40. Untuk Alokasi anggaran komponen Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017-2019 diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 49,42%. Pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 98.330.389.000,00. Tahun 2018 sebesar Rp. 109.766.845.000,00, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 164.012.856.150,21.

Belanja Langsung diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,53% dari Rp. 611.503.004.876,06 Tahun 2016, sehingga diproyeksikan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 686.897.143.568,88 Tahun 2018 sebesar Rp. 668.144.967.417,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 752.266.229.760,41.

Penerimaan pembiayaan daerah mengalami fluktuasi, diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 9,34% dari Rp. 43.560.545.650,87 Tahun 2016, maka pada Tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 89.686.579.348,01 Tahun 2018 sebesar Rp. 52.075.195.720,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 56.937.672.584,91.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk mengetahui gambaran perhitungan kerangka pendanaan Tahun 2016-2019 dapat dilihat dari Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2016-2019.

Tabel 3.12.
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016-2019

No	Uraian	Proyeksi			
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Pendapatan	1.386.340.689.953,25	1.404.722.053.434,43	1.469.088.373.506,31	1.512.296.327.275,49
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	43.560.545.650,87	80.481.710.048,06	52.075.195.720,00	56.937.672.584,91
	Total penerimaan	1.429.901.235.604,12	1.485.203.763.482,49	1.521.163.569.226,31	1.569.233.999.860,40
	Dikurangi:				
4.	Belanja Tidak Langsung	701.293.442.050,00	716.000.978.363,00	821.018.601.809,31	888.340.795.304,56
5.	Pengeluaran Pembiayaan	36.623.078.630,00	5.510.170.000,00	32.000.000.000,00	29.912.143.992,27
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	691.984.714.924,12	763.692.615.119,49	668.144.967.417,00	650.981.060.563,57

Berdasarkan Tabel 3.12 tersebut di atas, diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2019 mengalami fluktuatif. Tahun 2016 mencapai Rp. 691,984.714.924,12 sedangkan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 763.692.615.119,49 Tahun 2018 sebesar Rp. 668.144.967.417,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 650.981.060.563,57. Rata-rata penurunan kapasitas riil kemampuan keuangan sebesar -2,02%.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2017-2019 yang sangat terbatas tersebut, diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis yang menjadi tanggung Bupati bersama SKPD terkait yang dikelompokkan ke dalam Prioritas I yang meliputi pencapaian indikator sasaran strategis pada Misi I, Prioritas II yang meliputi pencapaian indikator sasaran strategis pada Misi II, dan Prioritas III yang meliputi pencapaian indikator sasaran strategis pada Misi III, serta Prioritas IV yang meliputi pencapaian indikator sasaran strategis pada Misi IV.

Tabel 3.13.
RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

No	Uraian	Proyeksi			
		2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	691.984.714.924,12	763.692.615.119,49	668.144.967.417,00	650.981.060.563,57



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten baru hasil pemekaran tahun 2007, baru melakukan satu tahapan RPJMD dari empat tahapan RPJMD yang direncanakan dalam RPJPD 2009-2029. Pembangunan yang dilakukan masih bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan dasar. Rentang geografis wilayah yang luas juga mempengaruhi pencapaian target pembangunan di daerah menjadi tidak optimal ditambah dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan yang belum memadai. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan utama adalah :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kubu Raya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 65,54 yang masih berada dibawah Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, serta tingkat kemiskinan mencapai 5,04% dan tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 6,02%.
2. Meningkatnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2015 mencapai 0,14% , pada tahun 2016 mencapai 0,34% dan pada tahun 2017 mencapai 0,3%.
3. Ketersediaan infrastruktur wilayah belum merata baik aspek kualitas maupun kuantitas, sehingga berpengaruh pada rendahnya interkonektivitas antar kecamatan dan desa, serta masih tingginya tingkat kesenjangan sosial ekonomi dan wilayah.
4. Belum efektifnya penerapan tata kelola pemerintahan serta belum tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai.

4.1.1. Identifikasi Lingkungan Internal

4.1.1.1. Kekuatan Daerah

1. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, sebagai aset dan potensi pembangunan;
2. Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beranekaragam, yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata dan sektor lainnya;
3. Secara geografis, Kabupaten Kubu Raya memiliki posisi yang sangat strategis yaitu sebagai Hinterland Kota Pontianak yang merupakan

Ibukota Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Pontianak Metropolitan Area (PMA) pada RTRW Nasional yang berpotensi untuk pengembangan wilayah perkotaan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Kubu Raya terutama sektor Perdagangan dan Jasa (Hotel, Restoran, Properti, dan lain-lain), serta akses wilayah perairan berbatasan langsung dengan Selat Karimata yang berpotensi untuk pengembangan sektor kelautan, termasuk pengembangan pelabuhan laut, tol laut dan lain-lain;

4. Kabupaten Kubu Raya sebagai beranda terdepan Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan terdapat Bandara Internasional Supadio dan Terminal Antar Lintas Batas Negara (Terminal ALBN) Sungai Ambawang dan Pelabuhan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya. Selain itu terdapat pula fasilitas strategis nasional seperti pangkalan TNI-AU dan Markas KODAM XII/Tanjungpura yang menunjang stabilitas keamanan dan pengembangan wilayah perkotaan;
5. Masyarakat yang multi etnis/heterogen yang memiliki keberagaman budaya sebagai aset, potensi dan modal sosial pembangunan daerah;
6. Potensi sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah.

4.1.1.2. Kelemahan Daerah

1. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dengan kualitas sumber daya manusia rendah;
2. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur dasar belum memadai yang berdampak terhadap pengembangan wilayah dan pelayanan publik belum optimal;
3. Belum dimanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam sebagai sumber pendapatan daerah;
4. Tingkat pengangguran yang tinggi dan minimnya perluasan lapangan pekerjaan yang dapat diserap oleh angkatan kerja ;
5. Belum optimalnya kinerja dan kompetensi aparatur;
6. Menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat kegiatan pemanfaatan/eksploitasi sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan hidup;
7. Rendahnya produktivitas, pengolahan dan pemasaran hasil sumber daya alam;

8. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, lapangan pekerjaan penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya.

4.1.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal

4.1.2.1. Peluang Daerah

1. Kerjasama/kemitraan dalam skala lokal, regional, nasional dan global antara pemerintah, swasta, lembaga masyarakat non pemerintah dan dunia usaha dalam percepatan pembangunan wilayah terbuka luas, dan cukup besar;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, pangan dan kebijakan lainnya dalam rangka pemberdayaan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah pinggiran, terdepan, terluar, terpencil dan terisolir;
3. Komitmen Global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Program Percepatan Pembangunan melalui Penetapan Kawasan-kawasan Strategis dan kawasan lainnya, akan memberikan dampak ikutan bagi Kabupaten Kubu Raya;
5. Perekonomian regional, nasional bahkan internasional yang dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan;
6. Karakteristik masyarakat yang terbuka dan dinamis;
7. Pertumbuhan ekonomi regional yang relatif tinggi;
8. Kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), AFTA, dan lain-lain berdampak pada perekonomian daerah.

4.1.2.2. Ancaman Daerah

1. Dampak negatif globalisasi yang dapat mempengaruhi budaya dan nilai kearifan lokal masyarakat;
2. Pemberlakuan Zona Bebas Perdagangan (*Free Trade Zone*) mengakibatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang akan memberikan determinansi terhadap pasar lokal;
3. Arus informasi yang bersifat negatif sulit dihindarkan akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat;

4. Perubahan iklim dan pemanasan global berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat;
5. Krisis ekonomi, pangan dan energi dunia yang berdampak pada melemahnya/melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian utama dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan isu strategis berdasarkan pada 5 (lima) prioritas/fokus pembangunan, yang meliputi :

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
2. Peningkatan Infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah
3. Penerapan Sistem dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Terbuka
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Budaya dan Mental Spiritual
5. Peningkatan Pendapatan Daerah

4.2.1. Isu Strategis Bidang Ekonomi

Permasalahan umum terkait dengan aspek perekonomian dapat dilihat dari urusan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan dalam bidang ekonomi diarahkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu juga tingkat kebutuhan energi, tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya lapangan kerja yang tersedia serta belum optimalnya pengembangan sektor-sektor yang berpotensi dapat mendorong pembangunan sektor ekonomi daerah,

seperti sektor pertambangan, pariwisata, perikanan dan pertanian. Pembangunan ekonomi wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap sektor unggulan komparatif wilayah. Isu-isu strategis Bidang Ekonomi, antara lain meliputi :

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka;
2. Rendahnya tingkat produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

4.2.2. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya

Pembangunan dalam bidang sosial budaya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama berhubungan dengan derajat pendidikan dan kesehatan. Isu-isu strategis bidang sosial budaya, meliputi :

1. Belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar masyarakat;
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan terbuka.

4.2.3. Isu Strategis Bidang Infrastruktur

Isu strategis bidang infrastruktur :

1. Belum terbangunnya konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa;
2. Belum optimalnya pengelolaan pengairan, jaringan irigasi/rawa;
3. Rendahnya pelayanan jaringan air bersih, persampahan, listrik dan sanitasi lingkungan;
4. Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup;

Dari analisis isu-isu strategis sebagaimana diuraikan di atas, akan dilakukan analisis *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats* (SWOT) Kabupaten Kubu Raya sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.
ANALISIS SWOT KABUPATEN KUBU RAYA

SWOT	<u>Strengths (S)</u>	<u>Weaknesses (W)</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dengan sumber daya manusia yang berkualitas; 2. Sumber daya alam melimpah; 3. Industri pengolahan hasil sumber daya alam tersebut di atas memberikan kontribusi terbesar pada PDRB; 4. Posisi geografis wilayah yang strategis; 5. Keberadaan fasilitas strategis; 6. Kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman budaya; 7. Potensi partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan; 8. Potensi sumber PAD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk besar dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah; 2. Infrastruktur yang terbatas; 3. Masih terbatasnya PAD; 4. Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal; 5. Pembangunan ekonomi belum merata; 6. Tingkat pengangguran tinggi dan lapangan pekerjaan minim; 7. Belum optimalnya kompetensi dan kinerja aparatur ; 8. Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup; 9. Rendahnya produktivitas pengelolaan sumber daya alam; 10. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, lapangan pekerjaan, penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas lainnya.

r
d
f

Opportunities (O)	S + O	W + O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dalam skala lokal, regional, nasional dan global antara pemerintah, swasta, lembaga masyarakat non pemerintah dan dunia usaha dalam pembangunan wilayah yang terbuka, luas, dan cukup besar; 2. Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebijakan lainnya dalam pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah terluas, terdepan, terpencil, dan terisolir; 3. Komitmen global dalam SDGs; 4. Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Kawasan-kawasan Strategis dan kawasan lainnya; 5. Perekonomian regional, nasional dan internasional yang mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan. 6. Karakteristik masyarakat yang terbuka dan dinamis; 7. Pertumbuhan ekonomi regional yang relatif tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan jumlah penduduk yang besar, multi etnis dan sumber daya alam yang melimpah dioptimalkan dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan dunia usaha dalam skala lokal, regional, nasional dan global untuk memacu pembangunan wilayah; 2. Mengoptimalkan program kebijakan pemerintah pusat dan provinsi di segala bidang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan kerjasama dan pembiayaan pembangunan; 2. Sinergisasi dan pengoptimalan program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

~
A
K

<p>8. Kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) berdampak positif pada perekonomian daerah</p>		
<p>Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak negatif akibat arus globalisasi; 2. Pemberlakuan Zona Bebas Perdagangan dapat memberikan tekanan terhadap pasar. 3. Arus informasi negatif akibat perkembangan teknologi informasi; 4. Perubahan lingkungan hidup dan pemanasan global berpengaruh pada aspek kesejahteraan masyarakat; 5. Dampak krisis ekonomi, pangan dan energi dunia. 	<p>S + T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang dimiliki dan posisi geografis yang strategis berupaya mengatasi permasalahan pembangunan dengan berpegang teguh pada nilai kearifan lokal dalam menetralsir budaya/teknologi informasi negatif yang masuk; 2. Menciptakan kondisi politik dan ekonomi yang kondusif dengan keberagaman budaya masyarakat yang ada; 3. Mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 	<p>W + T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam meminimalisir pengaruh negatif akibat arus globalisasi; 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha masyarakat untuk meminimalisir pengaruh global; 3. Mendorong penyediaan tenaga kerja lokal yang handal dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan global; 4. Mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 5. Peningkatan karakter masyarakat melalui pendidikan moral dan wawasan kebangsaan untuk menyaring budaya negatif dari arus globalisasi.

~
a
r

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, yang dicantumkan dalam RPJMD Perubahan ini sama dengan visi daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebagai berikut : ***“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing”***.

Penjabaran dari visi tersebut adalah :

- Maju : Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
- Harmonis dan Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki akhlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.
- Memiliki Daya Saing : Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.

5.2. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Kubu Raya selama 5 tahun dalam RPJMD Perubahan ini, yang mana dalam kurun waktu 2 tahun (tahun 2015-2016) sudah dijalani, dan kurun waktu 3 tahun ke depan (tahun 2017-2019) adalah misi yang sama sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*)

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang professional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreatifitas

Misi ini dimaksudkan untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi lainnya.

Disamping itu juga untuk memperkuat daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mendorong dan memperkuat pembangunan di bidang sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan penguatan daya saing daerah yang didukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata, mengatasi kesenjangan wilayah serta pemerataan pembangunan di segala bidang.

Misi 3 : Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah.

Misi ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata berkeadilan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif keunggulan komparatif masing-masing wilayah dengan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta meningkatkan kemandirian dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan hidup.

Misi 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana layanan dasar guna mendukung pembangunan di masyarakat, serta mendorong peningkatan partisipasi publik untuk bersama-sama pemerintah dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Pembangunan sarana dan prasarana akan diwujudkan dengan memperhatikan tata ruang wilayah, potensi wilayah dan sebaran penduduk serta kondisi geografis dengan mengedepankan skala prioritas, kemampuan pembiayaan, daya manfaat, tingkat keterdesakan, dan pemerataan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun sisa waktu 3 tahun (2017-2019) dalam RPJMD Perubahan ini dari 5 tahun yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, sebagai berikut :

Tabel 5.1.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

VISI : KABUPATEN KUBU RAYA YANG MAJU, HARMONIS, DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI DAYA SAING

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian					Kondisi Akhir		
							2014	2015	2016	2017	2018		2019	
1.	Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa (Good Governance)	T.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	S.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Level	-	B	B	B	B	B		
				S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	-	-	-	CC	CC	B	B	B	
				S.3	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	4	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLIS)	Tahun	12,34	12,55	12,84	13,01	13,18	13,36
2.	Mewujudkan SDM yang memiliki daya saing	T.2	Terwujudnya SDM yang memiliki daya saing	S.4	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Tahun	7,60	6,50	6,80	7,30	7,60	7,90	7,90	
				S.5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat kepada hukum	6	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,64	69,74	69,77	69,81	69,86	69,90
3.	Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah	T.3	Meningkatnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib	S.6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	7	% Permasalahan ketertiban, ketertarikan dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		T.4	Meningkatkan perekonomian daerah	S.7	Meningkatnya investasi perannuan modal daerah	8	% Pertumbuhan ekonomi	%	6,28	6,36	6,37	7,30	7,40	7,50
				S.8	Meningkatnya tingkat kemiskinan	9	Pengeluaran per kapita per tahun	Ribu	7.973,33	7.993,68	8.145,00	8.203,04	8.261,50	8.320,37
				S.9	Meningkatnya tingkat kemiskinan	10	% Tingkat kemiskinan	%	6,27	6,00	5,70	5,40	5,10	4,80
				S.10	Meningkatnya investasi perannuan modal daerah	11	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Juta	3.114.044,281	3.486.851,231	4.016.235,877	4.625.993,353	5.328.326,114	6.137.289,228
		S.11	Meningkatnya tingkat pengangguran dan pertumbuhan penduduk	12	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,18	6,11	6,42	6,02	5,10	4,80		

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal				Target Capaian				Kondisi Akhir		
							2014	2015	2016	2017	2018	2019					
4	Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat	Meningkatkan kapasitas infrastruktur, tata ruang dan konektivitas wilayah	9 Indeks Mobilitas 10 Indeks Konektivitas 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S.9	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM dan pariwisata	13	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Juta	2.442.677,3	2.513.050,5	2.688.748,5	2.776.162,5	2.866.418,3	2.959.608,5	2.959.608,5		
						14	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Juta	5.386.861,1	6.069.702,0	6.727.703,2	7.245.090,9	7.802.267,8	8.402.293,9	8.402.293,9		
						15	Kunjungan wisata	Orang	57.855	60.508	45.139	52.262	56.235	60.510	65.110		
						16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah		0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,85	0,85		
						17	Indeks Konektivitas		0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,80		
						S.11	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah	18	Ketaatan terhadap RTKFW	%	60,00	65,00	70,00	80,00	85,00	85,00	
						S.12	Meningkatnya layanan sanitasi	19	Persentase penduduk terlayani sanitasi	%	42,50	45,00	47,50	50,00	55,00	60,00	60,00
						S.13	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing”, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan.

6.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah tahun 2014-2019 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan :

1. Sebagian besar Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang sudah terintegrasi.
2. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.
3. Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.
4. Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang memadai.
5. Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kubu Raya.
6. Potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal.
7. Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.
8. Tersedianya produk hukum daerah.
9. Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadai.

10. Prasarana dan sarana pendidikan yang memadai.
11. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.
12. Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.
13. Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.

Kelemahan :

1. Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Masalah Sosial yang masih cukup tinggi.
2. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dilaporkan.
3. Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.
5. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.
6. Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.
7. Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.
8. Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang belum maksimal.
9. Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.
10. Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.
11. Masih adanya kawasan kumuh.
12. Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Kubu Raya.
13. Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.
14. Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.
15. Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.
16. Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.
17. Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas.
18. Tersedianya produk hukum daerah.
19. Masih minimnya minat baca masyarakat.

Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang :

1. Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

2. APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.
3. Arah kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.
4. Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.
5. Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.
6. Kewenangan di desa yang semakin banyak.
7. Meningkatnya wisatawan minat khusus dan dukungan dana keistimewaan.
8. Momentum perlindungan anak yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.
10. Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.
11. Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.
12. Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.
14. Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.

Ancaman :

1. Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.
2. Adanya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang kurang harmonis.
3. Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dan budaya pendatang.
4. Dampak buruk dari era globalisasi.
5. Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.
6. Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.
7. Ketimpangan sosial ekonomi antar suku dan etnis yang semakin tinggi.
8. Ketimpangan sosial ekonomi nasional yang semakin meningkat.
9. Masih adanya anak putus sekolah.
10. Moratorium pegawai negeri sipil.

11. Penurunan kualitas tanah, air dan udara.
12. Persaingan tenaga kerja asing.
13. Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.
14. Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang relatif besar.
15. Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan propinsi yang tidak signifikan.
16. Semakin beragamnya etnis dan suku yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
17. Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.
18. Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.
19. Tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih kurang.

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi perpaduan analisis lingkungan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
STRATEGI ANTARA KEKUATAN DAN PELUANG

KEKUATAN		PELUANG		STRATEGI	
1.	Sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pemerintahan yang sudah terintegrasi.	1.	Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	1.	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
2.	Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.	2.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	2.	Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi.
3.	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang sudah terintegrasi.	3.	Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.	3.	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses desiminasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4.	Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.	4.	Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.	4.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
5.	Prasarana, sarana pendidikan dan kompetensi pendidik yang memadai.	5.	APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.	5.	Meningkatkan nilai kelulusan siswa.
6.	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kubu Raya.	6.	Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.	6.	Mengembangnya Koperasi.
7.	Potensi pariwisata yang belum dikelola secara maksimal.	7.	Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.	7.	Meningkatkan nilai ekspor.
				8.	Meningkatkan pariwisata berkelanjutan.
				9.	Meningkatkan diversifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian.
8.	Kesadaran berpolitik warga masyarakat yang semakin meningkat.	8.	Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.	10.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Tabel 6.2.
STRATEGI ANTARA KELEMAHAN DAN PELUANG

KELEMAHAN		PELUANG		STRATEGI	
1.	Pengelolaan pemerintahan di desa belum maksimal.	1.	Kewenangan di desa yang semakin banyak.	1.	Penguatan kelembagaan desa.
2.	Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.	2.	Tuntutan atas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin tinggi.	2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3.	Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.	3.	APK dan APM tingkat satuan pendidikan yang cukup tinggi.	3.	Meningkatkan nilai kelulusan siswa.
4.	Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.	4.	Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.	4.	Meningkatkan peluang investasi daerah.
5.	Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Kubu Raya.	5.	Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.	5.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
6.	Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian yang masih perlu ditingkatkan.	6.	Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.	6.	Mengembangkan fasilitas perhubungan.
7.	Masih adanya kawasan kumuh.			7.	Meningkatkan pengelolaan kawasan kumuh.
8.	Angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial yang masih cukup tinggi.	7.	Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.	8.	Meningkatkan penanganan kemiskinan.
9.	Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dilaporkan.	8.	Momentum perlindungan anak yang sedang ditingkatkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	9.	Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
10.	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.	9.	Meningkatnya wisatawan minat khusus dan dukungan dana keistimewaan.	10.	Meningkatkan pelestarian terhadap cagar budaya.

Tabel 6.3.
STRATEGI ANTARA KEKUATAN DAN ANCAMAN

KEKUATAN		ANCAMAN		STRATEGI	
1.	Adanya Peraturan Bupati tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.	1.	Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.	1.	Pendampingan pelaksanaan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.
2.	Adanya potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.	2.	Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan provinsi yang tidak signifikan.	2.	Meningkatkan pendapatan asli daerah.
3.	Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang cukup.	3.	Moratorium pegawai negeri sipil.	3.	Meningkatkan kualitas pejabat sesuai dengan standar kompetensi.
4.	Tersedianya produk hukum daerah.	4.	Adanya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang kurang harmonis.	4.	Sinkronisasi produk hukum pusat dan daerah.
5.	Prasarana dan sarana kesehatan yang cukup memadai.	5.	Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.	5.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6.	Prasarana dan sarana pendidikan yang memadai.	6.	Masih adanya anak putus sekolah.	6.	Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan.
7.	Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.	7.	Persaingan tenaga kerja asing.	7.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
8.	Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.	8.	Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang relatif besar.	8.	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana menuju kemandirian.
9.	Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%.	9.	Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.	9.	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau.
10.	Meningkatnya indeks pembangunan gender.	10.	Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.	10.	Mempercepat pengarusutamaan gender.
11.	Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.	11.	Ketimpangan sosial ekonomi antar suku dan etnis yang semakin tinggi.	11.	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan.

Tabel 6.4.
STRATEGI ANTARA KELEMAHAN DAN ANCAMAN

KELEMAHAN		ANCAMAN		STRATEGI	
1.	Pengelolaan pemerintahan di desa yang belum maksimal.	1.	Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.	1.	Meningkatkan pengawasan Pemerintah Desa.
2.	Tersedianya produk hukum daerah.	2.	Tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih kurang.	2.	Mengoptimalkan tindak lanjut pelanggaran perda.
3.	Belum semua anggota masyarakat tercakup dalam layanan jaminan kesehatan.	3.	Semakin meningkatnya penyakit degeneratif, masih adanya angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk.	3.	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
4.	Masih minimnya minat baca masyarakat.	4.	Dampak buruk dari era globalisasi.	4.	Mengembangkan budaya baca.
5.	Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang belum maksimal.	5.	Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.	5.	Meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan UMKM.
		6.	Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.	6.	Meningkatkan infrastruktur perekonomian.
6.	Masih tingginya pengangguran di Kabupaten Kubu Raya	7.	Serbuan barang dan tenaga kerja asing sebagai akibat kebijakan MEA.	7.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
7.	Keterampilan tenaga kerja yang belum optimal.				
8.	Angka kemiskinan dan penyandang masalah sosial yang masih cukup tinggi.	8.	Ketimpangan sosial ekonomi nasional yang semakin meningkat.	8.	Meningkatkan penanganan kemiskinan.
9.	Prasarana dan sarana penanggulangan bencana yang masih terbatas.	9.	Potensi kebencanaan di Kabupaten Kubu Raya yang relatif besar.	9.	Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana menuju kemandirian.
10.	Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.	10.	Penurunan kualitas tanah, air dan udara.	10.	Melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup.
11.	Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah.	11.	Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.	11.	Meningkatkan pengelolaan tata ruang.
12.	Belum optimalnya keberadaan forum keagamaan dan antar etnis.	12.	Semakin beragamnya etnis dan suku yang ada di Kabupaten Kubu Raya.	12.	Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbudhankam.
13.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.	13.	Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dan buadaya pendatang.	13.	Meningkatkan pelestarian terhadap tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya.

Strategi dituangkan secara lebih rinci, yang dibagi ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 5, berdasarkan pendekatan urusan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (*Good Governance*)

- 1) Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan peningkatan pembangunan zona integritas pada unit kerja.
 - b) Melakukan peningkatan pematangan penerapan SPIP pada OPD.
 - c) Melakukan peningkatan nilai SAKIP pada unit kerja.

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreatifitas

- 1) Urusan Pendidikan, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b) Melakukan peningkatan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman.
 - c) Melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
 - d) Melakukan peningkatan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah akreditasi.
- 2) Urusan Kesehatan, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
 - b) Melakukan peningkatan insentif tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman.
 - c) Melakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
 - d) Melakukan peningkatan tata kelola dan pemenuhan standar puskesmas akreditasi.
- 3) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan pembinaan, advokasi dan penegakan produk hukum daerah.
 - b) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga/aparat penegak hukum.

Misi 3 : Membangun Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah

- 1) Urusan Perekonomian, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
 - b) Melakukan peningkatan kontribusi PDRB dari sektor unggulan.
 - c) Melakukan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi dan antar wilayah.
 - d) Melakukan peningkatan produktivitas masyarakat dan lapangan usaha sektor unggulan.
 - e) Melakukan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinergitas penanganan kemiskinan.
 - f) Melakukan peningkatan produktivitas lahan pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa.
- 2) Urusan Penanaman Modal, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan pemberian kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah.
- 3) Urusan Tenaga Kerja dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan peningkatan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah.
 - b) Melakukan peningkatan pembinaan, fasilitasi dan kemitraan dengan lembaga/tokoh masyarakat/tokoh agama dalam program Keluarga Berencana.
- 4) Urusan Pariwisata, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah.

Misi 4 : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat

- 1) Urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
- 2) Urusan Perumahan Rakyat, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan fasilitasi dan pengembangan pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan layak huni.

- 3) Urusan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan peningkatan dan pengendalian tata ruang wilayah sesuai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW.
- 4) Urusan Lingkungan Hidup, strategi yang dilakukan adalah :
 - a) Melakukan peningkatan dan pengembangan sarana, prasarana dan pengelolaan sanitasi.
 - b) Melakukan peningkatan pencegahan, pengawasan, penanggulangan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
 - c) Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Lingkungan Hidup.

Tabel 6.5.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
KABUPATEN KUBU RAYA

VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
MISI 1 : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (Good Governance)					
T.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	S.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	ST.1	Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja
				ST.2	Meningkatkan kompetensi APIP
		S.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	ST.3	Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas					
T.2	Terwujudnya SDM yang memiliki daya saing	S.3	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	ST.4	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
				ST.5	Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman
				ST.6	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan
				ST.7	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah akreditasi
		S.4	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	ST.8	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
				ST.9	Meningkatkan insentif tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman
				ST.10	Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
ST.11	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar puskesmas akreditasi				

VISI : Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya, Serta Memiliki Daya Saing					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
T.3	Meningkatkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib	S.5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat kepada hukum	ST.12	Melakukan pembinaan, advokasi dan penegakan produk hukum daerah
				ST.13	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga/aparat penegak hukum
MISI 3 : Membangun Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah					
T.4	Meningkatkan perekonomian daerah	S.6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat, serta menurunkan tingkat kemiskinan	ST.14	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
				ST.15	Meningkatkan kontribusi PDRB dari sektor unggulan
				ST.16	Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan antar wilayah
				ST.17	Meningkatkan produktivitas masyarakat dan lapangan usaha sektor unggulan
				ST.18	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergisitas penanganan kemiskinan
		S.7	Meningkatnya investasi penanaman modal daerah	ST.19	Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah
		S.8	Menurunnya tingkat pengangguran dan pengendalian pertumbuhan penduduk	ST.20	Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja
				ST.21	Meningkatkan pembinaan, fasilitasi dan kemitraan dengan lembaga/tokoh masyarakat/tokoh agama dalam program Keluarga Berencana
		S.9	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM dan pariwisata	ST.22	Meningkatkan produktivitas lahan pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa
				ST.23	Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah
MISI 4 : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat					
T.5	Meningkatkan kapasitas infrastruktur, tata ruang dan konektivitas wilayah	S.10	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	ST.24	Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah
				ST.25	Memfasilitasi dan mengembangkan pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan layak huni
		S.11	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah	ST.26	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah sesuai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW
		S.12	Meningkatnya layanan sanitasi	ST.27	Meningkatkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan pengelolaan sanitasi
		S.13	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	ST.28	Meningkatkan pencegahan, pengawasan, penanggulangan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
ST.29	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Lingkungan Hidup				

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah kepada pencapaian tujuan daerah.

Misi 1 : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (*Good Governance*)

Arah kebijakan :

- 1) Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional;
- 2) Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi;
- 3) Meningkatkan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat "BB".

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas

Arah kebijakan :

- 1) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak;
- 2) Menempatkan tenaga pendidik berkualitas secara merata;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik;
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan sekolah berakreditasi;
- 5) Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas rawat inap;
- 6) Menempatkan tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata;
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
- 8) Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas berakreditasi;
- 9) Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah;
- 10) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan produk hukum daerah.

Misi 3 : Membangun Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah

Arah kebijakan :

- 1) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif;
- 2) Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah;
- 3) Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis potensi lokal masyarakat;
- 4) Memperluas lapangan pekerjaan dan berusaha di sektor unggulan;
- 5) Mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelaku usaha untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah;
- 6) Mempermudah proses perizinan;
- 7) Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja;
- 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam keperawatan KB mandiri;
- 9) Mengembangkan sentra-sentra produksi hasil pertanian, kawasan-kawasan sentra industri, serta meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi, jaringan pemasaran dan penggunaan teknologi tepat guna;
- 10) Menginventarisasi dan mengembangkan potensi wisata dan keunikan daerah.

Misi 4 : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat

Arah kebijakan :

- 1) Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pusat-pusat permukiman;
- 2) Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni;
- 3) Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan;
- 4) Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi yang merata dan berkualitas;
- 5) Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup serta menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 6.6.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Visi (1)	Misi (2)		Tujuan (3)		Sasaran (4)		Strategi (5)		Arah Kebijakan (6)	
	1	2	T.1.	T.2.	S.1.	S.2.	ST.1.	ST.2.	AK.1.	AK.2.
Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing	Mewujudkan system dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berbudaya (<i>Good Governance</i>)		Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berbudaya		Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi		Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja		AK.1.	Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur teknis dan fungsional
					S.2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	ST.3.	Meningkatkan kompetensi APUP	AK.2.	Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi
2	Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas		Terwujudnya SDM yang memiliki daya saing		S.3.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	ST.4.	Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja	AK.3.	Meningkatkan komitmen SKPD mampu memenuhi penilaian SAKIP peringkat "BB"
					S.4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	ST.5.	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	AK.4.	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
							ST.6.	Meningkatkan insentif tenaga terampil, kepelualuan dan pedalaman	AK.5.	Menempatkan tenaga pendidik yang berkualitas secara merata
							ST.7.	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	AK.6.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
							ST.8.	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah akreditasi	AK.7.	Mengembangkan dan meningkatkan sekolah berakreditasi
							ST.9.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	AK.8.	Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas rawat inap
								Meningkatkan insentif tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepelualuan dan pedalaman	AK.9.	Menempatkan tenaga kesehatan yang berkualitas secara merata

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan
				ST.10. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan ST.11. Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar puskesmas akreditasi	AK.10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan AK.11. Mengembangkan dan meningkatkan puskesmas berakreditasi
		T.3. Meningkatkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib	S.5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat kepada hukum	ST.12. Melakukan pembinaan, advokasi dan penegakan produk hukum daerah ST.13. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga/aparat penegak hukum	AK.12. Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah AK.13. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan produk hukum daerah
	3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah	T.4. Meningkatkan perekonomian daerah	S.6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat, serta menurunkan tingkat kemiskinan	ST.14. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan ST.15. Meningkatkan kontribusi PDRB dari sektor unggulan ST.16. Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan antar wilayah ST.17. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan lapangan usaha sektor unggulan ST.18. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergisitas penanganan kemiskinan	AK.14. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif AK.15. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah AK.16. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat berbasis potensi lokal masyarakat AK.17. Memperluas lapangan pekerjaan dan berusaha di sektor unggulan AK.18. Mengembangkan dan meningkatkan manajemen pelaku usaha untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah
			S.7. Meningkatkan investasi penanaman modal daerah	ST.19. Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah	AK.19. Mempermudah proses perizinan

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)
			S.8. Menurunnya tingkat pengangguran dan pengendalian pertumbuhan penduduk	ST.20. Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja	AK.20. Meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja
				ST.21. Meningkatkan pembinaan, fasilitasi dan mitraan dengan lembaga/tokoh masyarakat/tokoh agama dalam program Keluarga Berencana	AK.21. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
			S.9. Meningkatkan daya saing sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM dan pariwisata	ST.22. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa	AK.22. Mengembangkan sentra-sentra produksi hasil pertanian, kawasan-kawasan sentra industri, serta meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi, jaringan pemasaran dan penggunaan teknologi tepat guna
4.	Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat	T.5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur, tata ruang dan konektivitas wilayah	S.10. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	ST.23. Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah	AK.23. Menginventarisasi dan mengembangkan potensi destinasi wisata dan keunikan daerah
				ST.24. Meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	AK.24. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan serta konektivitas aksesibilitas dan permukiman
				ST.25. Memfasilitasi dan mengembangkan pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan layak huni	AK.25. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)	Arah Kebijakan (6)
			S.11. Meningkatkan pengelolaan tata ruang wilayah	ST.26. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah sesuai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW	AK.26. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan
			S.12. Meningkatkan layanan sanitasi	ST.27. Meningkatkan dan mengembangkan sarana, prasarana dan pengelolaan sanitasi	AK.27. Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi yang merata dan berkualitas
			S.13. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup	ST.28. Meningkatkan pencegahan, pengawasan, penanggulangan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	AK.28. Meningkatkan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup serta menurunkan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
				ST.29. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan Lingkungan Hidup	AK.29. Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup

Tabel 6.7.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019

Arah Kebijakan				
Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Melanjutkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2014 dengan mengedepankan peningkatan infrastruktur wilayah, kualitas sumberdaya manusia, serta mengefektifkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan terbuka.	Melanjutkan dan meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur wilayah, sarana prasarana pemerintahan, pelayanan sosial dasar serta memperkuat dan memantapkan pelaksanaan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan terbuka.	Melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016 dengan menitikberatkan pada peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan didukung infrastruktur wilayah yang layak.	Melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017 dengan lebih memfokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah, pengembangan wilayah dan pusat pertumbuhan baru.	Melanjutkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 dengan meningkatkan eksistensi dan ekspansi terhadap kemajuan, keunggulan, keharmonisan dan daya saing daerah yang sudah dicapai.

6.3. Program Pembangunan

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

R
d
r

Tabel 6.8.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	Pernyataan Daerah	
				Target (5)	Rp. (juta) (6)	Target (7)	Rp. (juta) (8)	Target (9)	Rp. (juta) (10)	Target (11)	Rp. (juta) (12)	Target (13)	Rp. (juta) (14)			Target (15)
11	Misi 1: Menwujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Berhasil, Baik dan Berwibawa (Good Governance) Tujuan: T.1 Terwujudnya pemerintahan yang Berhasil, Efektif, Efisien dan Berwibawa	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Opini BPR 3. Nilai SAKIP														
	Sasaran: S.1 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kepuasan APSP														
	Program: 1. Program Peningkatan Administrasi dan Kependidikan	Rasio Kependidikan KTR Elektronik	80,11%	100,00%	100,00%	1.021.893.500,00	2	100,00%	2.514.975.292,00	100,00%	2.696.405.500,00	100,00%	3.177.480.604,00	100,00%	11.486.673.170,00	Dinas Kependidikan dan Peningkatan Sipl
	2. Program Peningkatan dan Pelaksanaan Dekumen/Ayap Kependidikan	Perentase Dekumen/Ayap Kependidikan Yang Terlampas Rapi	100,00%	100,00%	100,00%	13.858.000,00	100,00%	7.281.000,00	4.480.500,00	100,00%	3.392.000,00	100,00%	2.638.407,00	100,00%	48.649.907,00	Dinas Kependidikan dan Peningkatan Sipl
	3. Program Pengelolan, Pengendalian dan Pengawasan Aset Desa	Perentase Laporan Inventarisasi Aset Desa	100,00%	100,00%	100,00%	54.165.000,00	100,00%	88.913.250,00	126.809.500,00	100,00%	162.858.000,00	100,00%	179.153.407,00	100,00%	712.994.053,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemda/ Bermitra Dengan Pemda	2,00	2,00	2,00	5.544.819.000,00	2,00	8.530.588.800,00	3.964.351.800,00	2,00	3.008.967.825,00	2,00	2.775.783.862,00	2,00	28.357.691.047,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, Inspektori Daerah
	5. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Perentase Aparatur Yang memiliki kompetensi Berbasis TIK	60,00%	70,00%	70,00%	87.500.000,00	-	-	-	-	-	-	114.622.195,00	75,00%	253.112.395,00	Sekretariat Daerah
	6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelanggan, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	50,00%	60,00%	70,00%	1.202.312.950,00	1.200.070.825,00	1.200.070.825,00	2.175.250.800,00	90,00%	2.222.536.500,00	100,00%	2.592.068.743,00	100,00%	10.422.333.818,00	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
	7. Program Pengembangan dan Implementasi E-Government	Jumlah Aplikasi Yang Dibangun	1,00	1,00	1,00	753.990.300,00	274.838.500,00	274.838.500,00	212.335.000,00	1,00	279.112.500,00	1,00	181.893.882,00	5,00	4.076.761.758,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	8. Program Implementasi LRSB	Perentase Penyediaan Barang/Jasa Melalui LRSB	100%	100%	100%	318.503.600,00	731.805.000,00	731.805.000,00	678.262.500,00	100%	1.293.293.200,00	100%	1.476.015.342,00	100%	5.165.604.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah
	9. Program Peningkatan Dan Pelaksanaan Dekumen/Ayap Daerah	Presentasi SIFD Yang telah Melaksanakan Ayap Baku	55,00%	60,00%	65,00%	29.991.000,00	125.325.325,00	125.325.325,00	100.372.300,00	80,00%	77.995.300,00	90,00%	100.735.900,00	90,00%	534.005.425,00	Dinas Keperguruan dan Peningkatan Sekretariat
	10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Terwujudnya Sistem Ayap Elektronik	Terwujud	Terwujud	-	123.057.000,00	-	-	-	Terwujud	45.050.000,00	Terwujud	49.553.000,00	Terwujud	292.982.000,00	Dinas Keperguruan dan Peningkatan Sekretariat
	11. Program Perbaikan Sistem Administrasi Keperguruan	Perentase Pelaksanaan Sistem Keperguruan Sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSRKS)	-	50,00%	50,00%	-	80.531.950,00	80.531.950,00	76.110.000,00	70,00%	69.538.000,00	80,00%	142.609.000,00	80,00%	368.788.950,00	Dinas Keperguruan dan Peningkatan Sekretariat
	12. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Peralatan	Frekuensi Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ayap Daerah	-	3 Kali	3 Kali	-	45.997.625,00	45.997.625,00	12.500.000,00	3 Kali	10.462.000,00	3 Kali	6.386.180,00	15 Kali	75.345.865,00	Dinas Keperguruan dan Peningkatan Sekretariat
	13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	1.126.505.050,00	711.642.764,00	711.642.764,00	1.369.189.400,00	100,00%	1.257.577.600,00	100,00%	1.248.625.884,00	100,00%	7.016.648.788,00	Baalen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tahun / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	Pernyataan Daerah
				Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
14	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Pengembangan Data/Informasi	100,00%	100,00%	567.715.150,00	353.718.250,00	100,00%	372.270.000,00	100,00%	598.405.800,00	100,00%	591.389.551,00	100,00%	3.118.258.701,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Perencanaan Sosial dan Budaya	100,00%	100,00%	389.504.050,00	90.343.750,00	100,00%	282.241.500,00	100,00%	182.697.000,00	100,00%	218.274.808,00	100,00%	1.238.114.516,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,00%	100,00%	409.878.025,00	420.927.200,00	100,00%	451.968.500,00	100,00%	455.757.700,00	100,00%	475.511.445,00	100,00%	2.582.914.289,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	271.128.050,00	239.137.400,00	100,00%	271.756.400,00	100,00%	332.606.400,00	100,00%	336.739.859,00	100,00%	1.766.293.539,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Perencanaan Kerjasama Pembangunan	100,00%	100,00%	75.050.000,00	19.465.925,00	100,00%	120.379.500,00	100,00%	100.375.000,00	100,00%	120.450.000,00	100,00%	427.864.466,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perencanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	100.375.000,00	100,00%	120.450.000,00	100,00%	220.825.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Program Penataan Kependidikan	Persentase Perencanaan Kependidikan	1 Kali	-	23.318.500,00	89.644.000,00	-	36.986.400,00	-	145.010.800,00	1 Kali	108.328.123,00	1 Kali	1.028.286.193,00	Sekretariat DPRD
21	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	100,00%	100,00%	1.478.525.025,00	3.036.476.375,00	100,00%	1.430.897.300,00	100,00%	4.834.827.500,00	100,00%	6.638.486.453,00	100,00%	18.414.869.353,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	Program Pengadaan Diploin Aparatur	Persentase Pengadaan Diploin Aparatur	100,00%	100,00%	2.262.912.525,00	638.196.125,00	100,00%	1.368.534.900,00	100,00%	705.948.675,00	100,00%	640.273.912,00	100,00%	6.786.162.454,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Program Pendidikan Kedisiplinan	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Kedisiplinan	850,00	950,00	341.612.100,00	129.915.000,00	1.000,00	184.530.000,00	1.280,00	357.282.300,00	1.300,00	347.128.809,00	1.500,00	1.772.922.409,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Program Realisasi Tugas PNS	Jumlah SK Penemuan PNS	-	200,00	30.050.000,00	26.789.250,00	230,00	35.129.000,00	250,00	42.965.500,00	270,00	46.982.781,00	1.110,00	181.916.531,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Program Pengukuran Kejasama Antar Kemendagri Daerah	Jumlah Kejasama Antar Pemerintah Daerah	5,00	5,00	70.000.000,00	73.972.825,00	5,00	449.000.000,00	5,00	366.000.000,00	5,00	440.536.696,00	25,00	1.544.378.721,00	Sekretariat Daerah
26	Program Penataan Dan Prosedur Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal Dan BPK	-	20,00%	147.430.000,00	-	60,00%	19.999.900,00	-	-	100%	7.366.290,00	100%	174.796.199,00	Inspektorat Daerah
27	Program Pengembangan Profesionalisme Aparatur Dan Aparatur Berprestasi	Persentase Tenaga Aparatur dan Aparatur Mengikuti Pelatihan Atau Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	100,00%	100,00%	107.038.000,00	16.292.000,00	100,00%	35.080.000,00	100,00%	39.000.000,00	100,00%	34.958.199,00	100,00%	299.765.483,00	Inspektorat Daerah
28	Program Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Pelanggaran Kedisiplinan KDH	Jumlah LHP	37 Dokumen	37 Dokumen	2.047.006.680,00	1.320.186.350,00	37 Dokumen	1.230.198.950,00	37 Dokumen	1.274.922.600,00	37 Dokumen	1.204.634.558,00	185 Dokumen	8.769.829.740,00	Inspektorat Daerah
29	Program Penataan Perundang-undangan	Persentase Raperda Yang Dievaluasi DPRD	100,00%	100,00%	3.595.168.000,00	2.417.789.075,00	100,00%	2.726.310.500,00	100,00%	3.200.580.500,00	100,00%	3.382.066.358,00	100,00%	17.754.107.353,00	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
30	Program Pengukuran Kapasitas Lembaga Pemerkaban Rakyat Daerah	Jumlah Penuntun Daerah Yang Ditransfer	7,00	22,00	11.400.213.500,00	8.806.644.800,00	24,00	13.179.317.100,00	24,00	16.304.132.090,00	28,00	18.241.110.676,00	119,00	77.232.419.766,00	Sekretariat DPRD
31	Program Penataan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah	Laporan Realisasi Kegiatan SKPD	100,00%	100,00%	163.391.500,00	119.885.946,00	100,00%	261.146.500,00	100,00%	253.246.500,00	100,00%	271.898.301,00	100,00%	1.257.660.147,00	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program (Tahun/Program/Desera)	Indikator Kinerja (Tahun / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja RPJMD Perubahan Rp. (tuis)	Penaugkat Desera Peningkatan Jumlah	
				Target (9)	Rp. (tuis) (9)	Target (7)	Rp. (tuis) (8)	Target (9)	Rp. (tuis) (10)	Target (11)	Rp. (tuis) (12)	Target (13)	Rp. (tuis) (14)			Target (15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	32	Program Perencanaan Keberhasilan Perencanaan Desera	Terkendainya Laju Inflasi	0,24	204.448.500,00	0,25	82.303.036,00	0,25	211.590.200,00	0,27	211.590.200,00	0,29	209.656.989,00	0,29	1.141.113.875,00	Sekretariat Desera
	33	Program Pengembangan Kapasitas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Kinerja Kerja Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Departemen/ Lantar Negeri	10 Kali	736.600.000,00	10 Kali	1.159.869.000,00	10 Kali	1.396.030.000,00	10 Kali	2.252.334.500,00	10 Kali	2.871.956.005,00	10 Kali	9.084.992.505,00	Sekretariat Desera
	34	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Percepatan Pelayanan Masyarakat yang Dibutuhkan	100,00%	318.886.625,00	100,00%	168.034.200,00	100,00%	234.603.000,00	100,00%	252.283.000,00	100,00%	233.212.915,00	100,00%	1.580.753.740,00	Sekretariat Desera; Sekretariat DPRD
	35	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Koordinasi Pengembangan Desera	100,00%	277.402.000,00	100,00%	420.171.600,00	100,00%	566.570.000,00	100,00%	571.000.000,00	100,00%	513.641.495,00	100,00%	3.318.214.395,00	Sekretariat Desera
	36	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah Keberhasilan Keberhasilan	1,00	-	1,00	22.400.000,00	-	-	1,00	160.000.000,00	1,00	162.641.191,00	1,00	497.372.191,00	Sekretariat Desera
	37	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah Keberhasilan Keberhasilan	20,00	1.080.487.650,00	20,00	5.455.513.732,00	20,00	2.361.383.900,00	25,00	1.290.552.500,00	30,00	1.377.404.744,00	30,00	12.497.192.906,00	Sekretariat Desera
	38	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Kinerja Kerja Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100,00%	3.114.029.114,00	100,00%	2.305.930.400,00	100,00%	3.823.193.932,00	100,00%	3.318.886.100,00	100,00%	2.965.527.490,00	100,00%	21.354.557.642,00	Sekretariat Desera; Semua Kecamatan
	39	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Percepatan Pelayanan Masyarakat yang Dibutuhkan	100,00%	36.655.301.247,00	100,00%	38.966.596.081,79	100,00%	25.128.149.614,00	100,00%	26.901.103.770,00	100,00%	26.116.828.408,00	100,00%	184.958.197.834,00	Semua SKPD
	40	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Percepatan Pelayanan Masyarakat yang Dibutuhkan	100,00%	55.977.946.720,00	100,00%	54.999.620.016,00	100,00%	26.498.226.404,00	100,00%	18.811.364.860,00	100,00%	16.729.243.901,00	100,00%	205.833.806.383,00	Semua SKPD
	41	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Percepatan Pelayanan Masyarakat yang Dibutuhkan	100,00%	2.888.613.825,00	100,00%	2.220.317.929,00	100,00%	3.549.078.350,00	100,00%	3.946.274.850,00	100,00%	4.240.788.212,00	100,00%	19.608.994.354,00	Semua SKPD
	42	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Percepatan Pelayanan Masyarakat yang Dibutuhkan	100,00%	476.589.759,00	100,00%	434.640.450,00	100,00%	702.887.900,00	100,00%	756.045.715,00	100,00%	560.333.650,00	100,00%	6.311.572.551,00	Semua SKPD
	43	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Percepatan Pelayanan Masyarakat yang Dibutuhkan	100,00%	1.583.636.000,00	100,00%	1.824.572.313,00	100,00%	2.585.910.900,00	100,00%	3.345.332.725,00	100,00%	4.033.065.796,00	100,00%	13.372.517.734,00	Semua SKPD
	S.2	Menunjang Keberhasilan Keberhasilan Desera	Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	1	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Percepatan Pelayanan Masyarakat yang Dibutuhkan	100,00%	2.725.925.625,00	100,00%	1.645.210.843,00	100,00%	1.790.583.500,00	100,00%	2.033.171.175,00	100,00%	2.049.562.646,00	100,00%	12.337.993.009,00	Semua SKPD
	2	Program Pengembangan Pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Percepatan Pelayanan Masyarakat yang Dibutuhkan	100,00%	8.442.898.705,00	100,00%	10.092.704.905,61	100,00%	11.937.521.030,00	100,00%	9.318.709.200,00	100,00%	9.048.595.695,00	100,00%	59.633.592.752,00	Semua SKPD
	Misi 2 : Menyediakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkualitas Dan Memelihara Kesehatan Tujuan : T.2 Terwujudnya SDM yang Memiliki Sasaran : S.3 Meningkatkan Pendidikan Program :															
			4. IPM	12,34	12,85	12,84	13,01	13,18	13,36	13,36	7,90	7,90	7,90	7,90		

Kode	Misi/Program/Basran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Rujukan / Output / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2014 (Tahun 2014)	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	Perangko Daerah (17)	
				Target (5)	Rp. (6)	Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)			Target (15)
(1)	10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Sagar Aktif Steris Mandiri	75,00%	666.894.000,00	80,00%	867.366.400,00	85,00%	4.974.583.000,00	85,00%	4.210.786.200,00	90,00%	6.502.403.331,00	90,00%	17.701.536.131,00	Dinas Kesehatan, Sekertariat Daerah
	11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	24,00	262.673.500,00	24,00	157.305.500,00	32,00	208.168.000,00	39,00	72.974.200,00	45,00	55.831.141,00	45,00	1.035.329.461,00	Dinas Kesehatan
	12	Program Pengembangan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	70,00%	153.099.000,00	75,00%	60.388.200,00	80,00%	46.502.800,00	95,00%	56.227.800,00	100,00%	43.771.958,00	100,00%	359.989.758,00	Dinas Kesehatan
	13	Program Pengembangan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Pelayanan Yang Didukung Oleh Nakes Yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan	89,00%	1.589.315.100,00	92,00%	2.406.769.500,00	93,00%	2.672.048.000,00	94,00%	2.599.017.600,00	95,00%	3.771.915.031,00	95,00%	13.442.753.211,00	Dinas Kesehatan
	14	Program Penyusunan Sistem Informasi Kesehatan	Penyusunan Profil Kesehatan	1 Dokumen	127.725.000,00	1 Dokumen	18.190.000,00	1 Dokumen	242.283.500,00	1 Dokumen	202.858.800,00	1 Dokumen	206.632.332,00	5 Dokumen	982.689.632,00	Dinas Kesehatan
	15	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Kesehatan	Peningkatan Mutu Manajemen Kesehatan	65,00%	306.777.000,00	70,00%	343.959.000,00	80,00%	337.377.500,00	85,00%	243.970.600,00	90,00%	229.217.997,00	90,00%	1.794.560.725,00	Dinas Kesehatan
	16	Program Monitoring Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Irtungannya	Presentase Monitoring dan Pendidikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Irtungannya	80,00%	-	-	-	85,00%	28.111.500,00	90,00%	182.305.400,00	100,00%	335.628.102,00	100,00%	935.538.402,00	Dinas Kesehatan
	17	Program Promosi Kesehatan Ibu, Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	5,00	35.000.000,00	5,00	14.950.000,00	5,00	20.000.000,00	5,00	-	5,00	18.078.556,00	25,00	117.983.076,00	Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	18	Program Pengembangan Bahan Informasi Terjangkau dan Turnover Kembang Anak	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKBI)	9,00	20.000.000,00	11,00	21.000.000,00	13,00	20.000.000,00	20,00	-	28,00	22.199.772,00	25,00	96.374.832,00	Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	19	Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga	Persentase Peningkatan Keahlian Dan Manajemen Olah Raga	50,00%	65.830.000,00	50,00%	-	55,00%	40.000.000,00	60,00%	-	60,00%	31.180.140,00	60,00%	137.010.140,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	20	Program Pembinaan Dan Peningkatan Olah Raga	Jumlah Pemenang Olah Raga	28,00	643.136.650,00	30,00	407.798.800,00	33,00	1.274.271.900,00	35,00	325.000.000,00	36,00	264.929.306,00	36,00	3.818.058.496,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	21	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	Rasio Cakupan Olah Raga Per 1.000 Penduduk	55,00	-	-	-	60,00	120.000.000,00	60,00	170.000.000,00	65,00	215.033.175,00	65,00	589.033.175,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	22	Program Peningkatan Peran Serta Kepedulian	Jumlah Pemuda Pokor	5,00	457.030.000,00	5,00	509.723.100,00	5,00	694.750.500,00	5,00	450.000.000,00	5,00	477.360.398,00	25,00	2.923.862.718,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	23	Program Pengembangan Budaya Bangsa Dan Peningkatan Perputakaan	Jumlah Perputakaan	55,00	952.868.785,00	60,00	1.448.398.875,00	70,00	723.495.250,00	85,00	390.250.000,00	100,00	482.929.155,00	100,00	4.189.248.065,00	Dinas Kearsifan dan Perpustakaan
	T.3	Meningkatnya kondisi Masyarakat yang Aman dan Tertib	5. Indeks Ketertiban, Ketertarikan dan Ketidabsihan (K3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Kepala Hukum	% Pemanfaatan Ketertarikan dan Ketidabsihan (K3) Yang terselesaikan	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	-
	1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Politik Daerah	4,00	48.260.400,00	4,00	20.425.050,00	4,00	166.259.700,00	4,00	202.300.800,00	4,00	212.423.337,00	20,00	808.149.287,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tytuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pencapaian Daerah Jumlah			
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019					
				TARGET (5)	Rp. (Juta) (6)	TARGET (7)	Rp. (Juta) (8)	TARGET (9)	Rp. (Juta) (10)	TARGET (11)	Rp. (Juta) (12)	TARGET (13)	Rp. (Juta) (14)		TARGET (15)	Rp. (Juta) (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	2	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peraturan Perundang- Undangan Daerah	-	4 Kali	70.000.000,00	4 Kali	100.214.500,00	4 Kali	50.000.000,00	8 Kali	190.000.000,00	8 Kali	830.214.500	28 Kali	830.214.500	Satuan Polisi Pamong Praja	
	3	Program Kemitraan Peningkatan Wawasan Kebudayaan	4 Kali	4 Kali	96.913.000,00	4 Kali	43.840.000,00	4 Kali	200.576.250,00	4 Kali	141.824.400,00	8 Kali	100.000.000,00	24 Kali	653.338.650,00	Kantor Kecamatan Bansari dan Pellik	
	4	Program Kebudayaan Kecamatan Kecamatan Sesail	14,00	14,00	7.500.000,00	-	-	7.297.000,00	14,00	7.214.500,00	14,00	7.214.500,00	12,00	6.288.257,00	40,00	40.799.757,00	Kantor Kecamatan Bansari dan Pellik
	5	Program Kebudayaan Dini/Daerah	-	40,00%	28.596.000,00	-	-	105.372.300,00	30,00%	114.203.000,00	25,00%	181.190.290,00	25,00%	181.190.290,00	433.361.590,00	Kantor Kecamatan Bansari dan Pellik	
	6	Program Kerjasama Kerjasama Kerjasama	-	70,00%	65.569.600,00	75,00%	300.718.500,00	80,00%	34.027.000,00	85,00%	24.971.500,00	90,00%	240.000.000,00	90,00%	665.287.000	Kantor Kecamatan Bansari dan Pellik	
	7	Program Kerjasama Kerjasama Kerjasama	-	10 Kali	199.999.000,00	10 Kali	128.433.650,00	3 Kali	90.800.000,00	3 Kali	69.786.571,00	29 Kali	489.039.221,00	29 Kali	489.039.221,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
	8	Program Kerjasama Kerjasama Kerjasama	1.000	1.000	3.854.714.900,00	1.000	3.616.528.850,00	1.000	3.669.577.000,00	1.250	3.534.996.300,00	1.300	3.838.141.908,00	1.500	20.957.185.046,00	Badan Pengelolaan Bencana Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja	
	9	Program Peningkatan Dan Korban Bencana Alam	2,00	3,00	119.824.725,00	11,00	563.421.000,00	15,00	110.741.425,00	20,00	71.859.475,00	25,00	77.659.843,00	25,00	992.591.240,00	Badan Pengelolaan Bencana Daerah	
	10	Program Peningkatan Peningkatan Peningkatan	-	60,00%	500.000.000,00	70,00%	500.000.000,00	80,00%	500.000.000,00	90,00%	500.000.000,00	100,00%	500.000.000,00	100,00%	2.500.000.000,00	Badan Pengelolaan Bencana Daerah	
	11	Program Peningkatan Kecamatan Bencana	-	1 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	5 Dokumen	800.000.000,00	Badan Pengelolaan Bencana Daerah	
	12	Program Kecamatan Kecamatan Kecamatan	-	< 11 menit	1.768.118.200,00	< 11 menit	127.214.000,00	< 11 menit	521.664.400,00	< 11 menit	774.284.400,00	< 11 menit	629.814.646,00	< 11 menit	3.821.043.646,00	Badan Pengelolaan Bencana Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja	
	13	Program Kecamatan Kecamatan Kecamatan	45,00%	50,00%	164.891.500,00	55,00%	200.072.400,00	60,00%	205.000.000,00	65,00%	264.491.260,00	70,00%	264.491.260,00	70,00%	908.436.808,00	Dinas Pengelolaan Bencana Daerah	
	14	Program Kecamatan Kecamatan Kecamatan	7,00	8,00	142.500.000,00	10,00	152.962.500,00	10,00	221.200.000,00	13,00	197.494.290,00	15,00	197.494.290,00	15,00	1.062.299.526,00	Dinas Pengelolaan Bencana Daerah	
	15	Program Peningkatan Peningkatan Peningkatan	30,91%	31,00%	75.000.000,00	35,28%	130.534.000,00	37,01%	395.000.000,00	38,71%	268.820.000,00	40,45%	267.823.337,00	40,49%	1.411.036.561,00	Dinas Pengelolaan Bencana Daerah	
	16	Program Peningkatan Peningkatan Peningkatan	4,00	4,20	188.000.000,00	4,40	194.575.000,00	4,60	235.000.000,00	4,80	270.861.666,00	5,00	270.861.666,00	5,00	1.016.589.106,00	Dinas Pengelolaan Bencana Daerah	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018					Tahun 2019		
				Target (5)	Rp. (Juta) (6)	Tingkat (7)	Target (8)	Rp. (Juta) (9)	Tingkat (10)	Target (11)	Rp. (Juta) (12)	Tingkat (13)	Target (14)	Rp. (Juta) (15)	Tingkat (16)			Target (17)	Rp. (Juta) (18)	Tingkat (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	10	Program Pengembangan Kemandirian Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kelompok Binaan LPM	75,00	42.309.450,00	75,00	229.452.900,00	75,00	391.733.000,00	75,00	95.420.700,00	75,00	116.934.834,00	75,00	675.850.884,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	11	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes/ BUMADES	10,00	159.015.000,00	20,00	163.920.550,00	20,00	16.000.200,00	30,00	66.090.000,00	40,00	64.489.671,00	40,00	544.222.833,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	12	Program Pemberdayaan Kemandirian Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta Hibah/Bantuan Sosial	5,00	14.999.550,00	5,00	34.742.000,00	-	-	5,00	36.874.744,00	25,00	115.672.054,00	25,00	115.672.054,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	13	Program Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Terimakasih Masyarakat Desa	60,00%	561.868.500,00	80,00%	535.738.400,00	80,00%	696.268.000,00	90,00%	639.243.500,00	100,00%	680.981.328,00	100,00%	3.380.031.046,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	14	Program Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan PNPM	Persentase Kegiatan Pendampingan PNPM-MPd Cermat Sehat dan Cerdas	60,00%	87.843.000,00	80,00%	-	80,00%	165.000.000,00	80,00%	150.087.300,00	90,00%	122.224.452,00	90,00%	1.005.991.832,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	15	Program Pengembangan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	50,00%	60.388.000,00	55,00%	111.355.900,00	60,00%	85.000.500,00	70,00%	107.407.100,00	80,00%	124.037.664,00	80,00%	488.189.164,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	16	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.372,00	590.000.000,00	2.809,00	127.310.000,00	3.156,00	86.498.200,00	3.472,00	174.298.000,00	3.472,00	150.000.000,00	3.472,00	1.210.146.572,00	Dinas Perikanan				
	17	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tambak	Produksi Perikanan Tambak (Ton)	21.996,00	22.986,00	24.020,00	1.317.633.000,00	24.581,00	1.758.196.700,00	25.855,00	853.519.000,00	26.760,00	4.775.000.000,00	26.760,00	13.873.889.292,00	Dinas Perikanan				
	18	Program Pengembangan Sistem Perikanan Perikanan	Sistem Perikanan Perikanan (Jah)	2,00	260.000.000,00	4,00	118.790.632,00	4,00	330.000.000,00	3,00	330.000.000,00	2,00	330.000.000,00	2,00	1.351.579.792,00	Dinas Perikanan				
	19	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan (Kg/ Kepala/ Tahun)	31,00	100.000.000,00	31,25	-	31,75	180.000.000,00	32,20	210.000.000,00	32,25	210.000.000,00	32,25	730.000.000,00	Dinas Perikanan				
	20	Program Pengembangan Kemandirian Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kelompok Yang Dibina	15,00	23.014.325,00	15,00	50.000.000,00	20,00	55.000.000,00	25,00	60.000.000,00	30,00	75.000.000,00	30,00	263.014.325,00	Dinas Perikanan				
	21	Program Pengembangan Kemandirian Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase Luasan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	60,00%	1.303.788.250,00	65,00%	879.692.000,00	70,00%	1.219.703.670,00	75,00%	1.524.203.000,00	80,00%	5.760.000.000,00	80,00%	13.043.743.924,00	Dinas Perikanan				
	22	Program Pengembangan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kelompok Yang Dibina	200,00	215.745.400,00	200,00	29.981.500,00	200,00	321.378.200,00	200,00	110.000.000,00	200,00	530.000.000,00	200,00	1.422.413.100,00	Dinas Perikanan				
	23	Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perikanan	Jumlah Kelompok Ekonomi Masyarakat Perikanan Yang Dibina dan Diperhatikan	70,00	2.924.660.950,00	77,00	649.508.260,00	85,00	660.000.000,00	100,00	630.000.000,00	120,00	4.180.000.000,00	120,00	12.044.395.382,00	Dinas Perikanan				
	24	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Masyarakat Pengawas Perikanan dan Kelautan Yang Dibina	15,00	75.000.000,00	16,00	205.000.000,00	-	-	19,00	100.000.000,00	19,00	100.000.000,00	19,00	410.000.000,00	Dinas Perikanan				
	25	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran, Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi dan Hasil Olahan (Ton)	1.775,00	1.925,00	2.148,00	82.812.000,00	2.362,00	432.200.900,00	2.559,00	152.300.000,00	2.859,00	3.000.000.000,00	2.859,00	7.215.961.024,00	Dinas Perikanan				
	26	Program Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemakai Hasil Perikanan Yang Dibina	120,00	74.976.550,00	150,00	47.829.500,00	165,00	123.151.500,00	180,00	437.550.000,00	195,00	30.000.000,00	195,00	735.747.500,00	Dinas Perikanan				
	27	Program Pengembangan Produk Perikanan	Produksi Tambak Perikanan (Ton)	100.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	472.244.460,00	200.000,00	694.806.692,00	Dinas Kelautan, Perikanan, Perikanan dan Perikanan				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujukan / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan	Peringkat Daerah Penanganannya	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)
	4	Program Transmigrasi Lokal	55,00%	60,00%	32.285.000,00	65,00%	141.879.200,00	70,00%	23.712.400,00	75,00%	25.853.000,00	80,00%	141.879.200,00	80,00%	394.438.224,00	Dinas Transmigrasi
	5	Program Pengembangan Pelayanan Masyarakat Bidang Kesehatan	45,00%	50,00%	12.140.100,00	55,00%	2.300.000,00	60,00%	10.000.000,00	65,00%	10.000.000,00	70,00%	10.000.000,00	70,00%	69.895.800,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6	Program Keluarga Berencana	65,00%	70,00%	290.000.000,00	75,00%	138.689.200,00	80,00%	388.000.000,00	90,00%	1.675.945.000,00	100,00%	2.320.733.037,00	100,00%	5.142.546.637,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	7	Program Pelayanan Kesehatan	35,00%	40,00%	87.000.000,00	45,00%	67.039.600,00	50,00%	70.000.000,00	60,00%	-	70,00%	68.802.978,00	70,00%	367.842.578,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	50,00%	55,00%	20.000.000,00	60,00%	16.450.000,00	65,00%	20.000.000,00	70,00%	45.292.000,00	75,00%	58.090.239,00	75,00%	172.882.319,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	9	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	55,00%	60,00%	2.277.381.000,00	65,00%	1.197.471.100,00	70,00%	1.373.800.000,00	80,00%	2.118.690.500,00	90,00%	2.541.421.058,00	90,00%	10.561.906.578,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	10	Program Pengabdian Masyarakat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	3,00%	4,00%	110.000.000,00	5,00%	26.250.200,00	5,00%	188.000.000,00	7,00%	51.575.000,00	10,00%	55.814.834,00	10,00%	465.384.626,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	11	Program Penyediaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	35,00%	40,00%	50.000.000,00	45,00%	22.450.900,00	50,00%	50.000.000,00	75,00%	202.250.000,00	100,00%	340.625.807,00	100,00%	680.252.707,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	12	Program Pengabdian Sarana dan Pelayan KB	55,00%	60,00%	1.815.619.000,00	65,00%	955.847.000,00	70,00%	1.390.294.600,00	80,00%	792.000.000,00	90,00%	692.570.474,00	90,00%	7.071.558.274,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	8.9	Memperkuat Daya Saing Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, UMMKM, dan Pariwisata	2.442.677.300,00	2.513.050.500,000	2.442.677.300,00	2.688.748.500,000	2.776.162.500,000	2.866.418.300,000	2.866.418.300,000	2.866.418.300,000	2.866.418.300,000	2.866.418.300,000	2.866.418.300,000	2.866.418.300,000	2.866.418.300,000	
	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	35,00%	40,00%	163.285.000,00	45,00%	113.302.000,00	50,00%	239.000.000,00	60,00%	-	70,00%	335.190.710,00	70,00%	912.553.970,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perkebunan dan Perindustrian
	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	35,00%	40,00%	599.140.100,00	45,00%	341.137.200,00	50,00%	169.868.000,00	75,00%	264.800.000,00	100,00%	267.013.383,00	100,00%	2.488.767.567,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perkebunan dan Perindustrian

Kode	Misi/Program/Asasran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan (17)	Peningkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (9)	Rp. (Juta) (6)	Target (7)	Rp. (Juta) (8)	Target (9)	Rp. (Juta) (10)	Target (11)	Rp. (Juta) (12)	Target (13)	Rp. (Juta) (14)	Target (15)	Rp. (Juta) (16)	Target (17)	Rp. (Juta) (18)								
																		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
3	Program Pengembangan Sistem Perilaku Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Jumlah UMK Yang Melakukan Kemitraan	35,00	40,00	713.654.600,00	45,00	143.365.900,00	50,00	175.287.500,00	75,00	125.650.000,00	100,00	95.989.400,00	100,00	1.741.674.992,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri									
4	Program Peningkatan Kualitas Kemitraan Koperasi	Rasio Jumlah Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi	1,00	1,00	668.103.303,00	1,00	190.578.000,00	1,00	171.326.500,00	1,00	196.106.500,00	1,00	211.444.391,00	1,00	1.572.135.770,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri									
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penghargaan Peringkat Satu Dan Dua	1,00	1,00	607.702.800,00	1,00	166.406.600,00	2,00	806.575.200,00	2,00	812.117.900,00	2,00	720.720.190,00	2,00	3.471.858.890,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
6	Program Peningkatan Kualitas Budaya	Jumlah Bendah, Sita dan Koperasi Cagar Budaya yang Diberikan	10,00	15,00	25.028.300,00	15,00	14.448.300,00	15,00	39.518.300,00	15,00	43.470.130,00	15,00	47.817.143,00	15,00	200.282.173,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
7	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kebijakan Budaya	Jumlah Tersepa Teknis/Juru Pelihara Tempel Berjilid	-	10,00	72.000.000,00	10,00	75.000.000,00	15,00	82.200.000,00	20,00	90.420.000,00	25,00	99.462.000,00	25,00	419.082.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata	10,00	10,00	115.000.000,00	10,00	43.085.650,00	10,00	15.000.000,00	10,00	-	10,00	5.458.403,00	10,00	1.046.568.879,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata									
9	Program Pengembangan Pariwisata	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	28,28%	28,28%	188.800.000,00	24,62%	93.826.000,00	30,31%	194.352.000,00	32,49%	45.000.000,00	34,82%	33.082.456,00	34,82%	764.610.456,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata									
10	Program Pengembangan Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	-	20,00	245.000.000,00	20,00	583.401.150,00	20,00	750.000.000,00	20,00	750.000.000,00	20,00	992.033.419,00	20,00	3.320.454.569,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata									
11	Program Pengembangan Kemitraan Perikanan	Jumlah Forum Kemitraan Antar Pihak Wisata	2,00	2,00	296.000.000,00	2,00	663.885.250,00	2,00	3.120.000.000,00	2,00	178.000.000,00	2,00	-	2,00	74.703.384.161,78	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata									
12	Program Peningkatan dan Peningkatan Perikanan	Luas Tanam Padi (Ha)	59.945,00	52.679,00	23.402.659.300,00	45.360,00	5.371.332.033,78	52.000,00	5.161.835.408,00	53.000,00	5.036.600.000,00	54.000,00	30.667.907.500,00	54.000,00	15.157.762.500,00	Dinas Pertanian									
13	Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Produksi Padi (Ton)	-	180.426,00	2.300.000.000,00	155.358,00	2.635.000.000,00	191.800,00	2.985.000.000,00	202.075,00	3.387.750.000,00	208.925,00	3.850.012.500,00	208.925,00	6.619.438.600,00	Dinas Pertanian									
14	Program Peningkatan Produktivitas Perikanan/Perikanan	Persentase Produktivitas Produk Padi per Ha	50,00%	60,00%	3.437.190.200,00	70,00%	778.471.600,00	80,00%	893.434.900,00	90,00%	266.962.000,00	100,00%	1.241.379.900,00	100,00%	6.619.438.600,00	Dinas Pertanian									
15	Program Peningkatan Kelangkaan Pangan (Pertanian/Perikanan)	Shor PPH	81,70%	82,50%	3.713.126.108,00	83,60%	457.427.450,00	86,40%	917.956.550,00	89,10%	556.216.500,00	91,80%	2.205.634.300,00	91,80%	7.850.360.908,00	Dinas Pertanian									
16	Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Perikanan	Produksi Jeruk (Ton/Ha)	-	30,00	1.520.000.000,00	30,00	1.718.000.000,00	30,00	1.945.250.000,00	30,00	2.207.137.500,00	30,00	2.508.708.125,00	30,00	9.899.095.625,00	Dinas Pertanian									
17	Program Peningkatan Peningkatan Teknologi Perikanan/Perikanan	Jumlah Komoditas Yang Bermanfaat	10,00	10,00	392.530.000,00	10,00	346.528.000,00	-	-	-	-	10,00	271.810.403,00	10,00	1.728.918.473,00	Dinas Pertanian									
18	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan/Perikanan	Cakupan Pemasaran Hasil Perikanan/Perikanan	Skala Daerah	Skala Daerah	5.226.506.800,00	Skala Daerah	1.503.115.665,00	Skala Daerah	522.558.710,00	Skala Daerah	251.007.000,00	Skala Nasional	1.907.579.798,00	Skala Nasional	16.459.316.613,00	Dinas Pertanian									
19	Program Peningkatan Kesehatan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,00	101,00	201.018.000,00	101,00	120.074.875,00	102,00	200.000.000,00	102,00	250.000.000,00	103,00	300.000.000,00	103,00	1.891.781.383,00	Dinas Pertanian									
20	Program Pemberdayaan Penyuluh Perikanan/Perikanan	Rasio Kelompok Penyuluh Perikanan/Perikanan	23,00	23,00	2.540.168.000,00	22,00	1.888.020.491,00	22,00	1.546.267.100,00	21,00	955.018.900,00	20,00	1.833.376.494,00	20,00	9.461.159.185,00	Dinas Pertanian									
21	Program Sistem Informasi/Database Pertanian	Terselangnya Sistem Informasi/Database Pertanian	Tersedia	Tersedia	128.119.000,00	Tersedia	129.105.225,00	Tersedia	126.760.800,00	Tersedia	109.972.700,00	Tersedia	114.415.888,00	Tersedia	698.588.383,00	Dinas Pertanian									

Kode	Misi/Tujuan/Asas/Program/Perencanaan Daerah	Indikator Kinerja (Tipe dan / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja RPJMD Perubahan (Tahun 2019)	Pernyataan Daerah (17)			
				Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018					Tahun 2019		
				Target (5)	Rp. (Juta) (6)	Target (7)	Target (8)	Rp. (Juta) (9)	Target (10)	Rp. (Juta) (11)	Target (12)	Rp. (Juta) (13)	Target (14)	Rp. (Juta) (15)	Target (16)			Rp. (Juta) (17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	22	Program Pengembangan Kelembagaan Keagamaan	Jumlah Penerima Hibah/ Bantuan Sosial	-	15.000.000,00	3,00	17.902.200,00	3,00	18.092.900,00	3,00	-	19.259.595,00	15,00	70.254.695,00	Dinas Pertanian					
	23	Program Peridangan Komunitas Dan Peridangan Peridangan	Jumlah Sengketa Konsumen Yang Tertangani	100,00	2.546.814.000,00	100,00	102.459.100,00	-	-	-	-	-	100,00	91.949.104,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan					
	24	Program Pengembangan Ekonomi Peridangan Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Formal Yang Mendapatkan Ijin Usaha	30,00	299.899.000,00	40,00	144.928.700,00	50,00	255.095.650,00	50,00	226.393.500,00	60,00	216.914.970,00	60,00	1.516.615.614,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan				
	25	Program Pelatihan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Jumlah Pelatihan Pedagang Kaki Lima	-	-	1 Kali	1.676.410.600,00	1 Kali	2.957.157.000,00	1 Kali	5.189.000.000,00	1 Kali	7.562.256.923,00	5 Kali	17.384.824.523,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan				
	26	Program Pengabdian dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Produk Berkualitas Ekspor	-	-	-	-	1,00	80.436.600,00	2,00	61.490.300,00	3,00	53.762.947,00	3,00	195.689.847,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan				
	27	Program Penyelenggaraan Metrologi Legal dan	Jumlah Pelayanan Tern/ Tern Ulang Alat UTPP (Ukr, Taker, Timbangan dan	4 Kali	2.153.413.730,00	4 Kali	97.643.580,00	4 Kali	389.430.000,00	4 Kali	278.853.500,00	4 Kali	210.552.202,00	20 Kali	4.266.100.524,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan				
	28	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Tingkat Pertumbuhan Industri (Kecil, Menengah, Besar)	4,40%	31.890.000,00	4,60%	2.960.000,00	4,80%	-	-	-	5,30%	658.112,00	5,30%	138.934.072,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan				
	29	Program Peningkatan Struktur Industri	Pendataan Industri Inti/ Pribasi	1,00	28.999.950,00	1,00	24.572.900,00	1,00	131.419.700,00	1,00	31.848.500,00	1,00	27.223.789,00	1,00	313.654.499,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan				
	30	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Perikanan	Jumlah Sentra Yang Telah Membentuk Asosiasi Atau Segelintir	5,00	291.771.900,00	5,00	399.147.325,00	5,00	244.040.000,00	5,00	268.119.000,00	5,00	238.648.293,00	5,00	1.921.652.086,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan				
	31	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM Yang Merupakan Teknologi Industri Tepat Ciri	10,00	40.500.000,00	10,00	24.572.900,00	-	-	-	-	-	10,00	20.531.911,00	10,00	126.174.811,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan			
Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sarana, Prasarana, Layanan Dan Masyarakat																				
Tujuan :																				
T.5 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur, Tana Ruang dan Konektivitas																				
Sasaran :																				
	S.10	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Indeks Mobilitas	0,30	0,55	0,60	0,65	0,75	0,85	0,80	0,85	0,80	0,85	0,80	0,85	0,80				
	1	Program Pengembangan Jalan Dan Jembatan	Rasio Panjang Jalan Kabupaten dan Jembatan Kontrol Baik Dan Sedang	36,00%	153.760.584.675,00	52,00%	190.638.180.700,00	59,00%	214.335.888.902,00	67,00%	252.373.898.500,00	75,00%	285.044.465.592,00	75,00%	1.233.463.456.469,00	Dinas Pekerjaan Umum dan				
	2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/ Jembatan Kabupaten	70 Km	21.537.149.800,00	75 Km	23.492.106.800,00	75 Km	11.812.600.100,00	75 Km	922.016.700,00	75 Km	460.960.989,00	75 Km	88.144.529.089,00	Dinas Pekerjaan Umum dan				
	3	Program Tanggapi Dampak Jalan Dan Jembatan	Rasio Panjang Jalan dan Jembatan Ruak Akibat Bencana Yang Dirahibitasi	-	-	-	-	80,00%	63.890.676.000,00	90,00%	8.330.544.000,00	100,00%	3.008.093.299,00	100,00%	75.229.313.299,00	Dinas Pekerjaan Umum dan				
	4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan	Terselengkapnya Sarana Dan Prasarana Kesehatan	65,00%	7.513.603.200,00	70,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	7.513.603.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan				
	5	Program Peningkatan Perencanaan Jalan Umum	Pemertaaan Perencanaan Jalan (R/U) Dalam Kontrol Baik	60,00%	3.380.330.030,00	70,00%	2.515.807.700,00	78,00%	17.195.329.500,00	80,00%	7.776.463.500,00	85,00%	9.773.128.370,00	85,00%	40.857.256.759,00	Dinas Pekerjaan Umum dan				

Kode	Misi/Program/Strategi/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Rujukan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peningkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018				Tahun 2019		
				TARGET (5)	Rp. (Juta) (6)	Target (7)	TARGET (8)	Rp. (Juta) (9)	Target (10)	TARGET (11)	Rp. (Juta) (12)	Target (13)	TARGET (14)	Rp. (Juta) (15)	Target (16)		Rp. (Juta) (17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	6	Jumlah Perbaikan dan Balok	7 Unit	8 Unit	29.346.516.300,00	9 Unit	16.312.494.500,00	10 Unit	26.299.024.850,00	13 Unit	25.767.812.300,00	20 Unit	25.119.402.822,00	20 Unit	152.114.582.204,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	7	Rasio Rumah Layak Huni	-	-	-	-	-	70,00%	349.451.000,00	75,00%	249.625.000,00	80,00%	210.978.875,00	80,00%	810.054.875,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			
	8	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	55,00%	60,00%	3.000.000,00	65,00%	1.400.000,00	70,00%	55.164.800,00	75,00%	619.989.900,00	80,00%	404.863.000,00	80,00%	1.085.817.700,00	Dinas Perhubungan			
	9	Persentase Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	55,00%	60,00%	697.016.000,00	65,00%	683.791.000,00	70,00%	359.535.000,00	75,00%	435.051.900,00	80,00%	2.947.640.000,00	80,00%	5.123.033.900	Dinas Perhubungan			
	10	Jumlah Buku Uji dan Plat Tanda Uji Bermotor	950 Buku Uji, 8.500 Plat Tanda Uji	1.000 Buku Uji, 8.300 Plat Tanda Uji	256.010.000,00	1.500 Buku Uji, 3.000 Plat Tanda Uji, 3.555 Siker	391.962.350,00	3.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 1.480 Siker	639.071.600,00	4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Siker	648.093.000,00	4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Siker	1.749.268.000,00	4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Siker	4.269.495.250,00	Dinas Perhubungan			
	11	Persentase/ Tingkat Penilaian Dermaga Sungai dan Penyelenggaraan	65,00%	70,00%	250.000.000,00	75,00%	-	80,00%	500.000.000,00	85,00%	800.000.000,00	90,00%	400.000.000,00	90,00%	1.950.000.000,00	Dinas Perhubungan			
	12	Persentase/ Tingkat Penilaian Terminal Angkutan Darat	65,00%	70,00%	75.000.000,00	-	-	85,00%	350.000.000,00	90,00%	459.999.200,00	90,00%	200.000.000,00	90,00%	625.000.000,00	Dinas Perhubungan			
	13	Persentase/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	65,00%	70,00%	1.560.297.726,00	75,00%	4.187.628.900,00	80,00%	4.741.419.500,00	85,00%	4.559.999.200,00	90,00%	24.200.000.000,00	90,00%	43.423.433.222,00	Dinas Perhubungan			
	14	Persentase/ Peningkatan Fasilitas Perhubungan	35,00%	40,00%	956.818.500,00	45,00%	339.154.000,00	50,00%	396.382.500,00	60,00%	403.854.000,00	70,00%	425.209.130,00	70,00%	2.833.546.630,00	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD			
	15	Persentase/ Peningkatan Fasilitas Perhubungan	35,00%	40,00%	956.818.500,00	45,00%	339.154.000,00	50,00%	396.382.500,00	60,00%	403.854.000,00	70,00%	425.209.130,00	70,00%	2.833.546.630,00	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD			
	S.11	Meningkatnya Peningkatan Tata Ruang Wilayah	60,00%	65,00%	-	70,00%	-	75,00%	-	80,00%	-	85,00%	-	85,00%	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya	-	1 Dokumen	752.682.700,00	-	-	-	-	1 Dokumen	2.339.081.000,00	-	4.123.461.318,00	3 Dokumen	7.215.225.018	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	2	Terselenggaranya SOP Layanan Informasi Dan Kependidikan Tata Ruang	Ada	Ada	446.095.900,00	Ada	384.642.100,00	Ada	1.504.702.500,00	Ada	1.219.118.000,00	Ada	1.561.438.938,00	Ada	5.529.906.494,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	3	Kemajuan Terhadap RTRW	65,00%	70,00%	234.404.500,00	-	-	100,00%	395.765.500,00	100,00%	347.241.500,00	100,00%	363.297.130,00	100,00%	1.630.516.550,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	4	Persentase Peningkatan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	35,00%	40,00%	36.214.550.900,00	45,00%	31.733.151.000,00	-	-	50,00%	42.199.616.013,00	50,00%	123.637.604.953,00	50,00%	123.637.604.953,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	5	Peningkatan Areal Pemukiman	1 : 6	1 : 6	3.286.546.200,00	1 : 6	266.442.000,00	-	-	1 : 6	151.984.208,00	1 : 6	5.140.512.578,00	1 : 6	5.140.512.578,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			
	6	Persentase Identifikasi Wilayah dan Komunitas Transmigrasi	45,00%	50,00%	1.125.689.600,00	50,00%	1.085.000,00	55,00%	214.631.500,00	60,00%	44.847.500,00	65,00%	1.125.689.600,00	65,00%	2.769.945.640,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	7	Persentase Peningkatan Wilayah Administrasi Desa	100,00%	100,00%	233.225.300,00	100,00%	519.046.600,00	100,00%	304.951.000,00	100,00%	147.225.000,00	100,00%	126.495.266,00	100,00%	1.665.368.850,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

Kode	Misi/Tujuan/Asas/Program/Perencanaan Daerah	Indikator Kinerja (Tahun / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan (Rp. (Juta))	Peringkat Daerah Penanggung Jawab (17)			
				Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018					Tahun 2019		
				Target (5)	Rp. (Juta) (6)	TARGET (7)	Target (8)	Rp. (Juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (Juta) (11)	Target (12)	Rp. (Juta) (13)	Target (14)	Rp. (Juta) (15)	Target (16)			Rp. (Juta) (17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	8	Program Perencanaan Tata Ruang	60,00%	60,50%	213.746.700,00	70,00%	189.767.100,00	75,00%	1.170.547.300,00	80,00%	194.500.000,00	85,00%	139.812.217,00	85,00%	2.921.799.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	9	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	-	100,00%	40.373.000,00	-	-	100,00%	993.750.000,00	100,00%	1.131.500.000,00	100,00%	3.518.130.479,00	100,00%	5.103.773.479,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	S.12	Meningkatkan Layanan Sanitasi	42,50%	45,00%	-	47,50%	-	50,00%	-	55,00%	-	60,00%	-	60,00%	-	27.422.779.084,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	20,00%	25,00%	6.573.303.850,00	30,00%	3.091.528.000,00	34,00%	3.419.669.600,00	45,00%	3.110.232.500,00	50,00%	2.532.157.034,00	50,00%	27.422.779.084,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	2	Program Pengembangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	-	2,00	1.709.229.850,00	3,00	758.941.850,00	-	-	-	-	-	-	-	2.468.171.760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	3	Program Pengembangan Ketersediaan Air Minum dan Air Limbah Yang Aman dan Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai	55,90%	56,05%	3.710.216.900,00	62,00%	1.740.199.000,00	66,36%	8.396.384.894,00	65,00%	5.933.750.000,00	70,00%	6.072.535.105,00	70,00%	31.141.063.249,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	4	Program Pemeliharaan Air Baku	45,00%	50,00%	1.006.223.000,00	55,00%	563.515.000,00	60,00%	351.965.000,00	65,00%	3.947.000,00	70,00%	1.202.405,00	70,00%	3.431.202.905,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	5	Program Pemeliharaan Bantjar	65,00%	70,00%	7.089.996.350,00	75,00%	4.202.655.150,00	80,00%	2.404.156.850,00	85,00%	204.728.200,00	90,00%	99.139.589,00	90,00%	21.688.978.139,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	6	Program Pemeliharaan Saluran Air Limbah	50,00%	55,00%	8.456.695.600,00	60,00%	3.371.283.100,00	-	-	-	-	75,00%	3.399.559.756	75,00%	18.197.238.456,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	7	Program Pengembangan Kesehatan Masyarakat	50,00%	55,00%	2.521.180.600,00	60,00%	1.357.914.600,00	65,00%	4.566.988.900,00	70,00%	-	75,00%	5.728.560.248,00	75,00%	16.019.523.148,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	S.13	Meningkatkan Pelayanan Publik	Baik	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Baik	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	1	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	60,00%	65,00%	1.296.931.600,00	70,00%	711.272.000,00	75,00%	818.476.800,00	80,00%	887.156.400,00	85,00%	765.933.530,00	85,00%	6.329.012.230,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	2	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	115,00	-	-	75,00	88.014.400,00	0,00	124.708.000,00	0,00	222.278.950,00	0,00	302.700.546,00	0,00	737.701.896,00	Badan Penyelenggara Daurat, Semua Kecamatan				
	3	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	70,00%	-	-	-	-	80,00%	88.107.950,00	90,00%	-	100,00%	87.176.894,00	100,00%	265.284.844,00	Badan Penyelenggara Daurat, Semua Kecamatan				
	4	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Baik	Baik	3.053.477.950,00	Baik	1.301.369.695,00	Baik	1.563.555.831,00	Baik	471.335.000,00	Baik	299.503.158,00	Baik	11.239.998.014,00	Dinas Penyelenggaraan Daurat, Semua Kecamatan				
	5	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	298.773.950,00	1 Dokumen	172.576.500,00	1 Dokumen	232.119.090,00	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	64.902.504,00	1 Dokumen	940.532.054,00	Dinas Penyelenggaraan Daurat, Semua Kecamatan				
	6	Program Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.593.700,00	1 Dokumen	39.140.000,00	1 Dokumen	81.250.000,00	1 Dokumen	60.245.000,00	1 Dokumen	67.783.266,00	1 Dokumen	286.011.966,00	Dinas Penyelenggaraan Daurat, Semua Kecamatan				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujua / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				TARGET (5)	Rp. (Juta) (6)	TARGET (7)	Rp. (Juta) (8)	TARGET (9)	Rp. (Juta) (10)	TARGET (11)	Rp. (Juta) (12)	TARGET (13)	Rp. (Juta) (14)	TARGET (15)	Rp. (Juta) (16)	
	7	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam	DDI < 1	75.280.000,00	DDI < 1	121.595.153,00	DDI < 1	103.158.559,00	DDI < 1	130.000.000,00	DDI < 1	114.376.081,00	DDI < 1	791.004.673,00	Dinas Perumahan, Kewasari, Kewasari dan Lingkungan Hidup	
	8	Program Pengembangan Kinerja Pembelajaran Sampah	40,00%	22.188.594.750,00	50,00%	10.216.325.700,00	55,00%	13.906.053.496,00	65,00%	16.304.061.975,00	75,00%	18.680.876.231,00	75,00%	89.919.490.580,00	Dinas Perumahan, Kewasari, Kewasari dan Lingkungan Hidup	
	9	Program Pengelolaan Ruang Terpadu Hiliris (RTH)	35,00%	4.040.953.950,00	37,00%	2.235.131.600,00	38,00%	2.700.768.400,00	39,00%	1.804.878.600,00	40,00%	1.917.573.498,00	40,00%	14.061.606.048,00	Dinas Perumahan, Kewasari, Kewasari dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

148

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Program prioritas baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Bupati pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan wajib dan pilihan dapat diselenggarakan setiap tahun. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kubu Raya berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan Bupati.

Berkenaan dengan Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD Perubahan, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas ditetapkan baik dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang pehitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah yang strategis dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mengetahui Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 7.1. di bawah.

Sedangkan berkenaan dengan indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dapat dilihat pada Tabel 7.2. di bawah.

A

Tabel 7.1.
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RPJMD PERUBAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014-2019

No.	Uraian	Pertumbuhan %	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
2	BELANJA	9,65%	1.034.435.209.629,33	1.308.457.979.940,00	1.312.796.446.926,06	1.402.898.121.931,88	1.489.163.569.226,31	1.639.904.991.516,83
2.1	Belanja Tidak Langsung	12,52%	492.507.388.266,33	602.949.645.810,00	701.293.442.050,00	716.000.978.363,00	821.018.601.809,31	888.340.795.304,56
2.1.1	Belanja Pegawai	4,13%	459.863.440.395,00	528.724.696.223,00	538.676.298.768,00	507.401.696.500,00	554.815.751.959,31	563.065.917.822,40
2.1.2	Belanja Bunga	7,18%	-	-	-	-	1.110.000.000,00	1.569.777.054,23
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00%	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	102,45%	4.766.077.440,00	4.688.000.000,00	8.919.439.025,00	13.441.420.000,00	61.653.208.550,00	162.093.184.329,83
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,85%	2.961.527.608,33	1.271.525.585,00	825.199.000,00	1.295.000.000,00	1.990.000.000,00	3.090.297.340,29
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	38,23%	-	-	-	8.184.404.600,00	19.110.696.200,00	41.298.684.236,01
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	52,47%	24.688.805.000,00	68.265.424.002,00	145.328.885.200,00	180.323.787.100,00	181.838.945.100,00	203.401.608.880,17
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-100,00%	227.537.823,00	-	7.543.620.057,00	5.354.670.163,00	500.000.000,00	128.725.652,89
2.2	Belanja Langsung	6,78%	541.927.821.363,00	705.508.334.130,00	611.503.004.876,06	686.897.143.568,88	668.144.967.417,00	752.266.229.760,41
2.2.1	Belanja Pegawai	6,63%	48.813.960.114,00	44.464.306.041,00	46.120.205.650,00	57.085.914.400,00	59.329.998.000,00	67.292.379.109,31
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,11%	180.298.581.264,00	294.845.345.559,00	264.535.097.640,06	373.637.834.631,88	299.923.520.590,00	319.355.306.932,98
2.2.3	Belanja Modal	3,24%	312.815.279.985,00	366.198.682.530,00	300.847.701.586,00	256.173.394.537,00	308.891.448.827,00	366.855.787.012,91

Tabel 7.2.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Bidang Urusan Pencapaian dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Taruhan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangko Dua Pencapaian Jawab (18)				
			TARGET (4)	Rp. (Juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (Juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (Juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (Juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (Juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (Juta) (15)			TARGET (16)	Rp. (Juta) (17)		
URUBAN WALUB 1 Terkait Pelayanan Dasar	1 Pendidikan Dasar	1 Program Wajah Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun SD/SDLB/MI/Paket A	112,94%	54.484.233.702,00	113,82%	32.386.740.170,00	113,82%	19.557.200.195,00	109,58%	4.421.277.000,00	109,58%	4.863.404.700,00	109,58%	5.349.245.170,00	106,42%	106.428.174.067,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			62,72%	-	62,82%	2.142.648.900,00	62,86%	-	64,58%	4.421.277.000,00	65,00%	-	66,00%	5.349.245.170,00	66,00%	19.647.325.770,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			97,68%	-	97,74%	2.142.648.900,00	97,73%	596.966.673,00	97,79%	661.643.850,00	97,79%	780.085.900,00	98,00%	858.094.490,00	98,25%	943.903.939,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			56,82%	-	66,73%	-	76,58%	-	78,56%	-	80,00%	-	81,50%	-	81,50%	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			100,00%	223.433.856,00	100,00%	1.956.055.400,00	100,00%	100,00%	100,00%	5.085.133.950,00	100,00%	5.319.292.500,00	100,00%	5.684.131.750,00	100,00%	6.252.544.925,00	100,00%	24.520.612.381,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			5,00	34.951.424,00	2,00	10.913.000,00	2,00	180.000.000,00	3,00	172.470.000,00	2,00	180.000.000,00	3,00	198.000.000,00	2,00	217.800.000,00	15,00	948.270.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			-	-	3,00	-	-	-	-	-	60,454.881.629,00	101,61%	180.000.000,00	102,50%	198.000.000,00	103,25%	217.800.000,00	15,00	948.270.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			-	-	-	-	-	-	-	-	27.982.581.227,00	90,02%	4.281.500,00	91,00%	12.196.573.090,00	91,25%	13.416.010.399,00	91,25%	53.594.964.716,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2 Kesehatan	1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Cakupan Perilaku Yang Memiliki Jumlah Kesehatan	60,00%	8.999.099.156,00	70,00%	5.909.273.380,00	75,00%	9.399.072.013,00	80,00%	39.270.577.003,00	85,00%	47.005.763.934,00	90,00%	65.424.712.125,00	90,00%	176.008.467.613,00	Dinas Kesehatan
93,55%	249.742.600,00	75,00%				352.273.873,00	80,00%	163.860.000,00	85,00%	285.292.000,00	90,00%	200.540.800,00	95,00%	191.930.841,00	95,00%	1.443.640.116,00	Dinas Kesehatan			
93,55%	3.747.433.590,00	95,00%				4.164.677.650,00	100,00%	2.544.611.440,00	100,00%	3.696.418.284,00	100,00%	5.126.122.300,00	100,00%	5.457.578.197,00	100,00%	24.736.841.461,00	Dinas Kesehatan			
65,00%	80.785.036,00	70,00%				150.048.000,00	70,00%	24.602.800,00	75,00%	46.963.000,00	80,00%	146.433.000,00	90,00%	164.957.009,00	90,00%	613.809.745,00	Dinas Kesehatan			
55,00%	-	65,00%				-	70,00%	-	75,00%	-	80,00%	-	80,00%	-	90,00%	-	-	-	-	
-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tipe / Impact / Outcome)	Kondisi Klasifikasi Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peringkat Daerah Penerimaan Jumlah (18)												
			Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016					Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
			TARGET (4)	Rp. (Juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (Juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (Juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (Juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (Juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (Juta) (15)		TARGET (16)	Rp. (Juta) (17)	TARGET (18)	Rp. (Juta) (19)								
5	Program Pengabdian Sosial dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pelayanan/Pelayanan Pembantu dan Jaringannya Yang Memiliki Sarana dan Pelayanan Sesuai Standar	6,00	9.288.591.000,00	8.152.286.431,00	8.874.845.155,00	13.473.226.500,00	46.393.110.600,00	63.996.305.282,00	150.178.264.868,00	Dinas Kesehatan																	
			6,00	28.002.400,00	8,00	37.910.000,00	10,00	37.910.000,00	12,00	44.109.593,00	20,00	110.021.993,00	Dinas Kesehatan														
			6,00	11.072.303.214,00	21.781.484.985,00	24.744.757.000,00	7.667.634.300,00	2.250.541.000,00	1.636.427.319,00	69.153.147.818,00	Dinas Kesehatan																
			1,13%	1.25%	1,46%	1,01%	1,59%	3,08%	4,71%	4,71%	Dinas Kesehatan																
			1.874.662.708,00	1.441.777.500,00	1.436.567.920,00	1.120.766.000,00	1.137.834.400,00	1.029.698.887,00	8.041.307.415,00	Dinas Kesehatan																	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan																
			9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	29,73%	312.690.500,00	462.536.500,00	103.724.250	464.926.000,00	204.196.800,00	187.514.899,00	1.737.588.949,00	Dinas Kesehatan														
			1	Perentase prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Baduta (Bawah 2 Tahun) dan Pembidayaan Masyarakat	29,50%	29,10%	29,00%	28,80%	28,75%	28,50%	28,50%	Dinas Kesehatan; Sekretariat Daerah															
			75,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	90,00%	90,00%	17.701.556.131,00	Dinas Kesehatan; Sekretariat Daerah															
			11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	24,00	278.377.120,00	262.673.500,00	157.305.500,00	208.168.000,00	72.974.200,00	55.831.141,00	1.035.329.461,00	Dinas Kesehatan														
			1	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Santitas Total Berbasis Masyarakat (STEM)	24,00	24,00	24,00	32,00	39,00	45,00	45,00	Dinas Kesehatan															
			12	Program Peningkatan Kesehatan Lanjutan	-	479.523.200,00	666.894.000,00	867.366.400,00	4.974.583.000,00	4.210.786.200,00	6.502.403.331,00	17.701.556.131,00	Dinas Kesehatan														
			1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lanjutan	70,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%	95,00%	100,00%	359.989.738,00	Dinas Kesehatan														
			13	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	88,00%	403.687.980,00	1.589.315.100,00	2.406.769.500,00	2.672.048.000,00	2.599.017.600,00	3.771.915.031,00	13.442.753.211,00	Dinas Kesehatan														
			1	Cakupan Persalinan Yang Dilolong Oleh Nakes Yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan	89,00%	89,00%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%	Dinas Kesehatan															
			14	Program Penyusunan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	185.000.000,00	127.725.000,00	18.190.000,00	242.283.500,00	202.838.800,00	206.632.232,00	982.689.632,00	Dinas Kesehatan														
1	Penyusunan Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	982.689.632,00	Dinas Kesehatan																		
15	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Kecamatan	60,00%	333.258.628,00	306.777.000,00	343.959.000,00	337.377.500,00	243.970.600,00	229.217.997,00	1.794.560.725,00	Dinas Kesehatan																	
1	Perentase Peningkatan Mutu Manajemen Kecamatan	65,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	935.538.402,00	Dinas Kesehatan																	
16	Program Monitoring Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Jaringannya	75,00%	7.188.000,00	7.188.000,00	7.188.000,00	28.111.500,00	182.505.400,00	535.628.102,00	935.538.402,00	Dinas Kesehatan																	
1	Persentase Monitoring dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Jaringannya	80,00%	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%	100,00%	100,00%	935.538.402,00	Dinas Kesehatan																	
3	Urusan Pekerjaan Umum Dasa Perencanaan Ruang																										
1	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan		137.310.438.100,00	153.760.584.675,00	190.638.180.700,00	214.335.888.902,00	252.373.898.500,00	285.044.465.592,00	1.233.463.456.469,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tajuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Pernyataan Daerah Pemerintah Jember (18)			
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019					
			TARGET (4)	Rp. (Juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (Juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (Juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (Juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (Juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (Juta) (15)				
16	Program Pengembangan Wilyah Strategis dan Cepat Tumbuh	1	30,00%	35,00%	13.580.287.040,00	40,00%	36.214.550.900,00	45,00%	31.733.151.000,00					42.109.616.013,00	50,00%	123.637.604.953,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	15	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rasio Turap /Talud/Bronjong Terhadap Abrasi Sungai/Parit	1	45,00%	50,00%	2.769.700.000,00	55,00%	8.456.695.600,00	60,00%	3.371.283.100,00					3.599.559.756	75,00%	18.197.238.456,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	Persentase Pembangunan Rutin Pusat-Pusat Pencapaian Hasil	1	60,00%	65,00%		70,00%									85,00%		
	4	Kawasan Perumahan Kawanan Perumahan	1	45,00%	50,00%	1.844.878.800,00	55,00%	2.521.180.600,00	60,00%	1.357.914.600,00					5.728.560.248,00	75,00%	16.019.523.148,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	3	Program Pengkajian Areal Perumahan	1	1 : 6	1 : 6	1.435.540.170,00	1 : 6	3.286.546.200,00	266.442.000,00						151.984.208,00	1 : 6	5.140.512.578,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup
	2	Program Pengembangan Perumahan	1	-	-		-											Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup
	1	Rasio Rumah Lengk Huni	1	-	-		-											Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup
	4	Program Pemeliharaan Kecelakaan Lingkungan Persentase Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	1	55,00%	60,00%	1.849.221.900,00	65,00%	1.296.501.600,00	70,00%	711.272.000,00					887.156.400,00	80,00%	6.329.012.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Urusan Kesehatan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	158.480.000,00	4,00	48.260.400,00	4,00	20.425.050,00	4,00	166.259.700,00	4,00	202.300.800,00	4,00	212.423.337,00	20,00	808.149.287,00	Kantor Kesehatan Bangsan dan Politik		
2	Program Pemeliharaan Peningkatan Peraturan Perundang-undangan Daerah Jumlah Kegiatan	1	-	-	70.000.000,00	4 Kali	43.840.000,00	4 Kali	50.000.000,00	8 Kali	190.000.000,00	8 Kali	420.000.000,00	28 Kali	830.214.500	Satuan Polisi Pamong Praja		
3	Program Kesehatan Pengembangan Wawasan Kebudayaan Frekuensi Perencanaan FKUB Dengan Elemen Masyarakat	1	70.180.000,00	96.915.000,00	4 Kali	43.840.000,00	4 Kali	200.576.250,00	8 Kali	141.824.400,00	8 Kali	100.000.000,00	653.335.650,00	24 Kali	653.335.650,00	Kantor Kesehatan Bangsan dan Politik		
4	Program Pemeliharaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	14,00	14,00	12.500.000,00	14,00	7.500.000,00	14,00	7.297.000,00	14,00	7.214.500,00	12,00	6.288.257,00	40,00	40.799.757,00	Kantor Kesehatan Bangsan dan Politik		
5	Program Kebersamaan Dinas/Dicari	1	-	-	28.596.000,00	-	-	109.372.300,00	35,00%	114.203.000,00	25,00%	181.190.290,00	25,00%	433.361.590,00	Kantor Kesehatan Bangsan dan Politik			
6	Program Pemeliharaan Komitmen dan Pencapaian Target Kriminal Persepsi Kriminalitas Yang Tertinggi	1	-	-	65.569.600,00	70,00%	199.999.000,00	75,00%	300.718.900,00	80,00%	34.027.000,00	85,00%	240.000.000,00	90,00%	665.287.000	Satuan Polisi Pamong Praja		
7	Program Pemeliharaan Pembangunan Penyakit Masyarakat (Pekel)	1	-	-	128.453.650,00	-	-	90.800.000,00	-	-	-	-	-	-	489.039.221,00	Satuan Polisi Pamong Praja		

Bulan Urusan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P Tahun 2014	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Peringkat Daerah Penguasa
			TARGET (4)	Rp. (juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (juta) (15)		
2	1	Urusan Wajib Menyelesaikan Dasar	1	Program Penunjang Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	88.057.000,00	140.438.900,00	22.592.350,00	110.612.800,00	166.468.950,00	166.468.950,00	100,00%	100,00%	166.468.950,00	100,00%	694.638.950,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
					1.390.000	1.390.000	1.761.700	1.907.040	2.075.000	2.248.116	2.248.116	2.248.116				
					45,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
					164.932.608,00	60.912.150,00	173.631.040,00	210.669.460,00	206.564.500,00	407.188.520,00	1.223.898.278,00	1.223.898.278,00				
					45,00%	50,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
3	2	Program Penunjang Kecepatan Kerja	1	Program Penunjang Kecepatan Kerja	143.612.104,00	202.349.170,00	78.357.800,00	147.029.750,00	151.049.300,00	288.963.150,00	1.011.361.274,00	394.438.224,00	1.011.361.274,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
					40,00%	50,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%					
					1.390.000	1.390.000	1.761.700	1.907.040	2.075.000	2.248.116	2.248.116	2.248.116				
					45,00%	55,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%					
					28.529.424,00	32.585.000,00	141.879.200,00	23.712.400,00	25.853.000,00	141.879.200,00	141.879.200,00	394.438.224,00				
					40,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%					
4	3	Program Penunjang Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan	1	Program Penunjang Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan	258.002.440,00	1.125.689.600,00	1.085.000,00	214.631.500,00	44.847.500,00	1.125.689.600,00	2.769.945.640,00	2.769.945.640,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
					45,00%	50,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%					
					45,00%	50,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%					
					45,00%	50,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%					
					258.002.440,00	1.125.689.600,00	1.085.000,00	214.631.500,00	44.847.500,00	1.125.689.600,00	2.769.945.640,00	2.769.945.640,00				
					45,00%	50,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%					
2	1	Urusan Pemberdayaan Perempuan	1	Program Kesadaran Kelangkaan Perempuan	73.981.648,00	164.891.500,00	200.072.400,00	205.000.000,00	264.491.260,00	908.436.808,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
					40,00%	50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	70,00%						
					40,00%	50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	70,00%						
					40,00%	50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	70,00%						
					73.981.648,00	164.891.500,00	200.072.400,00	205.000.000,00	264.491.260,00	908.436.808,00		908.436.808,00				
					40,00%	50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	70,00%						
3	2	Program Pengawasan dan Pemertanian Gender dan Anak	1	Program Pengawasan dan Pemertanian Gender dan Anak	348.102.736,00	142.500.000,00	152.962.500,00	221.200.000,00	197.494.290,00	1.062.259.526,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
					6,00	8,00	10,00	10,00	13,00	15,00						
					6,00	8,00	10,00	10,00	13,00	15,00						
					6,00	8,00	10,00	10,00	13,00	15,00						
					348.102.736,00	142.500.000,00	152.962.500,00	221.200.000,00	197.494.290,00	1.062.259.526,00		1.062.259.526,00				
					6,00	8,00	10,00	10,00	13,00	15,00						
4	3	Program Peningkatan Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1	Program Peningkatan Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	273.859.224,00	75.000.000,00	130.534.000,00	395.000.000,00	268.820.000,00	1.411.036.561,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
					30,91%	31,00%	35,38%	37,01%	38,71%	40,49%						
					30,91%	31,00%	35,38%	37,01%	38,71%	40,49%						
					30,91%	31,00%	35,38%	37,01%	38,71%	40,49%						
					273.859.224,00	75.000.000,00	130.534.000,00	395.000.000,00	268.820.000,00	1.411.036.561,00		1.411.036.561,00				
					30,91%	31,00%	35,38%	37,01%	38,71%	40,49%						
5	4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perilaku Perempuan	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perilaku Perempuan	133.152.440,00	183.000.000,00	194.575.000,00	235.000.000,00	270.861.666,00	1.016.589.106,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
					3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00						
					3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00						
					3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00						
					133.152.440,00	183.000.000,00	194.575.000,00	235.000.000,00	270.861.666,00	1.016.589.106,00		1.016.589.106,00				
					3,80	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00						
5	5	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat	1	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat	29.954.120,00	35.000.000,00	14.950.000,00	20.000.000,00	18.078.956,00	117.983.076,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
					4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00						
					4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00						
					4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00						
					29.954.120,00	35.000.000,00	14.950.000,00	20.000.000,00	18.078.956,00	117.983.076,00		117.983.076,00				
					4,00	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00						

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Rp. (juta)	Prangkat Dinas Pembangunan Jawab (18)		
			Target (4)	Rp. (juta) (5)	Target (6)	Rp. (juta) (7)	Target (8)	Rp. (juta) (9)	Target (10)	Rp. (juta) (11)	Target (12)	Rp. (juta) (13)	Target (14)	Rp. (juta) (15)			Target (16)	Rp. (juta) (17)
3	1	Program Pengembangan Kelembagaan Timpan Sikor PPH	80,50%	731.999.000,00	82,50%	683.593.000,00	83,60%	300.862.650,00	86,40%	582.262.900,00	89,10%	450.672.250,00	91,80%	406.808.041,00	91,80%	3.176.197.841,00	Dinas Kesehatan Pangau, Perkebunan dan Peternakan; Sekretariat Diermah	
4	1	Program Perbaikan, Penggunaan, Kepemilikan Penggunaan Tanah Pemukimatan Tanah	100,00%	5.406.838.120,00	100,00%	3.373.964.872,00	100,00%	7.033.147.791,00	100,00%	6.979.119.300,00	100,00%	11.672.094.425,00	100,00%	13.614.129.498,00	100,00%	42.079.294.006,00	Sekretariat Diermah; Sekretariat DPRD	
2	1	Program Penyelidikan Kondik-kondik Perumahan Perencanaan Kawasan Tumbuh Kembang	100,00%	92.678.500,00	100,00%	363.186.500,00	100,00%	415.343.886,00	100,00%	367.330.500,00	100,00%	475.570.000,00	100,00%	659.570.983,00	100,00%	2.373.680.369,00	Sekretariat Diermah	
5	1	Program Pengembangan Perencanaan Dan Perumahan Lingkungan Hidup	Baik	4.550.736.380,00	Baik	3.053.477.950,00	Baik	1.301.369.695,00	Baik	1.563.555.831,00	Baik	471.355.000,00	Baik	299.503.158,00	Baik	11.239.998.014,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	
2	1	Program Pengembangan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	102.160.020,00	1 Dokumen	298.773.950,00	1 Dokumen	172.576.500,00	1 Dokumen	232.119.090,00	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	64.902.504,00	5 Dokumen	940.532.064,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	
3	1	Program Peningkatan Pengenalan Polisi Tingkat Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	37.593.700,00	1 Dokumen	39.140.000,00	1 Dokumen	81.250.000,00	1 Dokumen	60.245.000,00	1 Dokumen	67.783.266,00	1 Dokumen	286.011.966,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	
4	1	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	DDL < 1	246.594.880,00	DDL < 1	75.280.000,00	DDL < 1	121.595.153,00	DDL < 1	103.158.559,00	DDL < 1	130.000.000,00	DDL < 1	114.376.081,00	DDL < 1	791.004.673,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	
5	1	Program Pengembangan Kualitas Penyelidikan Samudra Perencanaan Samudra	35,00%	8.533.618.428,00	45,00%	22.188.554.750,00	50,00%	10.216.325.700,00	55,00%	13.906.053.496,00	65,00%	16.394.061.975,00	75,00%	18.680.876.231,00	75,00%	89.919.490.580,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	
6	1	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	34,00%	1.333.300.000,00	36,00%	4.049.953.950,00	37,00%	2.255.131.600,00	38,00%	2.700.768.400,00	39,00%	1.804.878.600,00	40,00%	1.917.573.498,00	40,00%	14.061.606.048,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
6	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan Rasio Kependudukan KTP Elektronik	80,11%	1.186.579.074,00	100,00%	1.021.893.500,00	100,00%	889.341.200,00	100,00%	2.514.975.292,00	100,00%	2.696.405.500,00	100,00%	3.177.480.604,00	100,00%	11.486.675.170,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Klasifikasi Awal RPJMD-P (Tabun 2014)	Tabun 2014		Tabun 2015		Tabun 2016		Tabun 2017		Tabun 2018		Tabun 2019		Kondisi Klasifikasi Pada Akhir Periode RPJMD Rp. (juta)	Peringkat Duarah Peningkatan Jawab (18)		
			Target (4)	Rp. (juta) (5)	Target (6)	Rp. (juta) (7)	Target (8)	Rp. (juta) (9)	Target (10)	Rp. (juta) (11)	Target (12)	Rp. (juta) (13)	Target (14)	Rp. (juta) (15)			Target (16)	Rp. (juta) (17)
			2014		2015		2016		2017		2018		2019					
2	Program Pelayanan Konseling KB	30,00%	75.000,000,00	40,00%	87.000,000,00	45,00%	67.039.600,00	50,00%	70.000,000,00	60,00%	68.802.978,00	70,00%	367.842.578,00	Pembelajaran Perencanaan, Perencanaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bertencana				
			35,00%	87.000,000,00	45,00%	67.039.600,00	50,00%	70.000,000,00	60,00%	68.802.978,00	70,00%	367.842.578,00						
3	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Penggunaan Dan Pembuatan Tumbuh Kembang Anak 1 Jumlah Kelangkaan Bahan Kelangkaan Bahan (BKB)	5,00	13.175.160,00	9,00	20.000,000,00	13,00	21.000,000,00	15,00	20.000,000,00	20,00	22.189.772,00	25,00	96.374.932,00	Dinas Pembelajaran Perencanaan, Perencanaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bertencana				
			13.050,080,00	55,00%	20.000,000,00	60,00%	16.450,000,00	65,00%	20.000,000,00	70,00%	58.090.239,00	75,00%	172.882.319,00					
4	Program Kesehatan Reproduktif Remaja 1 Persentase Adopsi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduktif Remaja	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	Dinas Pembelajaran Perencanaan, Perencanaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bertencana				
			50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%						
5	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 1 Persentase Peningkatan Peran Instansi Masyarakat Pedesaan Keluarga Bertencana	2,00	853.143.320,00	3,00	2.277.381.000,00	5,00	1.197.471.100,00	5,00	1.373.800.000,00	7,00	2.118.690.500,00	10,00	10.961.906.978,00	Dinas Pembelajaran Perencanaan, Perencanaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bertencana				
			34.744.592,00	4,00	110.000,000,00	5,00	26.250.200,00	5,00	188.000,000,00	51.575,000,00	55.814.834,00	466.384.626,00						
6	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR 1 Jumlah Tenaga Pendidik Kelompok Bina Keluarga	30,00	14.926.000,00	40,00	50.000,000,00	45,00	22.450.900,00	50,00	50.000,000,00	75,00	202.230.000,00	100,00	680.252.707,00	Dinas Pembelajaran Perencanaan, Perencanaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bertencana				
			14.835.227.200,00	60,00%	1.815.619.000,00	65,00%	955.847.000,00	70,00%	1.390.294.600,00	782.000,000,00	692.570.474,00	7.071.558.274,00						
7	Program Penyajian Tenaga Pendidik Kelompok Bina Keluarga 1 Program Pengabdian Sosial dan Prasana Pelayanan KB 1 Persentase Sarana dan Prasana Pelayanan KB	50,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	Dinas Pembelajaran Perencanaan, Perencanaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bertencana				
			50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%						
8	Program Pengembangan Sarana dan Prasana Pelayanan KB 1 Persentase Sarana dan Prasana Pelayanan KB	50,00%	1.435.227.200,00	60,00%	1.815.619.000,00	65,00%	955.847.000,00	70,00%	1.390.294.600,00	782.000,000,00	692.570.474,00	7.071.558.274,00	Dinas Pembelajaran Perencanaan, Perencanaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bertencana					
			50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%						
9	Urusan Perhubungan 1 Program Perencanaan Pelayanan Angkutan 1 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan 2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	50,00%	1.400.000,00	60,00%	3.000.000,00	65,00%	1.400.000,00	70,00%	55.164.800,00	75,00%	619.589.900,00	80,00%	1.085.817.700,00	Dinas Perhubungan				
			50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%						
3	Program Peningkatan Kedudukan Berencana 1 Jumlah Baku Uji dan Plat Tanda Uji Kendaraan Bermotor	900 Baku Uji, 8.000 Plat Tanda Uji	105.090.300,00	60,00%	536.010.000,00	1.500 Baku Uji, 3.000 Plat Tanda Uji, 3.555 Stiker	591.962.350,00	3.000 Baku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 1.480 Stiker	639.071.600,00	4.000 Baku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker	648.093.000,00	1.749.268.000,00	4.269.495.250,00	Dinas Perhubungan				
			950 Baku Uji, 8.500 Plat Tanda Uji	60,00%	697.016.000,00	683.791.000,00	359.535.000,00	435.051.900,00	2.947.640.000,00	4.000 Baku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker	1.749.268.000,00	4.269.495.250,00						

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2014		Tahun 2016		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Peringkat Daerah Peningkat Jumlah (18)
			TARGET (4)	Rp. (Juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (Juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (Juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (Juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (Juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (Juta) (15)	TARGET (16)	Rp. (Juta) (17)	
10 Urusan Komunikasi Dan Informasi	1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Perencanaan Internet Dan Jaringan Internet	30,00%	312.128.500,00	40,00%	956.818.500,00	45,00%	339.154.000,00	50,00%	396.382.500,00	60,00%	403.854.000,00	70,00%	425.209.130,00	70,00%	2.833.546.630,00	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD	
																	2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
	3 Program Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika Yang memiliki Kompetensi Berbasis TK	50,00%	60,00%	87.500.000,00	70,00%	1.202.312.960,00	-	1.200.070.825,00	-	2.222.536.500,00	75,00%	114.622.195,00	75,00%	253.112.395,00	Sekretariat Daerah		
																4 Program Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	40,00%
	5 Program Pengembangan dan Implementasi E-Government Yang Dibangun Raya	1,00	1,00	2.374.571.576,00	1,00	753.990.300,00	1,00	274.838.500,00	1,00	212.355.000,00	1,00	279.112.500,00	1,00	181.893.862,00	4.076.761.758,00		
																6 Program Implementasi LPSE Perencanaan Pembangunan Perencanaan LPSE	100,00%
	11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	30,00	35,00	61.776.260,00	40,00	163.285.000,00	45,00	113.302.000,00	50,00	239.000.000,00	60,00	264.800.000,00	100,00	207.013.383,00	2.488.767.567,00		
1 Program Penciptaan Jalan Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif																30,00%	35,00%
	2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	30,00	35,00	906.808.884,00	40,00	599.140.100,00	45,00	341.137.200,00	50,00	169.868.000,00	70,00	264.800.000,00	100,00	2.488.767.567,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Perdagangan dan Perindustrian		

Bidang Urusan Pencapaian dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Trijuna / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD RPJMD RPJMD	Pengaruh Diterima Pembangunan Jumlah (18)		
			TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)	TARGET	RP. (Juta)			TARGET	RP. (Juta)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			(16)	(17)
12	1	Program Pengembangan Promosi Dan Kegiatan Investasi Investasi	40,00%	231.457.000,00	60,00%	316.100.000,00	70,00%	292.597.000,00	80,00%	225.731.500,00	90,00%	296.761.500,00	100,00%	311.885.371,00	100,00%	1.684.532.271,00	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Tempat Satu Pintu	
			40,00%	487.529.502,00	40,00%	713.654.600,00	45,00%	143.363.900,00	50,00%	175.287.500,00	75,00%	125.850.000,00	100,00%	95.989.490,00	100,00%	1.741.674.992,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Pengembangan dan Pendidikan	
			40,00%	30,00	40,00	668.103.303,00	1,00	190.578.000,00	1,00	171.326.500,00	1,00	196.106.500,00	1,00	211.444.391,00	1,00	1.572.135.770,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Pengembangan dan Pendidikan	
			1,00	1,00	1,00	134.577.076,00	1,00	190.578.000,00	1,00	171.326.500,00	1,00	196.106.500,00	1,00	211.444.391,00	1,00	1.572.135.770,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Pengembangan dan Pendidikan	
13	1	Program Pengembangan Promosi Dan Kegiatan Investasi Investasi	60,00%	403.467.132,00	70,00%	882.400.000,00	75,00%	604.440.830,00	80,00%	752.414.900,00	85,00%	497.212.000,00	90,00%	518.427.809,00	90,00%	3.658.362.671,00	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Tempat Satu Pintu	
			40,00%	450.458.400,00	50,00%	240.000.000,00	-	75.000.000,00	60,00%	61.700.000,00	65,00%	864.693.950,00	65,00%	864.693.950,00	65,00%	864.693.950,00	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Tempat Satu Pintu	
			40,00%	403.467.132,00	70,00%	882.400.000,00	75,00%	604.440.830,00	80,00%	752.414.900,00	85,00%	497.212.000,00	90,00%	518.427.809,00	90,00%	3.658.362.671,00	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Tempat Satu Pintu	
			60,00%	403.467.132,00	70,00%	882.400.000,00	75,00%	604.440.830,00	80,00%	752.414.900,00	85,00%	497.212.000,00	90,00%	518.427.809,00	90,00%	3.658.362.671,00	Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Tempat Satu Pintu	
14	1	Program Pengembangan Promosi Dan Kegiatan Investasi Investasi	50,00%	65.830.000,00	55,00%	40.000.000,00	55,00%	40.000.000,00	55,00%	40.000.000,00	60,00%	31.180.140,00	60,00%	137.010.140,00	60,00%	137.010.140,00	Dinas Permatia, Olahraga dan Pariwisata	
			26,00	902.921.840,00	30,00	643.136.650,00	37,00	407.798.800,00	37,00	1.274.271.900,00	35,00	325.000.000,00	36,00	264.929.306,00	36,00	3.818.058.496,00	Dinas Permatia, Olahraga dan Pariwisata	
			26,00	902.921.840,00	30,00	643.136.650,00	37,00	407.798.800,00	37,00	1.274.271.900,00	35,00	325.000.000,00	36,00	264.929.306,00	36,00	3.818.058.496,00	Dinas Permatia, Olahraga dan Pariwisata	
			26,00	902.921.840,00	30,00	643.136.650,00	37,00	407.798.800,00	37,00	1.274.271.900,00	35,00	325.000.000,00	36,00	264.929.306,00	36,00	3.818.058.496,00	Dinas Permatia, Olahraga dan Pariwisata	
14	1	Program Pengembangan Promosi Dan Kegiatan Investasi Investasi	5,00	334.998.720,00	5,00	457.030.000,00	5,00	509.723.100,00	5,00	694.750.500,00	5,00	450.000.000,00	5,00	477.360.398,00	25,00	2.923.862.718,00	Dinas Permatia, Olahraga dan Pariwisata	
			5,00	334.998.720,00	5,00	457.030.000,00	5,00	509.723.100,00	5,00	694.750.500,00	5,00	450.000.000,00	5,00	477.360.398,00	25,00	2.923.862.718,00	Dinas Permatia, Olahraga dan Pariwisata	
			5,00	334.998.720,00	5,00	457.030.000,00	5,00	509.723.100,00	5,00	694.750.500,00	5,00	450.000.000,00	5,00	477.360.398,00	25,00	2.923.862.718,00	Dinas Permatia, Olahraga dan Pariwisata	
			5,00	334.998.720,00	5,00	457.030.000,00	5,00	509.723.100,00	5,00	694.750.500,00	5,00	450.000.000,00	5,00	477.360.398,00	25,00	2.923.862.718,00	Dinas Permatia, Olahraga dan Pariwisata	
14	1	Program Pengembangan Promosi Dan Kegiatan Investasi Investasi	1,00	359.333.200,00	1,00	607.702.800,00	1,00	166.406.600,00	2,00	806.575.200,00	2,00	812.117.900,00	2,00	720.723.190,00	2,00	3.471.858.690,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1,00	359.333.200,00	1,00	607.702.800,00	1,00	166.406.600,00	2,00	806.575.200,00	2,00	812.117.900,00	2,00	720.723.190,00	2,00	3.471.858.690,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1,00	359.333.200,00	1,00	607.702.800,00	1,00	166.406.600,00	2,00	806.575.200,00	2,00	812.117.900,00	2,00	720.723.190,00	2,00	3.471.858.690,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1,00	359.333.200,00	1,00	607.702.800,00	1,00	166.406.600,00	2,00	806.575.200,00	2,00	812.117.900,00	2,00	720.723.190,00	2,00	3.471.858.690,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	1	Program Pengembangan Promosi Dan Kegiatan Investasi Investasi	10,00	72.000.000,00	10,00	72.000.000,00	10,00	75.000.000,00	15,00	82.200.000,00	20,00	90.420.000,00	25,00	99.462.000,00	25,00	419.082.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			10,00	72.000.000,00	10,00	72.000.000,00	10,00	75.000.000,00	15,00	82.200.000,00	20,00	90.420.000,00	25,00	99.462.000,00	25,00	419.082.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			10,00	72.000.000,00	10,00	72.000.000,00	10,00	75.000.000,00	15,00	82.200.000,00	20,00	90.420.000,00	25,00	99.462.000,00	25,00	419.082.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			10,00	72.000.000,00	10,00	72.000.000,00	10,00	75.000.000,00	15,00	82.200.000,00	20,00	90.420.000,00	25,00	99.462.000,00	25,00	419.082.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Klasifikasi Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Klasifikasi Pada Akhir Periode RPJMD Rp. (juta)	Peringkat Daerah Pemasangan Jawab (18)	
			TARGET (4)	Rp. (juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (juta) (15)			TARGET (16)
15	1	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Peningkatan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan		191.306.000,00		952.668.785,00		1.448.398.875,00		723.495.250,00		390.250.000,00		482.929.155,00		4.189.248.065,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			1	50,00	60,00	65,00	70,00	85,00	100,00							100,00	
16	1	Program Penyelamatan Derah Daerah Presentasi SNP Yang telah Melakukan Asmp Baku		99.585.600,00		29.991.000,00		125.325.325,00		100.372.300,00		77.995.300,00		100.735.900,00		534.005.425,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			1	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	80,00%	90,00%								
2	1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Tersedia Asmp Elektronik		75.330.000,00		123.057.000,00		-		76.110.000,00		69.538.000,00		49.555.000,00		292.982.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			1	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia								
3	1	Program Perubahan Sistem Administrasi Kearsipan Peningkatan Kecepatan Kearsipan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)		-		-		45.997.625,00		12.500.000,00		10.462.000,00		6.386.180,00		75.345.805,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			1	-	-	50,00%	60,00%	3 Kall	60,00%	70,00%	80,00%	3 Kall	80,00%	15 Kall			
4	1	Program Pemeliharaan Rutub/Berkala Sarana dan Peningkatan Kebersihan Praktis Pemeliharaan Rutub/Berkala Asmp Daerah		-		-		137.310.000,00		86.498.300,00		174.298.000,00		150.000.000,00		1.210.146.372,00	Dinas Perikanan
			1	2.372,00	2.609,00	2.809,00	3.156,00	3.472,00									
2	1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap Produktif Perikanan Tangkap (Toa)		4.716.596.192,00		2.450.944.400,00		1.317.633.000,00		1.758.196.700,00		855.519.000,00		4.775.000.000,00		15.873.889.292,00	Dinas Perikanan
			1	21.996,00	22.986,00	24.020,00	24.981,00	25.855,00	26.760,00								
3	1	Program Pengembangan Sistem Perikanan Perikanan Pengembangan Sistem Perikanan Perikanan (Uruji)		182.789.160,00		260.000.000,00		118.790.632,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		1.551.579.792,00	Dinas Perikanan
			1	2,00	2,00	4,00	4,00	3,00	2,00								
4	1	Program Optimalisasi Pengembangan Dan Peningkatan Produktif Hasil Perikanan Konsumsi Ikan (K&K/Kapita/Tahun)		30.000.000,00		100.000.000,00		-		180.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		730.000.000,00	Dinas Perikanan
			1	31,00	31,25	-	31,75	32,00	32,25								
5	1	Program Peningkatan Kebudayaan Keadyamanan Sosial Yang Dibina		-		23.014.325,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		263.014.325,00	Dinas Perikanan
			1	-	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00								
6	1	Program Pengembangan Kewasus Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Peningkatan Lulusan Kewasus Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar		2.356.977.004,00		1.303.768.250,00		879.092.000,00		1.219.703.670,00		1.524.203.000,00		5.760.000.000,00		13.043.743.924,00	Dinas Perikanan
			1	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%								
7	1	Program Peningkatan Kecerdasan Nelayan Yang Didididik		245.310.000,00		215.745.400,00		29.981.500,00		321.378.200,00		110.000.000,00		500.000.000,00		1.422.415.100,00	Dinas Perikanan
			1	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
8	1	Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesah Jumlah Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesah Yang Dibina dan Dikerahkan		3.040.424.172,00		2.924.680.950,00		649.508.260,00		600.000.000,00		650.000.000,00		4.180.000.000,00		12.044.593.382,00	Dinas Perikanan
			1	63,00	70,00	77,00	85,00	100,00									
9	1	Program Peningkatan Masyarakat Dalam Peningkatan dan Peningkatan Sumbahnya Kebudayaan		30.000.000,00		75.000.000,00		205.000.000,00		-		-		100.000.000,00		410.000.000,00	Dinas Perikanan
			1														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja/ (Taruhan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Rp. (juta)	Pengaruh Dampak Pembangunan Jawab (18)																				
			TARGET (4)	Rp. (juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (juta) (15)			TARGET (16)	Rp. (juta) (17)																		
2	Urusan Pertanian	1	Program Pengembangan Dehidrasi Pertanian	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,046.508.879,00	Dinas Pertanian, Olahraga dan Pariwisata																			
				2	Program Pengembangan Pemasaran Pertanian	25,405	209.550.000,00	28,28%	188.800.000,00	24,62%	93.826.000,00	30,31%	194.352.000,00	32,49%	45.000.000,00	34,82%	33.082.436,00	34,82%	764.610.436,00	Dinas Pertanian, Olahraga dan Pariwisata																
						3	Program Pengembangan Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif	-	-	-	245.000.000,00	-	583.401.150,00	-	750.000.000,00	-	750.000.000,00	-	992.053.419,00	-	3.320.454.569,00	Dinas Pertanian, Olahraga dan Pariwisata														
								4	Program Pengembangan Kemampuan Pertanian	2,00	222.197.492,00	2,00	296.000.000,00	2,00	663.885.250,00	2,00	3.120.000.000,00	2,00	178.000.000,00	2,00	178.000.000,00	2,00	178.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata												
										1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Luas Tanaman Padi (Hektar)	59.945,00	59.945,00	52.679,00	23.402.659.300,00	45.360,00	5.371.332.033,78	52.000,00	5.161.855.408,00	53.000,00	5.086.600.000,00	54.000,00	30.667.907.500,00	54.000,00	74.703.384.161,78	Dinas Pertanian										
												2	Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 1 Produk Padi (Ton)	-	-	180.425,00	2.300.000.000,00	155.358,00	2.635.000.000,00	191.800,00	2.985.000.000,00	202.075,00	3.287.750.000,00	208.925,00	3.850.012.500,00	208.925,00	15.157.762.500,00	Dinas Pertanian								
														3	Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 1 Produk Padi (Ton)	-	-	60,00%	3.437.190.200,00	70,00%	778.471.600,00	80,00%	893.434.900,00	90,00%	268.962.000,00	100,00%	1.241.379.900,00	100,00%	6.619.438.600,00	Dinas Pertanian						
																4	Program Peningkatan Kelembutan Pangan (Perikanan/Perkebunan)	40,00%	-	40,00%	3.713.126.108,00	457.427.450,00	5.371.332.033,78	457.427.450,00	917.956.550,00	556.216.500,00	556.216.500,00	91,80%	2.205.634.300,00	91,80%	7.850.360.908,00	Dinas Pertanian				
																		5	Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura 1 Produk Perikanan (Ton/Ha)	-	-	82,50%	1.520.000.000,00	83,60%	1.718.000.000,00	86,40%	1.945.250.000,00	89,10%	2.207.137.500,00	91,80%	2.508.708.125,00	91,80%	9.899.095.625,00	Dinas Pertanian		
																				6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan dan Perkebunan	10,00	718.049.980,00	10,00	392.530.000,00	10,00	346.528.000,00	-	522.558.710,00	10,00	251.007.000,00	10,00	1.907.579.788,00	10,00	1.728.918.473,00	Dinas Pertanian
																						7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan dan Perkebunan	10,00	7.048.518.650,00	10,00	5.226.506.800,00	10,00	1.503.115.665,00	10,00	522.558.710,00	10,00	251.007.000,00	10,00	1.907.579.788,00	10,00
8	Program Peningkatan Kecambah Perikanan 1 Nilai Tukar Petani (NTT)	100,00	820.688.508,00																					101,00	201.018.000,00	101,00	120.074.875,00	102,00	200.000.000,00	102,00	250.000.000,00	103,00	300.000.000,00	103,00	1.891.781.383,00	Dinas Pertanian
		1	Program Peningkatan Kecambah Perikanan 1 Nilai Tukar Petani (NTT)	100,00	820.688.508,00																			101,00	201.018.000,00	101,00	120.074.875,00	102,00	200.000.000,00	102,00	250.000.000,00	103,00	300.000.000,00	103,00	1.891.781.383,00	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja / Triptun / Impact / Outcome / Outcomes	Kondisi Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Rp. (Juta)	Perangkat Daerah Pencapaian Jumlah (18)																																																																																																																																																																		
			TARGET (4)	Rp. (Juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (Juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (Juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (Juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (Juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (Juta) (15)			TARGET (16)	Rp. (Juta) (17)																																																																																																																																																																
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	(1)	(2)	(3)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Rp. (Juta)	Perangkat Daerah Pencapaian Jumlah (18)																																																																																																																																																																	
				9	Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian/Peternakan Lapangan	23,00	23,00	678.508.200,00	23,00	2.540.168.000,00	22,00	1.888.020.491,00	22,00	1.546.267.100,00	21,00			955.018.900,00	20,00	1.853.376.494,00	20,00	9.461.159.185,00	Dinas Pertanian																																																																																																																																																											
																								10	Program Sistem Informasi/Databse Pertanian	Tersedia	Tersedia	90.214.770,00	128.119.000,00	Tersedia	129.105.225,00	Tersedia	126.760.800,00	109.972.700,00	114.415.888,00	Tersedia	19.259.595,00	698.588.383,00	70.254.695,00	Dinas Pertanian																																																																																																																																										
																																									11	Program Peningkatan Kemampuan Kecepatan Sosial	Tersedia	Tersedia	-	15.000.000,00	17.902.200,00	17.902.200,00	18.092.900,00	18.092.900,00	18.092.900,00	3,00	3,00	19.259.595,00	70.254.695,00	Dinas Pertanian																																																																																																																										
																																																									1	Jumlah Perantara Hibah/Bansos	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Dinas Pertanian																																																																																																									
																																																																										4	Urusan Kesehatan	1	Program Peningkatan Produksi Perikanan Produktif Papanan Perikanan (Tol)	100,000	100,000,00	150.000,00	300.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-	894.806.692,00	200.000,00	Dinas Kesehatan Pangan, Perikanan dan Peternakan																																																																																							
																																																																																												2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	20,00	20,00	66.630.444,00	230.500.000,00	20,00	81.814.000,00	20,00	54.060.000,00	53.584.650,00	20,00	51.299.595,00	20,00	537.888.689,00	537.888.689,00	Dinas Kesehatan Pangan, Perikanan dan Peternakan																																																																						
																																																																																																													3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan	35,00%	40,00%	548.190.552,00	75.000.000,00	40,00%	40.944.400,00	60,00%	48.951.000,00	80.591.500,00	70,00%	54.923.825,00	80,00%	848.601.277,00	848.601.277,00	Dinas Kesehatan Pangan, Perikanan dan Peternakan																																																					
																																																																																																																														4	Program Pengembangan Agribisnis	100,00	110,00	1.152.431.216,00	1.165.975.500,00	125,00	201.391.500,00	130,00	1.414.032.500,00	248.691.500,00	183.008.022,00	200,00	4.365.530.238,00	4.365.530.238,00	Dinas Kesehatan Pangan, Perikanan dan Peternakan																																					
																																																																																																																																														5	Program Peningkatan Pengawasan Bidang Kehutanan	12,00 Ha	14,00 Ha	57.700.356,00	200.266.900,00	18,00 Ha	66.045.000,00	-	-	78.250.000,00	84.442.447,00	30,00 Ha	486.704.703,00	486.704.703,00	Dinas Kesehatan Pangan, Perikanan dan Peternakan, Sekretariat Daerah																					
																																																																																																																																																														1	Luasan Hutan Dism Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Urusan Peternakan	1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Termin Besar (ekor)													13.680,00	14.752,00																																																																																																																																																															15.670,00	575.966.750,00	16.028,00
				2	Program Peningkatan Peningkatan Perikanan Termin	60,00%	65,00%	678.129.622,00	1.947.287.522,00	70,00%	379.231.321,00	80,00%	127.218.100,00	101.238.100,00	90,00%			69.223.441,00	100,00%	3.302.348.106,00	3.302.348.106,00	Dinas Kesehatan Pangan, Perikanan dan Peternakan																																																																																																																																																												
																							3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																										
																																									4	Program Peningkatan Sesuai dengan Daging Sapi dan Peningkatan Perikanan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASR/H)	-	-	-	208.075.600,00	-	97.428.250,00	-	73.538.700,00	68.566.700,00	82.280.040,00	-	41.007.997,00	150.846.740,00	476.797.047,00																																																																																																																										
																																																									1	Produk Pakan Termin (Stek)	-	-	75.000,00	-	78.750,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00																																																																																																									
																																																																										6	Urusan Perdagangan	1	Program Peningkatan Konsultasi Dan Peningkatan Perdagangan Jumlah Sejahtera Konsultasi Yang Terjangkau	100,00	100,00	100,00	141.761.940,00	2.546.814.000,00	102.459.100,00	-	-	-	91.949.104,00	2.882.984.144,00	2.882.984.144,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian																																																																																								

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Kondisi Awal RPJMD-P (Tabun 2014)	Tabun 2014		Tabun 2015		Tabun 2016		Tabun 2017		Tabun 2018		Tabun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Rp. (Juta)	Peringkat Daerah Peningkat Jawab (18)	
			TARGET (4)	Rp. (Juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (Juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (Juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (Juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (Juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (Juta) (15)			
6	Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan Perencanaan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	1013.425.936,00	60,00%	213.746.700,00	70,00%	189.767.100,00	75,00%	1.170.547.300,00	80,00%	194.500.000,00	85,00%	139.812.217,00	85,00%	2.921.799.253,00	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			58,00%	60,00%	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%		
			77.892.300,00	100,00%	75.050.000,00	100,00%	19.465.926,00	100,00%	120.579.500,00	100,00%	1.151.500.000,00	100,00%	1.151.500.000,00	100,00%	3.518.330.479,00		5.103.775.479,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
7	Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan Kerjasama Pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
8	Program Perencanaan Pembangunan Kota-Kota Menengah dan Besar	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Kota-Kota Menengah dan Besar	100,00%	100,00%	40.375.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	393.750.000,00	100,00%	1.151.500.000,00	100,00%	1.151.500.000,00	100,00%	3.518.330.479,00	5.103.775.479,00	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Program Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2	Urusan Kemasyarakatan	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	2.702.593.220,00	100,00%	2.725.925.625,00	100,00%	1.645.210.843,00	100,00%	1.790.583.500,00	100,00%	2.053.217.175,00	100,00%	2.019.962.646,00	100,00%	12.337.993.009,00	Serwis SKPD	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kinerja dan Keuangan Tetap Waktu	10.792.763.198,00	100,00%	8.441.898.705,00	100,00%	10.092.704.905,61	100,00%	11.037.521.050,00	100,00%	9.318.709.200,00	100,00%	9.048.995.693,00	100,00%	59.633.592.752,00	Serwis SKPD	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
3	Urusan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Program Peningkatan Kelembagaan	623.298.370,00	1 Kali	25.318.500,00	1 Kali	89.644.000,00	1 Kali	36.986.400,00	1 Kali	145.010.800,00	1 Kali	108.328.123,00	1 Kali	1.028.586.193,00	Sekretariat DPRD	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			975.906.700,00	100,00%	1.478.275.025,00	100,00%	3.036.476.373,00	100,00%	1.430.897.300,00	100,00%	4.834.827.500,00	100,00%	6.658.486.453,00	100,00%	18.414.869.353,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	1.150.296.317,00	100,00%	2.262.912.525,00	100,00%	658.196.125,00	100,00%	1.368.534.900,00	100,00%	705.948.675,00	100,00%	640.273.912,00	100,00%	6.786.162.454,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4	Program Peningkatan Kelembagaan	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Kelembagaan	800,00	850,00	341.612.100,00	950,00	129.915.000,00	1.000,00	184.530.000,00	1.250,00	357.252.300,00	1.500,00	347.136.809,00	1.500,00	1.772.922.409,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			160,00	200,00	26.789.250,00	230,00	42.965.500,00	270,00	46.982.781,00	1.110,00	181.916.531,00	1.110,00	181.916.531,00	1.110,00	181.916.531,00		
5	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah SK Pensiun PNS	-	-	30.050.000,00	200,00	26.789.250,00	230,00	35.129.000,00	250,00	42.965.500,00	270,00	46.982.781,00	1.110,00	181.916.531,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			-	-	200,00	230,00	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		
4	Urusan Kerja Sama Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	144.869.200,00	70.000.000,00	73.972.825,00	449.000.000,00	366.000.000,00	440.536.696,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	Sekretariat Daerah	
			1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00	1.544.378.721,00		1.544.378.721,00

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujukan / Impact / Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (18)	Peringkat Daerah Pembangunan Jember (19)
			TARGET (4)	Rp. (Juta) (5)	TARGET (6)	Rp. (Juta) (7)	TARGET (8)	Rp. (Juta) (9)	TARGET (10)	Rp. (Juta) (11)	TARGET (12)	Rp. (Juta) (13)	TARGET (14)	Rp. (Juta) (15)		
5	1	Program Penguatan Dan Penyempurnaan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 1 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal Dan BPK	5,00	5,00	147.430.000,00	20,00%	16.292.000,00	5,00	19.999.900,00	60,00%	39.000.000,00	100,00%	34.958.199,00	100%	299.765.483,00	Inspektoriat Daerah
2	1	Program Penguatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 1 Persentase Tenaga Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Bimtek Atau Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	100,00%	100,00%	67.397.284,00	100,00%	107.038.000,00	100,00%	16.292.000,00	35.080.000,00	100,00%	39.000.000,00	34.958.199,00	100,00%	299.765.483,00	Inspektoriat Daerah
3	1	Program Penguatan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDD 1 Jumlah LHP	37 Dokumen	37 Dokumen	1.692.880.602,00	2.047.006.680,00	1.320.186.350,00	1.230.198.950,00	1.230.198.950,00	37 Dokumen	1.274.922.600,00	37 Dokumen	1.204.634.538,00	185 Dokumen	8.769.829.740,00	Inspektoriat Daerah
6	1	Urusan Hiburan Dan Pesta Perayaan 1 Program Peningkatan Perdagangan/Industri Yang Disertai DPRD	100,00%	100,00%	2.429.192.820,00	3.595.168.000,00	2.417.789.075,00	2.729.310.500,00	2.729.310.500,00	100,00%	3.200.590.600,00	100,00%	3.382.066.358,00	100,00%	17.754.107.353,00	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD
2	1	Program Peningkatan Kepuasan Lembaga Kemasyarakatan 1 Jumlah Peran Daerah Yang Diterapkan	7,00	7,00	9.301.001.600,00	11.400.213.500,00	8.806.644.800,00	13.179.317.100,00	13.179.317.100,00	24,00	16.304.132.090,00	28,00	18.241.110.676,00	119,00	77.232.419.766,00	Sekretariat DPRD
3	1	Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah 1 Laporan Realisasi Kegiatan SKPD	100,00%	100,00%	186.091.400,00	163.391.500,00	119.885.946,00	261.146.500,00	261.146.500,00	100,00%	255.246.500,00	100,00%	271.898.301,00	100,00%	1.237.660.147,00	Sekretariat Daerah
4	1	Program Peningkatan Kehidupan Perkomunitas Daerah 1 Terkenalnya Laju Industri Daerah	0,24	0,24	221.526.950,00	204.448.500,00	82.303.036,00	211.590.200,00	211.590.200,00	0,25	211.590.200,00	0,29	209.656.989,00	0,29	1.141.113.873,00	Sekretariat Daerah
7	1	Urusan Peningkatan Perdagangan/Industri Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 Peningkatan Keunggulan Kerja Pegawai Negeri/Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negari 2 Program Mengoptimalkan Peningkatan Masyarakat Yang Diselenggarakan 3 Program Peningkatan Otonomi Baru 1 Koordinasi Peningkatan Kecamatan/Kelurahan Jumlah Peran Kecamatan	10 Kali	10 Kali	668.203.000,00	736.600.000,00	1.159.869.000,00	1.396.030.000,00	1.396.030.000,00	10 Kali	2.252.334.500,00	10 Kali	2.871.956.065,00	10 Kali	9.084.992.505,00	Sekretariat Daerah
2	1	Program Peningkatan Masyarakat 1 Persentase Masyarakat Yang Diselenggarakan	100,00%	100,00%	373.736.000,00	318.866.623,00	168.034.200,00	234.603.000,00	234.603.000,00	100,00%	252.283.000,00	100,00%	233.212.915,00	100,00%	1.580.755.740,00	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD
3	1	Program Peningkatan Otonomi Baru 1 Koordinasi Peningkatan Kecamatan/Kelurahan Jumlah Peran Kecamatan	100,00%	100,00%	969.420.300,00	277.402.000,00	420.171.600,00	566.570.000,00	566.570.000,00	100,00%	571.000.000,00	100,00%	513.641.495,00	100,00%	3.318.214.395,00	Sekretariat Daerah
4	1	Program Peningkatan Kecamatan/Kelurahan Jumlah Peran Kecamatan	1,00	1,00	152.331.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	1,00	160.000.000,00	1,00	162.641.191,00	1,00	497.372.191,00	Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tipe / Impact / Outcome)	Kondisi Klasifikasi Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Klasifikasi Pada Akhir Periode RPJMD	Peringkat Daerah Peningkatan Jawab (18)			
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
5	Program Peningkatan Mutu Sipilital Lantai Berencana Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dibastikasi	20,00%	20,00	931.850.380,00	20,00	1.080.487.650,00	20,00	5.455.513.732,00	20,00	2.361.383.900,00	25,00	1.290.552.500,00	30,00	1.377.404.744,00	30,00	12.497.192.906,00	Sekretariat Daerah		
			20,00%	5.826.990.606,00	20,00%	3.114.029.114,00	20,00%	2.305.930.400,00	20,00%	3.823.193.932,00	20,00%	3.318.886.100,00	20,00%	2.965.527.490,00	20,00%	21.354.557.642,00		Sekretariat Daerah, Semua Kecamatan	
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%							
PROGRAM PADA BERTAP SRPD																			
1	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan	100,00%	100,00%	31.190.218.712,44	100,00%	36.653.301.247,00	100,00%	38.966.596.081,79	100,00%	25.128.149.614,00	100,00%	26.901.103.770,00	100,00%	26.116.828.408,00	100,00%	184.958.197.834,00	Semua SRPD		
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan	100,00%	100,00%	33.817.404.882,00	100,00%	55.977.946.720,00	100,00%	54.999.620.016,00	100,00%	25.498.226.404,00	100,00%	18.811.564.860,00	100,00%	16.729.243.901,00	100,00%	205.833.806.783,00	Semua SRPD		
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
3	Program Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100,00%	2.761.921.588,00	100,00%	2.888.613.425,00	100,00%	2.220.317.929,00	100,00%	3.549.078.350,00	100,00%	3.948.274.850,00	100,00%	4.240.788.212,00	100,00%	19.608.994.354,00	Semua SRPD		
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
4	Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100,00%	3.381.075.086,00	100,00%	4.76.589.750,00	100,00%	4.34.640.450,00	100,00%	702.887.900,00	100,00%	756.045.715,00	100,00%	560.333.650,00	100,00%	6.311.572.551,00	Semua SRPD		
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
5	Program Peningkatan dan Keterlaksanaan dan Aparatur Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	1.383.636.000,00	100,00%	1.824.572.313,00	100,00%	2.585.910.900,00	100,00%	3.345.332.725,00	100,00%	4.033.065.796,00	100,00%	13.372.517.734,00	100,00%	13.372.517.734,00	Semua SRPD		
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
1	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Keterlaksanaan dan Aparatur Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%		100,00%												Semua SRPD		
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Raya Tahun Tahun 2014-2019 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, dijelaskan pada Tabel 8.1. sebagai berikut :

↑
a

Tabel 8.1.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	B	B	B	B	B	B
2	Kapabilitas APiP	Level	-	-	2	2	3	3	3
3	Nilai SAKIP	-	C	CC	CC	B	B	B	B
4	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	Tahun	12,34	12,55	12,84	13,01	13,18	13,36	13,36
5	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,60	6,50	6,80	7,30	7,60	7,90	7,90
6	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,64	69,74	69,77	69,81	69,86	69,90	69,90
7	% Permasalahan Ketertiban, Ketertarikan dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	% Pertumbuhan ekonomi	%	6,28	6,36	6,37	7,30	7,40	7,50	7,50
9	Pengeluaran per kapita per tahun	Ribu	7.973,33	7.993,68	8.145,00	8.203,04	8.261,50	8.320,37	8.320,37
10	% Tingkat kemiskinan	%	6,27	6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,80
11	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Juta	3.114.044,281	3.486.851,231	4.016.235,877	4.625.993,353	5.328.326,114	6.137.289,228	6.137.289,228
12	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,18	6,11	6,42	6,02	5,10	4,80	4,80
13	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Juta	2.442.677,3	2.513.050,5	2.688.748,5	2.776.162,5	2.866.418,3	2.959.608,5	2.959.608,5
14	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Juta	5.386.861,1	6.069.702,0	6.727.703,2	7.245.090,9	7.802.267,8	8.402.293,9	8.402.293,9
15	Kunjungan wisata	Orang	57.855	60.508	45.139	52.262	56.235	60.510	60.510
16	Indeks Mobilitas	-	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,85	0,85
17	Indeks Konektivitas	-	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80	0,80
18	Ketaatan terhadap RTRW	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
19	Persentase penduduk terlayani sanitasi	%	42,50	45,00	47,50	50,00	55,00	60,00	60,00
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Tabel 8.2.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	(8)	(9)	
URUSAN WAJIB	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar										
1 Urusan Pendidikan										
1 Peningkatan APK TK/RA/PAUD	62,72%	62,82%	62,86%	64,58%	65,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	
2 Angka Melekat Huruf	97,68%	97,74%	97,75%	97,76%	98,00%	98,25%	98,25%	98,25%	98,25%	
3 Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/D4	56,82%	66,73%	76,58%	78,56%	80,00%	81,50%	81,50%	81,50%	81,50%	
4 Persentase Sekolah Yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5 Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	15,00	15,00	
6 Jumlah Sekolah Berprestasi	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	15,00	
7 Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	112,94%	113,82%	113,82%	101,61%	102,50%	103,25%	103,25%	103,25%	103,25%	
8 Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	90,89%	92,27%	95,64%	90,02%	91,00%	91,25%	91,25%	91,25%	91,25%	
2 Urusan Kesehatan										
1 Cakupan Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	60,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	
2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi	65,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
3 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	93,55%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	Persentase Pengawasan Penyalahgunaan Obat dan Bahan Berbahaya di Masyarakat	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	90,00%	90,00%	
5	Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	6,00	8,00	10,00	10,00	15,00	20,00	20,00	
6	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	7,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00	20,00	
7	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	1,25%	1,46%	1,61%	1,95%	3,08%	4,71%	4,71%	
8	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Yang Dilakukan Penanggulangan < 24 Jam	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Persentase prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Baduta (Bawah 2 Tahun)	29,50%	29,10%	29,00%	28,80%	28,75%	28,50%	28,50%	
10	Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	90,00%	90,00%	
11	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	24,00	24,00	24,00	32,00	39,00	45,00	45,00	
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	-	70,00%	75,00%	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%	
13	Cakupan Persalinan Yang Ditolong Oleh Nakes Yang Mempunyai Kompetensi Kebidanan	89,00%	90,00%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%	
14	Penyusunan Profil Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	
15	Persentase Peningkatan Mutu Manajemen Kesehatan	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
16	75,00%	80,00%	-	-	85,00%	90,00%	100,00%	100,00%	
3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
1	36,00%	44,00%	52,00%	59,00%	67,00%	75,00%	75,00%	75,00%	
2	70 Km	70 Km	75 Km	75 Km	75 Km	75 Km	75 Km	75 Km	
3	-	-	-	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	45,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
5	60,00%	70,00%	-	-	-	-	-	-	
6	-	2,00	3,00	-	-	-	-	-	
7	55,90%	56,05%	62,00%	66,36%	65,00%	70,00%	70,00%	70,00%	
8	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
9 Tersedianya SOP Layanan Informasi Dan Rekomendasi Tata Ruang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
10 Ketaatan Terhadap RTRW	60,00%	65,00%	70,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
11 Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	
12 Jumlah Pintu Air Dalam Kondisi Baik	6 Unit	7 Unit	8 Unit	9 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	20 Unit	
13 Rasio Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	
14 Persentase Pemeliharaan Rutin Pusat-Pusat Pengendali Banjir	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	
15 Rasio Turap /Talud/Bronjong Terhadap Aliran Sungai/Parit	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	-	-	75,00%	75,00%	
16 Persentase Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	-	-	50,00%	50,00%	
4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman									
1 Persentase KK Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Dasar	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	
2 Rasio Rumah Layak Huni	-	-	-	-	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%	
3 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	
4 Persentase Meningkatkan Kualitas Kebersihan Lingkungan	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	
5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	
2 Jumlah Kegiatan Penegakan Perda	-	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	8 Kali	8 Kali	28 Kali	
3 Frekuensi Pertemuan FKUB Dengan Elemen Masyarakat	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	8 Kali	24 Kali	
4 Jumlah Ormas Penerima Hibah/Bantuan Sosial	14,00	14,00	-	14,00	14,00	14,00	12,00	40,00	
5 Persentase Terjadinya Konflik Sosial Masyarakat	-	40,00%	-	35,00%	30,00%	30,00%	25,00%	25,00%	
6 Persentase Kriminalitas Yang Tertangani	-	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%	
7 Jumlah Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditangani	-	10 Kali	10 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	29 Kali	
8 Cakupan Patroli Pengamanan Wilayah / Per Satuan Wilayah	1.000	1.000	1.000	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500	
9 Angka Kejadian Bencana	2,00	3,00	11,00	15,00	20,00	25,00	25,00	25,00	
10 Titik Hotspot	115,00	-	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Persentase Fasilitas Yang Diperbaiki Setelah Bencana	-	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00	
12 Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	
13 Tercapainya Respon Time Pemadam Kebakaran 11 Menit (SPM)	-	< 11 menit	< 11 menit	< 11 menit	< 11 menit	< 11 menit	< 11 menit	< 11 menit	
14 Persentase Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	60,00%	70,00%	-	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6 Urusan Sosial									

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase PMKS Yang Terlayani Jaminan Sosial	-	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
2	Persentase Lembaga Sosial Yang Berdaya, Efektif Dan Mandiri	60,00%	65,00%	-	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
3	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	70,00%	-	75,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
4	Jumlah peserta PKH	80,00	85,00	95,00	100,00	150,00	175,00	175,00
5	Jumlah Penerima Bantuan Sosial/Hibah Kemasyarakatan	10,00	-	10,00	-	10,00	10,00	50,00
6	Jumlah Bimtek Taruna Siaga Bencana (Tagana)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Urusan Tenaga Kerja							
1	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
3	Nilai Upah Minimum Kabupaten	1.390.000	1.580.000	1.761.700	1.907.040	2.075.000	2.248.116	2.248.116
4	Persentase Peningkatan Transmigrasi Lokal	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
5	Persentase Monitoring Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
6	Persentase Identifikasi Wilayah dan Kawasan Transmigrasi	45,00%	50,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	
Persentase Sosialisasi Mengenai Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2	6,00	7,00	8,00	10,00	10,00	13,00	15,00	15,00	
Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan PP Dan PA									
3	30,91%	30,91%	31,00%	35,38%	37,01%	38,71%	40,49%	40,49%	
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan									
4	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00	5,00	
Rasio KDRT Perempuan									
5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kesehatan di Masyarakat									
3									
Urusan Pangan									
	80,50%	81,50%	82,50%	83,60%	86,40%	89,10%	91,80%	91,80%	
Skor PPH									
4									
Urusan Pertanian									
1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Persentase Luas Lahan Bersertifikat / Persentase Lahan Tanah Aset Daerah Yang Disertifikasikan									
2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara									
5									
Urusan Lingkungan Hidup									
1	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup									
2	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	
Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten									
3	-	Di Bawah Baku Mutu	Di Bawah Baku Mutu	Di Bawah Baku Mutu	Di Bawah Baku Mutu	Di Bawah Baku Mutu	Di Bawah Baku Mutu	Di Bawah Baku Mutu	
Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup									

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	DDL < 1	DDL < 1	DDL < 1	DDL < 1	DDL < 1	DDL < 1	DDL < 1	DDL < 1	
5	35,00%	45,00%	50,00%	55,00%	65,00%	75,00%	75,00%	75,00%	
6	34,00%	36,00%	37,00%	38,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	
6									
Urusan Administrasi Pencatatan Sipil									
1	80,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
7									
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									
1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	-	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
4	10,00	10,00	20,00	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00	
5	5,00	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	25,00	
6	50,00%	70,00%	80,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
7	50,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	(9)		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
8	Persentase Penyelesaian Tata Batas Desa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Persentase Laporan Inventarisasi Aset Desa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
10	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	-	50,00%	55,00%	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%	
8	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga								
1	Persentase Penyediaan Pelayanan KB dan Alkon Bagi Keluarga Miskin	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	
2	Persentase Pelayanan Konseling KB	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%	
3	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	9,00	11,00	13,00	15,00	20,00	25,00	25,00	
4	Persentase Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	
5	Persentase Penguatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan Keluarga Berencana	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	
6	Jumlah Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	3,00	4,00	5,00	5,00	7,00	10,00	10,00	
7	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	35,00	40,00	45,00	50,00	75,00	100,00	100,00	
8	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	
9	Urusan Perhubungan								
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014 (3)	Tahun 2015 (4)	Tahun 2016 (5)	Tahun 2017 (6)	Tahun 2018 (7)	Tahun 2019 (8)		
2	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%	
3	900 Buku Uji, 8.500 Plat Tanda Uji	950 Buku Uji, 8.500 Plat Tanda Uji	1.000 Buku Uji, 8.300 Plat Tanda Uji	1.500 Buku Uji, 3.000 Plat Tanda Uji, 3.555 Stiker	3.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 1.480 Stiker	4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker	4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker	4.000 Buku Uji, 4.000 Plat Tanda Uji, 3.000 Stiker	
4	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	
5	60,00%	65,00%	70,00%	-	-	85,00%	90,00%	90,00%	
6	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	
7	-	-	-	-	-	85,00%	90,00%	90,00%	
10	Urusan Komunikasi Dan Informatika								
1	Persentase Interkoneksi Internet Dan Jaringan Intranet	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%	
2	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemda/Bermitra Dengan Pemda	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
3	Persentase Aparatur Yang memiliki Kompetensi Berbasis TIK	60,00%	70,00%	-	-	-	75,00%	75,00%	
4	Persentase Jumlah Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	
5	Jumlah Aplikasi Yang Dibangun	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah								
1	30,00%	40,00%	45,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%	70,00%
2	30,00	40,00	45,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00
3	35,00	40,00	45,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00
4	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12 Urusan Penanaman Modal								
1	40,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	3.484.556.090.000	3.486.851.231.878	4.016.235.877.407	4.625.993.353.402	5.328.326.114.037	6.137.289.228.193	6.137.289.228.193	6.137.289.228.193
3	40,00%	50,00%	-	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%	65,00%
4	60,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%
13 Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga								
1	-	50,00%	-	55,00%	-	60,00%	60,00%	60,00%
2	26,00	30,00	33,00	37,00	35,00	36,00	36,00	36,00
3	50,00	-	-	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00
4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
14 Urusan Kebudayaan								

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
2 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	10,00	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
3 Jumlah Tenaga Teknis/Juru Pelihara Tempat Bersejarah	-	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00	25,00	25,00	
15 Urusan Perpustakaan									
1 Jumlah Perpustakaan	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00	85,00	100,00	100,00	
16 Urusan Kearsipan									
1 Presentasi SKPD Yang telah Melakukan Arsip Baku	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	80,00%	90,00%	90,00%	
2 Tersedianya Sistem Arsip Elektronik	Tersedia	Tersedia	-	-	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
3 Persentase Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK)	-	-	50,00%	60,00%	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%	
4 Frekuensi Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	-	-	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	15 Kali	
URUSAN PILIHAN									
1 Urusan Kelautan Dan Perikanan									
1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.372,00	2.609,00	2.809,00	3.156,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	
2 Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.996,00	22.986,00	24.020,00	24.981,00	25.855,00	26.760,00	26.760,00	26.760,00	
3 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan (Unit)	2,00	2,00	4,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	
4 Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	31,00	31,25	-	31,75	32,00	32,25	32,25	32,25	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Jumlah Kelompok Yang Dibina	-	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
6	Persentase Luasan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
7	Jumlah Nelayan Yang Difasilitasi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	Jumlah Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Yang Dibina dan Diberdayakan	63,00	70,00	77,00	85,00	100,00	120,00	120,00
9	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan dan Kelautan Yang Dibina	14,00	15,00	16,00	-	-	19,00	19,00
10	Jumlah Produksi Ikan Hasil Olahan (Ton)	1.775,00	1.925,00	2.148,00	2.362,00	2.559,00	2.859,00	2.859,00
11	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Yang Dibina	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00	195,00	195,00
2	Urusan Pariwisata							
1	Jumlah Objek Wisata	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	26,26%	28,28%	24,62%	30,31%	32,49%	34,82%	34,82%
3	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4	Jumlah Forum Komunikasi Antar Pelaku Wisata	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Urusan Pertanian							
1	Luas Tanam Padi (Ha)	59.945,00	52.679,00	45.360,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
2	Produksi Padi (Ton)	-	180.426,00	155.358,00	191.800,00	202.075,00	208.925,00	208.925,00
3	Persentase Produktivitas Produksi Padi per Ha	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
4	Skor PPH	81,70%	82,50%	83,60%	86,40%	89,10%	91,80%	91,80%
5	Produksi Jeruk (Ton/Ha)	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Jumlah Komoditas Yang Bersertifikat	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	10,00
7	Cakupan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Skala Daerah	Skala Daerah	Skala Daerah	Skala Daerah	Skala Daerah	Skala Nasional	Skala Nasional
8	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,00	101,00	101,00	102,00	102,00	103,00	103,00
9	Rasio Kelompok Tani Terhadap Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	23,00	23,00	22,00	22,00	21,00	20,00	20,00
10	Tersedianya Sistem Informasi/Database Pertanian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
11	Jumlah Penerima Hibah/Bansos	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
4	Urusan Perkebunan							
1	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	100.000,00	150.000,00	-	-	-	200.000,00	200.000,00
2	Rasio Kelompok Tani Terhadap Petani	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Persentase Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Kubu Raya	40,00%	45,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%
4	Jumlah Ijin Usaha Perkebunan	110,00	120,00	125,00	150,00	175,00	200,00	200,00
5	Luasan Hutan Desa	14,00 Ha	16,00 Ha	18,00 Ha	-	25,00 Ha	30,00 Ha	30,00 Ha
5	Urusan Peternakan							
1	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	14.752,00	15.670,00	16.028,00	16.190,00	16.434,00	16.572,00	16.572,00
2	Persentase Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
3	Jangkauan Pemasaran Produksi Peternakan	-	-	-	-	Lokal, Regional, Nasional	Lokal, Regional, Nasional	Lokal, Regional, Nasional
4	Produksi Pakan Ternak (Stek)	-	75.000,00	78.750,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	393.750,00
6	Urusan Perdagangan							

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Jumlah Sengketa Konsumen Yang Tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
2 Jumlah Pelaku Usaha Formal Yang Mendapatkan Izin Usaha	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
3 Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
4 Jumlah Produk Berkualitas Ekspor	-	-	-	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00
5 Jumlah Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTPP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya)	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	20 Kali
7 Urusan Perindustrian								
1 Tingkat Pertumbuhan Industri (Kecil, Menengah, Besar)	4,20%	4,40%	4,60%	4,80%	-	-	5,30%	5,30%
2 Penetapan Industri Inti/Prioritas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3 Jumlah Sentra Yang Telah Membentuk Asosiasi Atau Sejenisnya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4 Jumlah IKM Yang Menerapkan Teknologi Industri Tepat Guna	5,00	10,00	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1 Urusan Perencanaan								
1 Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2 Persentase Peningkatan Pengembangan Pengan Data/Informasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Persentase Peningkatan Perencanaan Sosial dan Budaya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Persentase Peningkatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	60,00%	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
7	Persentase Peningkatan Kerjasama Pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%
8	Persentase Peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Persentase Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
2	Urusan Keuangan							
1	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Urusan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan							
1	Pelantikan Kepala Daerah	1 Kali	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali
2	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Kedinasan	800,00	900,00	950,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5 Jumlah SK Pensiun PNS	-	-	160,00	200,00	230,00	250,00	270,00	1.110,00	
4 Urusan Kerja Sama Daerah									
1 Jumlah Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	
5 Urusan Pengawasan									
1 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Internal Dan BPK	-	20,00%	-	60,00%	-	-	100,00%	100%	
2 Persentase Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Bintek Atau Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3 Jumlah LHP	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	185 Dokumen	
6 Urusan Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan									
1 Persentase Raperda Yang Disetujui DPRD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2 Jumlah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan	7,00	21,00	22,00	24,00	24,00	24,00	28,00	119,00	
3 Laporan Realisasi Kegiatan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4 Terkendalinya Laju Inflasi Daerah	0,24	0,24	0,25	0,25	0,27	0,27	0,29	0,29	
7 Urusan Pemerintahan Umum									
1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	
2 Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD-P (Tahun 2014)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3 Koordinasi Penegasan Batas Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4 Jumlah Pemekaran Kecamatan	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00
5 Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	30,00	30,00
6 Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PROGRAM PADA SETIAP SKPD								
1 Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4 Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun, dan sisa waktu akhir periode perencanaan 3 (tiga) tahun. Penyusunan RPJMD Perubahan ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019, sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, perlu peran dan kerjasama seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, maka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya terutama sekali untuk tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru maka RPJMD Perubahan ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RAPBD Kabupaten Kubu Raya. Sinkronisasi dalam penyusunan RKPD pada tahun transisi juga tidak boleh terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan pada masa tersebut.

RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 disusun untuk penyesuaian dan penyelarasan berkenaan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah dan kewenangan daerah, yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya untuk 3 tahun ke depan. Dokumen RPJMD Perubahan ini menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kubu Raya. Gambaran pencapaian target-target kinerja akan terlihat pada evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya. Untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait Dokumen RPJMD Perubahan ini kepada *stakeholder* yang terkait.
- b. Target-target yang telah tercantum didalam RPJMD Perubahan agar didukung oleh semua OPD maupun *stakeholder* melalui berbagai program dan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, konsistensi, transparansi, inovatif, dan rasa tanggung jawab tinggi.
- c. RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 ini menjadi pedoman dan perhatian bagi seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD Perubahan Tahun 2014-2019.
- d. Dokumen RPJMD Perubahan ini menjadi penyelarasan antara dokumen rencana jangka panjang, sekaligus sebagai penghubung dengan dokumen jangka pendek dibawahnya, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan terhindar dari duplikasi-duplikasi dalam Implementasinya di SKPD sesuai dengan prinsip berkesinambungan (*continuity*) dan berkelanjutan (*sustainability*).
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Perubahan ini.

Akhirnya, semoga RPJMD Perubahan ini bisa menjadi acuan bersama bagi segenap elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan proses pembangunan, sehingga terwujud **Kabupaten Kubu Raya Yang Maju, Harmonis Dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing.**

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal...1 Oktober 2018
 PH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN...2018...NOMOR...9